

DR. JAMILAH, S.P.,M.P
DR. IR. MAWARDATI, M.Si

MINAPOLITAN

PERIKANAN TANGKAP DAN KEMISKINAN RUMAH TANGGA NELAYAN

UNIMAL PRESS



**MINAPOLITAN
PERIKANAN TANGKAP
DAN KEMISKINAN RUMAH
TANGGA NELAYAN**



universitas
MALIKUSSALEH

DR. JAMILAH, S.P.,M.P
DR. IR. MAWARDATI, M.Si

MINAPOLITAN
PERIKANAN TANGKAP
DAN KEMISKINAN RUMAH TANGGA
NELAYAN

UNIMAL PRESS

Judul: **MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP DAN KEMISKINAN RUMAH TANGGA NELAYAN**

viii + 108 hal., 15 cm x 23 cm

Cetakan Pertama: September, 2018

Hak Cipta © dilindungi Undang-undang. *All Rights Reserved*

Penulis:

DR. JAMILAH, S.P.,M.P

DR. IR. MAWARDATI, M.Si

Editor:

ELLYTA EFFENDY, S.P.,M.M

Perancang Sampul dan

Penata Letak: **Eriyanto**

Pracetak dan Produksi: **Unimal Press**

Penerbit:

UNIMAL PRESS

Unimal Press

Jl. Sulawesi No.1-2

Kampus Bukit Indah Lhokseumawe 24351

PO.Box. 141. Telp. 0645-41373. Fax. 0645-44450

Laman: www.unimal.ac.id/unimalpress.

Email: unimalpress@gmail.com

ISBN 978-602-464-037-8



ISBN: **978-602-464-037-8**

Dilarang keras memfotocopy atau memperbanyak sebahagian atau seluruh buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat, karunia, dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini yang merupakan kumpulan hasil-hasil penelitian tentang minapolitan perikanan tangkap dan kemiskinan rumah tangga.

Banyak pihak yang telah berkontribusi sehingga buku ini dapat terealisasi dengan baik. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada DPRM Kemenristekdikti atas dukungan pendanaan penelitian sehingga penelitian dapat dilakukan tepat waktu dan berkesinambungan. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada rekan peneliti yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap moment penelitian.

Kepada Unimal Press, penulis mengucapkan terima kasih karena telah bersedia membantu dalam penerbitan buku ini. Tak lupa juga bagi sivitas akademika Fakultas Pertanian yang telah memberikan ijin dan dukungan penuh selama melakukan penelitian.

Lhokseumawe, 16 September 2018

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Tabel.....	vii
BAB 1 PROGRAM MINAPOLITAN	1
1.1 Dasar Pelaksanaan Program Minapolitan.....	1
1.2 Minapolitan Perikanan Tangkap.....	5
1.3 Kelembagaan Perikanan Tangkap.....	9
1.4 Ikhtisar Buku.....	12
BAB 2 KEMISKINAN RUMAH TANGGA NELAYAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN TANGKAP	15
BAB 3 ANALISIS KETIDAKPASTIAN PENDAPATAN NELAYAN ACEH.....	21
3.1 Pendahuluan	21
3.2 Metode Penelitian.....	24
3.3 Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	25
Pendapatan Nelayan Aceh.....	25
Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan di wilayah pesisir	29
3.4 Kesimpulan dan Saran	33
BAB 4 ANALISIS KEUNTUNGAN DAN RENTABILITAS USAHA IKAN OLAHAN DI KOTA LHOKEUMAWE.....	35
4.1 Pendahuluan	36
4.2 Metodologi	38
4.3 Hasil Penelitian Dan Pembahasan	40
4.4 Kesimpulan dan Saran.....	49
BAB 5 PROGRAM MINAPOLITAN DAN PERANANNYA DALAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP DI KABUPATEN ACEH TIMUR.....	51
5.1 Pendahuluan.....	52
5.2 Metode Penelitian	54
5.3 Hasil dan Pembahasan.....	55
5.4 Kesimpulan dan Saran.....	65
BAB 6 PELUANG DAN KENDALA PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP DI KABUPATEN ACEH TIMUR.....	67

6.1 Pendahuluan	68
6.2 Metode Penelitian.....	70
6.3 Kesimpulan dan Saran	77
BAB 7 STRUKTUR PENDAPATAN DAN PENGELUARAN RUMAH TANGGA NELAYAN PADA KAWASAN MINAPOLITAN	81
7.1 Latar Belakang.....	82
7.2 Metode Penelitian	83
7.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan	84
BAB 8 PROSPEK PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN DI KABUPATEN ACEH TIMUR.....	91
8.1 Latar Belakang.....	91
8.2 Metode Penelitian	95
8.3 Hasil Dan Pembahasan	95
8.4 Kesimpulan dan Saran.....	102
GLOSARI.....	105
INDEKS	106
RIWAYAT PENULIS	107

Daftar Tabel

Tabel 1.	Pembagian Hasil Nelayan Buruh pada Usaha Penangkapan Ikan Di Aceh.....	26
Tabel 2.	Hasil Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan.....	31
Tabel 3.	Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi Ikan, Tahun 2013-2016.....	56
Tabel 4.	Perkembangan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Minapolitan	60
Tabel 5.	Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap	61
Tabel 6.	Perkembangan Jumlah Nelayan dari tahun 2012 s/d 2015	62
Tabel 7.	Jumlah Prasarana.....	63
Tabel 8.	Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Kabupaten Aceh Timur	87
Tabel 9.	Fasilitas Pemasaran dan Perbankan di Kawasan Minapolitan Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2017	98

Daftar Gambar

Gambar 2. Geostrategis Kabupaten Aceh Timur.....	93
Gambar 3. Pola kemitraan Pengelolaan Kawasan Minapolitan Kabupaten Aceh Timur.	99

BAB 1

PROGRAM MINAPOLITAN

1.1 Dasar Pelaksanaan Program Minapolitan

Dalam rangka memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada khususnya yang terkait dengan pengembangan perikanan dalam arti luas maka diupayakan suatu pendekatan melalui produk yaitu perencanaan pengembangan kawasan berbasis ekonomi perikanan budidaya dan tangkap (Minapolitan). Minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis manajemen ekonomi kawasan dengan motor penggerak sektor kelautan dan perikanan. Program yang mulai dijalankan Pemerintah Republik Indonesia (RI) sejak 2009 ini merupakan upaya untuk merevitalisasi sentra produksi perikanan dan kelautan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan rakyat. Minapolitan ini merupakan salah satu realisasi dari program revolusi biru yang digalakkan Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia yang salah satu pilarnya adalah mengubah pola pikir daratan ke maritim. Dengan visi menjadi penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar pada 2015, pihaknya tidak akan mendongkrak semua komoditas melainkan hanya akan memprioritaskan pada komoditas yang telah unggul.

Oleh karena itu, sebagai program lima tahun kedepan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun kawasan minapolitan (kawasan produksi kelautan dan perikanan yang terintegrasi) di 28 kabupaten sebagai pilot project untuk meningkatkan produksi perikanan. Menurut UU Nomor 31 Tahun 2004 pasal 3 tentang Perikanan, tujuan pengelolaan perikanan diantaranya adalah : (1) meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan; dan (2) menjamin kearifan sumberdaya ikan, lahan pembudidaya ikan dan tata ruang. Dalam hal pengelolaan perikanan, pemerintah daerah diharapkan sebagai motor penggerak pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Di sisi lain, pembangunan perikanan tangkap di Indonesia secara khusus bertujuan untuk : (1) tercapainya produksi perikanan tangkap sebesar 5,472 juta ton; (2) meningkatnya pendapatan nelayan rata-rata menjadi Rp 1,5 juta/bulan; (3) meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan menjadi US\$ 5,5 milyar; (4) meningkatnya

konsumsi dalam negeri menjadi 30 kg/kapita/tahun; dan (5) penyerapan tenaga kerja perikanan tangkap (termasuk nelayan) sekitar 4 juta orang (SKP, 2005). Melihat UU Nomor 31 Tahun 2004 pasal 3 dan tujuan pembangunan perikanan yang sangat optimis maka kebijakan pembangunan daerah terutama daerah pesisir diharapkan mampu mengakomodir seluruh kepentingan termasuk kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.18/KEPMEN-KP/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan mendefinisikan Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Minapolitan merupakan sebuah konsep pembangunan kelautan dan perikanan yang berbasis wilayah dengan pendekatan sistem manajemen kawasan untuk mendorong peningkatan produksi perikanan sekaligus mendorong pusat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (Sunoto, 2010; KKP, 2011). Minapolitan berada dalam kawasan pemasok hasil perikanan (sentra produksi perikanan) yang mana kawasan tersebut memberikan kontribusi yang besar terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakatnya. Selanjutnya kawasan tersebut (termasuk kotanya) disebut kawasan minapolitan (KKP, 2009). Minapolitan mempunyai 2 unsur utama yaitu 1) minapolitan sebagai konsep pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah, dan 2) minapolitan sebagai kawasan ekonomi unggulan dengan komoditas utama produk kelautan dan perikanan.

Program minapolitan salah satunya ditujukan untuk mengembangkan wilayah pesisir dan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap secara efektif dan efisien serta pengembangan sumberdaya perikanan. Dasar pelaksanaannya mengacu pada potensi perikanan dan masalah dalam perikanan tangkap. Sebagian besar nelayan di Aceh masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara potensi perikanan laut Aceh mencapai 1,8 juta ton per tahun, dan baru bisa diproduksi sekitar 10 persen saja. Sumberdaya perikanan yang melimpah belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh nelayan karena keterbatasan sarana dan prasarana.

Kawasan minapolitan sebagai wadah ruang dalam kegiatan perekonomian berbasis perikanan baik tangkap atau budidaya dan kelautan dan sekaligus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Timur. Adapun tujuan dari penyusunan Kawasan

Minapolitan Kabupaten Aceh Timur dengan konsep minapolitan ini adalah:

- Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk perikanan Kabupaten Aceh Timur.
- Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, pengusaha dan pengolah ikan Kabupaten Aceh Timur yang adil dan merata
- Mengembangkan Kawasan Minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Aceh Timur.

Perencanaan Kawasan minapolitan Kabupaten Aceh Timur merujuk pada Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 523/510/2010 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 35/KEPMEN-KP/2013, Tanggal : 2 Juli 2013, Tentang Penetapan Kabupaten Aceh Timur ,yang berorientasi Kawasan Minapolitan, Sebagai Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap dan Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya.

Kawasan minapolitan Kabupaten Aceh Timur terdiri dari 6 Kecamatan, 15 Mukim dan 110 Desa dengan total luas 755,47 km², 53 desa diantaranya merupakan desa pesisir seluas 137,66 km² (18,22 %) yang menjadi Kawasan Inti dan Kawasan Pendukung, sedangkan desa non pesisir menjadi Kawasan Penyangga ditambah desa pesisir yang tidak termasuk dalam kawasan pengembangan Minapolitan Kabupaten Aceh Timur. Kawasan Minapolitan Kabupaten Aceh Timur merujuk pada Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 523/510/2010 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Aceh Timur, meliputi enam kecamatan yang memiliki batas pantai, yaitu:

- Kecamatan Darul Aman,
- Kecamatan Idi Rayeuk,
- Kecamatan Idi Timur,
- Kecamatan Peudawa,
- Kecamatan Peureulak Barat,
- Kecamatan Peureulak.

Sebenarnya ada 14 Kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Timur yang memiliki wilayah pesisir. Sedangkan wilayah kecamatan pesisir lainnya adalah :

- Kecamatan Madat
- Kecamatan Julok
- Kecamatan Simpang Ulim

- Kecamatan Nurussalam
- Kecamatan Peureulak Timur
- Kecamatan Sungai Raya
- Kecamatan Rantau Selamat
- Kecamatan Birem Bayeun

Wilayah pesisir Kawasan Minapolitan dibentuk dari batas 4 mil laut (1mil laut = 1,85 km) dari pantai dan batas kecamatan pesisir yang terdiri dari 6 kecamatan. Inti kawasan Minapolitan terletak di Idi dengan dilengkapi pusat kawasan minapolitan yang terdiri atas permukiman rusun nelayan, sentra pengolahan hasil perikanan, dok perkapalan, pusat kuliner ikan dan pusat saprodi nelayan. Kawasan pendukung adalah area pesisir dengan perikanan budidaya dan tangkap sebagai karakteristik kegiatan ekonomi yang terletak pada seluruh kecamatan kawasan minapolitan yang berada di sebelah timur jalan nasional Medan-Banda Aceh. Kawasan Penyangga merupakan kecamatan pesisir lain yang tidak termasuk dalam kawasan minapolitan ditambah wilayah kawasan minapolitan yang tersisa.

Secara umum kawasan pengembangan minapolitan terletak di pesisir Timur yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka yang merupakan area perikanan tangkap, yang termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan Perikanan (WPP) I Selat Malaka-Laut Andaman. Kawasan pengembangan minapolitan yang terdiri dari 6 daerah administratif kecamatan. Tidak semua wilayah dalam satu kecamatan pengembangan minapolitan yang menjadi kawasan pengembangan, hanya desa-desa yang memiliki potensi kelautan dan perikanan saja yang menjadi kawasan inti dan kawasan pendukung selebihnya menjadi kawasan penyangga.

Pengembangan Kawasan Minapolitan adalah suatu pendekatan pembangunan kawasan perdesaan melalui upaya-upaya percepatan pembangunan kelautan dan perikanan pada sentra-sentra produksi dengan prinsip terintegrasi dan efisiensi, efektif serta berdaya saing. Tata laksana pengembangan Minapolitan tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan, yang antara lain menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Kabupaten Aceh Timur untuk menjadi kawasan Minapolitan, antara lain komitmen daerah, memiliki komoditas unggulan dan tersedianya fasilitas pendukung, seperti pelabuhan, industri pengolahan, jalan, listrik dan lainnya.

Pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan dilakukan secara terpadu dan dimonitor oleh kelompok kerja. Selain itu juga melibatkan kerjasama dengan pihak provinsi sebagai koordinator wilayah dalam upaya pengembangan dan penyusunan anggaran. Peran pemerintah pusat cukup memberikan kontribusi dalam implementasi pengembangan kawasan baik dalam sektor produksi maupun pemasaran hasil produksi kelautan dan perikanan.

1.2 Minapolitan Perikanan Tangkap

Perikanan tangkap adalah kegiatan perikanan untuk menangkap/memperoleh ikan dengan cara atau alat apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah, dan atau mengawetkannya. Dengan demikian, pengelolaan perikanan tangkap adalah pengelolaan di bidang perikanan tangkap. Tujuan pengelolaan perikanan tangkap dapat diadopsi dari UU No 31 Tahun 2004, yaitu ; meningkatkan taraf hidup nelayan, penerimaan dan devisa negara, mendorong perluasan kesempatan kerja, meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ikan, meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing, meningkatkan ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan, mencapai pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan secara optimal dan menjamin kelestarian sumberdaya ikan.

Minapolitan perikanan tangkap merupakan kawasan pengembangan ekonomi wilayah berbasis usaha penangkapan ikan yang dikembangkan secara bersama oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah (KKP, 2010). Permasalahan penting yang harus dipecahkan oleh pengelola program adalah menjaga keseimbangan untuk kepentingan keberlanjutan sumber daya ikan, kepentingan nelayan setempat, kepentingan industri terkait, dan kepentingan pemerintah. Beberapa permasalahan yang ada saat ini adalah 1) persaingan usaha yang tidak sehat, 2) praktek bisnis monopoli dan eksploitatif, 3) sosialisasi program kurang optimal, dan 4) keterbatasan anggaran implementasi program. Hal ini diperkirakan berdampak kepada beberapa permasalahan lain diantaranya adalah belum optimalnya percepatan kegiatan minapolitan, keterbatasan anggaran, belum tersosialisasikannya program dengan baik, potensi timbulnya praktek bisnis monopoli

serta persaingan usaha antara nelayan tradisional dan nelayan modern.

Permasalahan pelaksanaan Program minapolitan dapat terjadi akibat ketidaksepahaman antar *stakeholders* terkait. Aspek penting dalam pengembangan minapolitan adalah aspek rantai pasok, kelembagaan dan pasar. Aspek-aspek tersebut memiliki kompleksitas permasalahan dan hubungan antar pelaku (unsur) yang cukup rumit. Pengembangan minapolitan akan efektif jika dikelola secara terintegrasi, artinya, ada kaitan antara usaha nelayan hingga perusahaan eksportir (pemasaran) secara sinergis dan produktif serta ada kaitan antar wilayah, antar sektor bahkan antar komoditas (Djamhari, 2004 dalam Riadi, 2012). Basis integrasi dalam pengembangan minapolitan dapat dicirikan oleh kooperasi, kolaborasi, berbagi informasi, kepercayaan, kemitraan, penyebaran teknologi, pergeseran dari proses individual ke proses integrasi rantai pasok (Riadi, 2012).

Perikanan tangkap Kabupaten Aceh Timur berpotensi untuk dikembangkan karena terletak pada kawasan segitiga pertumbuhan kerjasama Indonesia-Thailand-Malaysia (IMT-GT), ketersediaan sumberdaya perikanan, infrastruktur, dan terbukanya peluang pasar ekspor produk perikanan. Namun demikian sumberdaya ini belum mampu mengangkat taraf kehidupan masyarakat pesisir. Walaupun pemanfaatan sumberdaya tersebut telah menunjukkan sumbangan berarti bagi daerah. Pada tahun 2016 kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Aceh Timur sebesar 45,97 persen atau senilai Rp. 3.899.883,8 juta) tetapi sebagian masyarakat khususnya nelayan masih belum mampu memanfaatkan sumberdaya secara optimal. Hal ini terlihat dari tingginya angka kemiskinan masyarakat pesisir di Kabupaten Aceh Timur. Pada tahun 2016 penduduk miskin di Kabupaten Aceh Timur berjumlah 61.630 jiwa atau sebesar 15,06 persen dan sebagian besar berada di wilayah pesisir dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 350.186/kapita/bulan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur, 2017).

Kondisi perikanan tangkap di Kabupaten Aceh Timur sebagian besar masih dalam bentuk usaha menengah dan kecil. Dari 1.314 unit armada yang bergerak dalam bidang perikanan tangkap, 687 unit berupa armada kapal motor kurang dari 5 GT (gross tonase) atau 52,2 % (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur, 2017). Akibatnya ruang gerak nelayan menjadi terbatas karena tidak mampu beroperasi lebih sehingga konsentrasi daerah penangkapan (*fishing ground*) berada di perairan kurang dari 4 mil laut. Hal ini

menyebabkan rendahnya pendapatan nelayan. Pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan peningkatan kesejahteraan nelayan dapat dilakukan melalui: (1) penciptaan lapangan kerja alternatif sebagai sumber pendapatan lain bagi keluarga, (2) mendekatkan masyarakat dengan sumber modal dengan penekanan pada penciptaan mekanisme mendanai diri sendiri (*self financing mechanism*), (3) mendekatkan masyarakat dengan sumber teknologi baru yang lebih berhasil dan berdaya guna, (4) mendekatkan masyarakat dengan pasar, serta (5) membangun solidaritas serta aksi kolektif di tengah masyarakat (Nikijuluw, 2001).

Di Kabupaten Aceh Timur, sebagian besar dari nelayan bekerja sebagai nelayan kecil, buruh nelayan, pengolah ikan skala kecil dan pedagang kecil karena memiliki kemampuan investasi terbatas. Nelayan kecil hanya mampu memanfaatkan sumberdaya di daerah pesisir dengan hasil tangkapan yang terus menurun akibat persaingan dengan kapal besar dan penurunan mutu sumberdaya pantai. Hasil tangkapan (ikan) yang mudah rusak dapat melemahkan posisi tawar mereka dalam transaksi penjualan. Selain itu, pola hubungan eksploitatif antara pemilik modal dengan buruh dan nelayan, serta usaha nelayan yang bersifat musiman dan tidak menentu menyebabkan masyarakat miskin di kawasan pesisir cenderung sulit untuk keluar dari jerat kemiskinan dan hutang dengan pemilik kapal. Berbagai peraturan, qanun, dan regulasi lain yang mengatur lingkungan hidup termasuk pesisir belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini didukung oleh Sugiharto *et al.* (2013) menyatakan bahwa perangkap kemiskinan yang melanda kehidupan nelayan disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan fluktuasi musim-musim ikan, keterbatasan sumber daya manusia, modal serta akses, jaringan perdagangan ikan yang eksploitatif terhadap nelayan sebagai produsen, tetapi juga disebabkan oleh dampak negatif modernisasi perikanan yang mendorong terjadinya pengurasan sumberdaya laut secara berlebihan.

Sumber Daya Ikan (SDI) relatif melimpah, dengan komoditas unggulannya berbagai jenis ikan pelagis dan demersal, seperti tongkol komo, layang deles, madidihang, cakalang, lisung, kapas, albacora, bawal hitam, golok-golok dan jenis non ikan seperti udang-udangan (crustacea) yang berkulit keras maupun berkulit lunak seperti cumi-cumi, sotong dan lain-lain. Dari segi pola pemanfaatan hasil laut, sebagian besar dipasarkan untuk konsumsi dalam bentuk ikan segar, hanya sebagian kecil dalam bentuk olahan tradisional

menjadi ikan asin atau terasi. Ke depan, sebagai bagian dari kawasan pengembangan minapolitan, Kecamatan Idi Rayeuk diharapkan tidak hanya mengandalkan perekonomian dari penjualan ikan segar tetapi secara bertahap akan diarahkan pada kawasan pengembangan agroindustri berbasis ikan untuk menghasilkan ikan olahan, meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Selama ini, pengelolaan sumberdaya perikanan cenderung berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata dengan mengeksploitasi sumberdaya perikanan secara besar-besaran tanpa memperhatikan aspek keberlanjutannya. Ini berdampak pada kondisi sumberdaya perikanan khususnya di wilayah pantai mulai terancam keberlanjutannya. Hasil tangkapan beberapa jenis ikan terus mengalami penurunan. Kondisi seperti ini dapat terjadi karena semakin banyaknya komunitas pemanfaat sumberdaya atau semakin efektifnya alat tangkap yang digunakan namun daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) sumberdaya perikanan semakin menurun. Kondisi ini selain dapat menurunkan tingkat produktivitas dan pendapatan nelayan juga memicu terjadinya dampak sosial berupa konflik antar nelayan di wilayah pantai (Mulyani, 2013).

Faktor penyebab terjadinya lingkaran kemiskinan pada sebagian besar masyarakat nelayan, terutama nelayan lokal adalah keterbatasan sarana dan pra sarana, keterbatasan penguasaan teknologi penangkapan, keterbatasan akses ke sumber permodalan seperti bank, serta rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan para nelayan. Di samping itu, jenis pekerjaan sebagai nelayan memiliki sifat ketergantungan yang tinggi terhadap musim. Kondisi ini berakibat pada sulitnya kelompok masyarakat tersebut untuk meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik. Masyarakat nelayan lokal sebagai kelompok masyarakat yang sangat rentan dan hidup dalam kemiskinan seringkali tidak tersentuh oleh program-program yang dilaksanakan pemerintah daerah. Kondisi ini disebabkan karena dalam perencanaan program pembangunan daerah tidak melibatkan masyarakat nelayan lokal, sehingga program yang digulirkan sering tidak tepat sasaran (Subri, 2007).

Tantangan masa depan dalam mengelola perairan di Kabupaten Aceh Timur adalah mampu mengakomodir semua kepentingan stakeholder terkait dan berkelanjutan sebab pertumbuhan ekonomi tidak akan *sustainable* jika ekologi tidak *sustainable* karena kelestarian sumberdaya pulih adalah penentu keberlanjutan ekonomi berbasis kepulauan (Kusumastanto 2002).

Program dan kegiatan dari sumber dana Tugas Pembantuan dalam rangka pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Aceh Timur pada sektor Kelautan dan Perikanan didanai oleh tiga Direktorat Jenderal yaitu Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Perikanan Budidaya serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

1.3 Kelembagaan Perikanan Tangkap

Kelembagaan yang dominan dalam mengelola kawasan minapolitan adalah organisasi pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Di dalam organisasi pemerintah daerah terdapat susunan komponen organisasi disertai tugas dan fungsinya (unsur legeslatif, eksekutif, dan yudikatif) sehingga orang-orang di dalamnya menjalankan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. DPRD membuat peraturan perundangan sebagai payung hukum pelaksanaan tugas eksekutif. Penegak hukum melaksanakan pengawasan agar pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangan. Pengembangan kawasan minapolitan dilakukan secara sinergis mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan. Keanggotaan pokja yang terdiri dari unsur instansi terkait dan masyarakat seperti dinas /instansi perikanan, Bappeda, dinas pekerjaan umum, dinas koperasi, dinas perindustrian dan perdagangan dan unsur lainnya yang dianggap penting ikut berperan dalam program pengembangan kawasan minapolitan. Dalam melaksanakan tugasnya, bupati membagi habis tugas pengelolaan kawasan minapolitan kepada dinas, badan, kantor, dan unit pelaksana teknis. Organisasi pelaksana pengelola Kawasan Minapolitan tersebut langsung bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Timur. Ukuran dan bentuk struktur organisasi pemerintah daerah tersebut bervariasi tergantung kebutuhan daerah. Organisasi pengelola Kawasan Minapolitan yang efisien haruslah ramping, tetapi kaya fungsi.

Pada era manajemen modern, pemerintah daerah lebih disarankan sebagai pengatur atau fasilitator daripada sebagai pelaksana kegiatan di lapangan. Misalnya, untuk membangun dan mengelola fasilitas dalam kawasan Minapolitan, seperti industri pengolahan ikan, industri es balok, galangan kapal cukup diserahkan kepada masyarakat atau pihak swasta; sementara pihak pemerintah mengatur kebijaksanaan mengenai lokasi dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Akan tetapi, untuk penyediaan kebutuhan dasar pelayanannya yang tidak efisien secara ekonomi maka harus tetap menjadi tanggungjawab pemerintah

daerah, misalnya. perumahan nelayan, pusat kuliner ikan, balai benih ikan, puskesmas dll.

Dalam rangka pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Aceh Timur, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam hal ini Bupati Aceh Timur telah membentuk Tim Kelompok Kerja dan Tim Sekretariat Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Aceh Timur melalui Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 523/782/2010 tertanggal 27 Desember 2010. Disamping pemangku kepentingan dari aparat Pemerintah Kabupaten Aceh Timur perlu juga memasukan kelembagaan yang ada di masyarakat, dalam hal ini yang erat kaitannya dengan sektor perikanan seperti Lembaga Hukom Laot/ Panglima Laot Aceh Timur dari tingkat Kabupaten sampai tingkat Lhok (Kecamatan) dan kelompok profesi seperti Kelompok Tani dan Nelayan Andalan, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia dan lain-lain sebagai mitra dalam implementasi program.

Adanya pemimpin atau yang dituakan dalam hal urusan perikanan terutama perikanan laut dengan sebutan "*Panglima Laot*". Panglima Laot terstruktur dari tingkat Lhok atau kecamatan ; tingkat Kabupaten/Kota sampai tingkat Provinsi. Panglima Laot sebagai pemegang otoritas menegakkan Hukom Adat Laot pada tingkatnya. Lembaga Hukom Adat Laot/Panglima Laot adalah lembaga yang independent yang punya hukom/peraturan dan AD/ART tersendiri tentang struktur kelembagaannya.

Bahwa wilayah pantai (pesisir) yang termasuk dalam wilayah Hukom Adat Laot seukuran ± 200 meter (1 Leen pukut/diukur pada batas pasang air laut) merupakan satu kesatuan yang berlaku Hukom Adat Laot. Oleh karena itu tugas penegakan Hukom Adat Laot dan menjaga ekosistem pantai melalui kegiatan penanaman mangrove dan pemanfaatan wilayah pesisir harus disesuaikan dengan Hukom Adat Laot setempat. Sebagian Hukom Adat Laot yang dipegang teguh dan telah disepakati bersama seluruh Panglima Laot se Provinsi Aceh pada konfrensi Panglima Laot yang diselenggarakan di Banda Aceh, 9 Desember 2007 adalah sebagai berikut :

1. Hari pantang melaut dan batas-batas waktunya yaitu:
 - Hari Raya Aidhul Fitri batas waktunya 3 hari penuh (mulai dari hari pertama hari raya sampai hari ke-3 hari raya)
 - Hari Raya Aidul Adha 3 hari penuh (mulai dari hari pertama hari raya sampai hari ke-3 hari raya)
 - Hari Jum'at 1 hari penuh (dengan ketentuan setelah shalat Jum'at boat boleh melaut tetapi tidak boleh mengadakan kegiatan penangkapan ikan)

- Hari kenduri laot 3 hari penuh (di tingkat Lhok)
 - Memperingati hari Tsunami 1 hari penuh
 - Perayaan hari proklamasi 17 Agustus 1 hari penuh
2. Seandainya seorang nelayan atau lebih dari suatu Lhok melakukan pelanggaran hari pantang melaut tersebut di wilayah Lhok lainnya, maka Panglima Laot Lhok yang wilayahnya dilanggar tersebut dapat mengambil tindakan sesuai dengan hukum adat laot yang berlaku.
 3. Menegakkan kembali tentang tatacara penangkapan ikan dengan rumpon dan kayu apong.
 - a. Tata cara meletakkan rumpon dan bagi hasil
 - Peletakan rumpon laut dalam (dimulai dari lima mil sampai 12 mil dari pantai) dengan ketentuan jarak dari rumpon A ke rumpon B berjarak 3 mil laut
 - Bagi hasil, apabila rumpon si A diambil ikan oleh boat lain maka harus dibagi hasil $\frac{1}{4}$ dari uang bersih kepada pemilik rumpon.
 - Rumpon pinggir (3 mil laut dari pantai) penempatan rumponnya di atur oleh Panglima Laot Lhok masing-masing.
 - Rumpon yang pemiliknya berdomisili di luar provinsi NAD tidak boleh meletakkan di perairan Aceh (batas dihitung dua belas mil laut dari titik terluar wilayah pantai Aceh) sesuai dengan undang-undang Pemerintahan Aceh.
 - b. Kayu Hanyut (Kayu Apong)
 - Apabila seorang nelayan (boat) melihat ada beberapa kayu apong, maka nelayan (boat) tersebut boleh memiliki hanya satu kayu apong saja (berlaku hukum krah).
 - Apabila kayu apong yang sudah ditandai oleh nelayan boat Si A diambil ikan oleh nelayan/boat lain maka bagi hasilnya harus dibagi $\frac{1}{4}$ dari uang bersih penangkapan oleh nelayan boat lainnya kepada pemilik kayu apong (tatacara Meulaboh tetap berlaku hukum adat yang ada).
 4. Penggunaan Pukat trawl, alat tangkap, racun, bahan kimia, dan pengeboman yang mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan biota laut lainnya serta pengrusakan hutan pantai merupakan pelanggaran hukum adat laot dan dilarang keras untuk dilakukan/ dioperasikan di seluruh wilayah perairan laut Aceh.

Kepada pihak yang berwenang (TNI AL, kepolisian dan PEMDA) diminta untuk mengambil tindakan.

5. Menyetujui bahwa saksi dalam Persidangan Hukum Adat Laot bersedia diambil sumpahnya.
6. Setiap penyelesaian perkara hukum adat laot harus dibuatkan berita acara persidangan, sehingga menjadi suatu yurisprudensi penyelesaian perkara pelanggaran hukum adat laot.

1.4 Ikhtisar Buku

Bab 1 menjelaskan tentang program minapolitan dan perikanan tangkap, yang mencakup dasar pelaksanaan program minapolitan, permasalahan perikanan tangkap, dan kelembagaan perikanan tangkap. Bab 2 menganalisis ketidakpastian pendapatan nelayan Aceh dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bab 3 menganalisis tingkat keuntungan dan rentabilitas usaha ikan olahan (ikan teri dan ikan kayu di Kota Lhokseumawe. Adanya perbedaan tingkat keuntungan dan rentabilitas antara ikan teri dengan perebusan, ikan teri tanpa perebusan, dengan ikan kayu. Bab 3 mengkaji tentang program minapolitan dan peranannya dalam pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Aceh Timur. Secara bertahap Program minapolitan berkontribusi positif terhadap perkembangan perikanan Kabupaten Aceh Timur terutama dari perbaikan infrastruktur, pengadaan dan pengembangan sarana prasarana perikanan. Ke depan program ini diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia dan agroindustri perikanan. Bab 4 mengidentifikasi peluang dan kendala pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Aceh Timur. Bab 5 menganalisis struktur pendapatan dan pengeluaran rumah tangga nelayan pada kawasan minapolitan. Struktur pendapatan merupakan pendapatan nelayan dari subsektor perikanan dan luar perikanan. Struktur pengeluaran meliputi pengeluaran untuk pangan, non pangan, kesehatan, dan tembakau. Bab 6 menjelaskan prospek pengembangan kawasan minapolitan ditinjau dari sumberdaya perikanan, sarana dan prasarana, pasar dan pemasaran, infrastruktur, sarana pengolahan ikan, kelembagaan, dan kontribusi subsektor perikanan terhadap perekonomian daerah Kabupaten Aceh Timur.

Daftar Pustaka

- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur. 2017. *Angka Kemiskinan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010-2016*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur. Idi Rayeuk. <https://acehtimurkab.bps.go.id>
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur. 2017. *Laporan Tahunan Program Minapolitan*. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur. Idi Rayeuk.
- [KKP]. 2009. Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor Kep45/DJ-PB/2009 tentang Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Minapolitan. <http://www.scribd.com/doc/28656676/Pedoman-Umum-an-an>. [23 Jul 2011].
- _____. 2010. Pengembangan minapolitan perikanan tangkap. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. http://www.pupi.kkp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=103. [29 Jul 2011].
- [KKP]. 2011. *Pedoman Umum Minapolitan*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Mulyani AT. 2013. Kebijakan Pengembangan Ekonomi Perikanan Tangkap Berkelanjutan di Provinsi DKI Jakarta. Tesis. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Nikijuluw, Victor P.H. (2001. Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu. Makalah pada Pelatihan Pengelolaan Pesisir Terpadu. Proyek Pesisir, *Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan*, Institut Pertanian Bogor. Bogor, 29 Oktober 2001. 17 p.
- Riadi F. 2012. Model pengembangan agroindustri karet alam terintegrasi [disertasi]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Subri M. 2005. *Ekonomi kelautan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 224 hal.
- Sugiharto E, Salmani, Gunawan BI. 2013. Studi tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di Kampung Gurimbang Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Dalam: *Jurnal Ilmu Perikanan Tropis*. 3(2): 87-94.

Sunoto. 2010. Arah kebijakan pengembangan konsep minapolitan di Indonesia. *Bull Ttrg* Maret-April:13-17.
http://bulletin.penataanruang.net/upload/data_buletin/BUTARU%20EDISI%202.pdf. [10 Juli 2011].



BAB 2

KEMISKINAN RUMAH TANGGA NELAYAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN TANGKAP

Kemiskinan dan kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan isu utama pembangunan ekonomi Aceh. Namun kemiskinan nelayan Aceh yang mencerminkan kondisi keprihatinan rumah tangga, permasalahan, keterbatasan sumberdaya nelayan dan harapan nelayan Aceh masih belum digambarkan secara nyata, bahkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang digulirkan pemerintah belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan nelayan yang menjeratnya dalam jurang kemiskinan. Besarnya angka kemiskinan di wilayah pesisir Aceh mengindikasikan bahwa akses-akses masyarakat pesisir (nelayan) Aceh dalam melakukan usaha-usaha peningkatan taraf hidup memiliki keterbatasan. Ketidakpastian pendapatan dan kurangnya akses nelayan dalam memperoleh modal usaha memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah.

Fauzi (2005) menyatakan bahwa hampir sebagian besar nelayan hidup dibawah garis kemiskinan dengan pendapatan kurang dari US\$ 10 per kapita per bulan. Jika dilihat dalam konteks *Milenium Development Goal*, pendapatan sebesar itu sudah termasuk dalam extreme poverty, karena lebih kecil dari US\$ 1 per hari. Pelaku perikanan, khususnya mereka yang berskala kecil (perikanan pantai) masih tergolong masyarakat miskin. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan nelayan antara lain: rendahnya tingkat teknologi penangkapan ikan, kecilnya skala usaha, belum efisiennya skala pemasaran hasil, dan status nelayan yang sebagian besar adalah buruh.

Faktor penyebab terjadinya kemiskinan nelayan adalah keterbatasan sarana dan prasarana penangkapan ikan, adanya keterbatasan penguasaan teknologi penangkapan, lemahnya akses permodalan, seperti bank dan belum adanya lembaga keuangan mikro bidang perikanan yang menyebabkan ketergantungan nelayan terhadap pemilik modal (terjadinya hubungan patron klien), rendahnya pendidikan dan keterampilan nelayan yang menyebabkan

nelayan sulit mengembangkan usaha. Kondisi ini kehidupan nelayan sarat dengan kemiskinan.

Pola hidup nelayan juga menentukan kemiskinan nelayan. Sebagaimana diketahui bahwa pendapatan nelayan ditentukan oleh fluktuasi musim tangkapan. Jika hasil tangkapan tinggi, nelayan cenderung melaut sedangkan jika musim tangkapan rendah yang ditentukan oleh arah angin, nelayan cenderung menganggur dan aktivitas nelayan hanya untuk kegiatan perbaikan sarana penangkapan seperti perbaikan perahu/kapal dan tangkap. Pada saat hasil tangkapan tinggi, nelayan dapat membeli barang-barang mahal namun disaat tangkapan rendah, kehidupan mereka sangat buruk. Pada kondisi ini, nelayan mengandalkan pemilik modal (touke) untuk mendapatkan pinjaman uang guna memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti membeli suatu barang berharga di rumah atau membutuhkan uang dalam jumlah besar seperti hajatan pernikahan anak. Kondisi ini menyebabkan terjadi hubungan patron klien dengan pemilik modal yang menyebabkan ketergantungan nelayan yang cukup tinggi dengan pemilik modal sehingga nelayan sulit keluar dari jurang kemiskinan.

Indraningsih dan Noekman (1995) mengatakan bahwa indikator kemiskinan rumah tangga nelayan yang digunakan adalah : (1) penguasaan asset produksi nelayan, yakni berdasarkan pemilikan alat tangkap, (2) pola pengeluaran rumah tangga, baik pangan maupun non pangan, (3) sumber pendapatan rumah tangga nelayan dari hasil tangkapan ikan atau usaha perikanan sekitar 60 persen dan usaha non perikanan berkisar 23 persen, dan (4) aktivitas perikanan dan non perikanan.

Kuatnya pola hubungan patron-klien pada masyarakat pesisir disebabkan oleh kegiatan perikanan yang penuh resiko dan ketidakpastian perolehan pendapatan sehingga terjadi ketergantungan nelayan dengan pemiliki modal (patron). Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Suyanto (2003), bahwa faktor yang menyebabkan kondisi kesejahteraan nelayan tidak pernah beranjak membaik, yaitu : Pertama, berkaitan dengan sifat hasil produksi nelayan yang sering kali rentan waktu atau cepat busuk sedangkan nelayan memiliki keterbatasan dalam pengolahan ikan, sementara disisi lain upaya kebutuhan rumah tangga menyebabkan nelayan berusaha menjual secepat mungkin ikan hasil tangkapannya ke pasar. Hal ini juga menyebabkan posisi tawar nelayan di pasar sangat rendah. Kedua, akibat perangkap hutang maka sering terjadi keluarga nelayan miskin kemudian harus menjual sebagian atau

bahkan semua asset produksi yang mereka miliki untuk menutupi hutang dengan pemilik kapal. Kondisi ini menyebabkan nelayan sulit melepaskan ketergantungan terhadap pemilik modal. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu adanya usaha pemanfaatan sumber daya laut kearah yang lebih optimal, swadaya serta produktivitas masyarakat pesisir guna dapat menciptakan kehidupan sosial ekonomi yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan dan taraf hidup nelayan (Nurfirani, 2003).

Masalah kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan sebuah solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial. Untuk itu harus diketahui akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan nelayan. Dilihat dari lingkungannya, kemiskinan nelayan terdiri atas kemiskinan prasarana dan kemiskinan keluarga. Kemiskinan prasarana dapat diindikasikan pada ketersediaan prasarana fisik di desa-desa nelayan, yang pada umumnya masih sangat minim, seperti tidak tersedianya air bersih, jauh dari pasar, dan tidak adanya akses untuk mendapatkan bahan bakar yang sesuai dengan harga standar. Kemiskinan prasarana secara tidak langsung juga memiliki andil bagi munculnya kemiskinan keluarga, kemiskinan prasarana juga dapat mengakibatkan keluarga yang berada garis kemiskinan (*near poor*) bisa merosot ke dalam kelompok keluarga miskin (Mulyadi, 2007).

Hal utama yang terkandung dalam kemiskinan adalah kerentanan dan ketidakberdayaan. Dengan kerentanan yang dialami, orang miskin akan mengalami kesulitan untuk menghadapi situasi darurat (Soetrisno, 1995 dalam Mulyadi, 2007). Ini dapat dilihat pada nelayan perorangan misalnya, mengalami kesulitan untuk membeli bahan bakar untuk keperluan melaut. Hal ini disebabkan sebelumnya tidak ada hasil tangkapan yang bisa dijual, dan tidak ada dana cadangan yang dapat digunakan untuk keperluan yang mendesak. Hal yang sama juga dialami oleh nelayan buruh, mereka merasa tidak berdaya di hadapan para *touke* bangku yang telah mempekerjakannya, meskipun bagi hasil yang diterimanya dirasakan tidak adil. Secara umum, kemiskinan masyarakat pesisir ditengarai disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, antara lain kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, inftrastruktur. Di samping itu, kurangnya kesempatan berusaha, kurangnya akses terhadap informasi, teknologi dan permodalan, budaya dan gaya hidup yang cenderung boros, menyebabkan posisi tawar masyarakat miskin semakin lemah.

Beberapa penyebab nelayan miskin, yaitu; 1) Kondisi Alam, kompleksnya permasalahan kemiskinan masyarakat nelayan terjadi disebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi ketidakpastian (*uncertainty*) dalam menjalankan usahanya. Musim paceklik yang selalu datang tiap tahunnya dan lamanya pun tidak dapat dipastikan akan semakin membuat masyarakat nelayan terus berada dalam lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle*) setiap tahunnya; 2) Tingkat pendidikan nelayan umumnya belum banyak tersentuh teknologi modern, kualitas sumber daya manusia rendah dan tingkat produktivitas hasil tangkapannya juga sangat rendah. Tingkat pendidikan nelayan berbanding lurus dengan teknologi yang dapat dihasilkan oleh para nelayan, dalam hal ini teknologi di bidang penangkapan dan pengawetan ikan. Ikan cepat mengalami proses pembusukan dibandingkan dengan bahan makanan lain disebabkan oleh bakteri dan perubahan kimiawi pada ikan. Oleh karena itu, diperlukan teknologi pengawetan ikan yang baik. Selama ini, nelayan hanya menggunakan cara yang tradisional untuk mengawetkan ikan. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan penguasaan nelayan terhadap teknologi; 3) Pola kehidupan nelayan bersifat Strootipe, semisal boros dan malas oleh berbagai pihak sering dianggap menjadi penyebab kemiskinan nelayan; 4) Pemasaran ikan umumnya dalam bentuk ikan segar dan sifatnya yang cepat busuk menyebabkan nelayan tidak memiliki kekuatan menawar di pasar sehingga pendapatan nelayan rendah dan tidak semua daerah pesisir memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI); 5) Program pemerintah yang tidak memihak nelayan, salah satunya adalah kenaikan BBM yang menyebabkan biaya penangkapan ikan meningkat. Jika sampan bermesin ukuran 5-12 PK membutuhkan rata-rata 10 liter solar sekali melaut, maka setiap sampan akan mengeluarkan biaya Rp.65.000 dalam kondisi harga normal. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Suyanto (2003), bahwa adanya kecenderungan bagi nelayan langsung menjual ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga posisi tawar nelayan di pasar relatif rendah dan adanya perangkap hutang dengan pemiliki modal.

Dalam perspektif struktural kemiskinan nelayan tidak hanya disebabkan hubungan patron-klien yang menimbulkan jeratan utang dan mengarah pada bentuk eksploitasi. Keterbatasan akses nelayan terhadap hak penguasaan sumberdaya perikanan menyebabkan sumberdaya perikanan lebih banyak dinikmati oleh pengusaha kapal

atau pemilik modal. Nelayan lebih banyak melakukan penangkapan di sepanjang pesisir pantai sehingga perolehan ikan jauh lebih kecil dibandingkan jenis ikan yang berada di laut dalam. Ketidak pastian perolehan jumlah tangkapan menyebabkan nelayan miskin menjadi semakin miskin.

Secara sosial, kemiskinan nelayan dicirikan oleh tingkat pendidikan anggota rumah tangga yang masih rendah (umumnya setingkat Sekolah Dasar (SD)). Sebagian besar nelayan di Aceh hanya mampu menempuh pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar (SD), bahkan ada pula sebagian nelayan yang sama sekali tidak pernah mengenyam bangku pendidikan karena keterbatasan biaya dan sejak kecil sudah diikuti sertakan dalam kegiatan melaut. Kemiskinan dapat pula dicirikan oleh kesehatan anggota rumahtangga yang masih rendah. Hal ini dapat terlihat dari menu makanan sehari-hari dan perawatan kesehatan anggota rumahtangga. Bagi rumahtangga nelayan miskin, menu makanan sehari-hari masih belum memenuhi menu empat sehat lima sempurna. Selain itu, Rumahtangga nelayan miskin biasanya hanya memeriksakan kesehatannya di puskesmas pembantu yang ada di Desa atau kepada paranormal dan kurang memanfaatkan tenaga medis meskipun saat ini pemerintah telah menyediakan pengobatan gratis melalui JPS (Jaminan Pengamanan Sosial) dan JKA (Jaminan Kesehatan Aceh)

Pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap mencakup besarnya partisipatif nelayan pada usaha penangkapan ikan, pengolahan, dan pemasaran ikan dan kemampuan perikanan tangkap dalam menunjang peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir. Hal ini sebagaimana diselaraskan pada Program Minapolitan yang dicanangkan pemerintah. Nelayan merupakan tenaga kerja aktif yang memperoleh sumber penghidupannya dari aktifitas penangkapan ikan di laut, dan tidak menutup kemungkinan memperoleh sumber kehidupan dari lainnya. Keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Kecamatan Idi Rayeuk menyebabkan kehidupan nelayan terpusat pada seluruh kegiatan penangkapan ikan seperti pengadaan sarana penangkapan ikan (unit penyediaan BBM, pabrik es, dan alat penangkapan ikan), penangkapan ikan (yang membedakan nelayan berdasarkan kepemilikan alat tangkap), perbaikan jaring, pengolahan ikan, dan pemasaran ikan.

Rumah tangga nelayan menghadapi persoalan kompleks dalam hubungannya dengan produksi, konsumsi, dan alokasi tenaga kerja. Hal ini menyebabkan analisis satu sisi untuk melihat tingkah laku ekonomi nelayan sangatlah lemah (Fauzi dan Anna, 2002b).

Permasalahan di wilayah pesisir antara lain : (1) pemanfaatan sumberdaya melebihi kapasitas dan daya dukung, (2) kompetisi antara skala industri, (3) distribusi hasil tidak seimbang dan adil karena akses terhadap usaha perikanan yang berbeda, (4) kebijakan secara spasial untuk daerah pesisir pantai dan pulau kecil sehingga mengakibatkan banyak area yang rusak, (5) kelebihan investasi pada beberapa sektor, sementara investasi sektor yang lain terbatas, dan (6) kemiskinan struktural terutama di desa pesisir/desa nelayan (Muhammad, 2002).



BAB 3

ANALISIS KETIDAKPASTIAN PENDAPATAN NELAYAN ACEH

Abstrak

Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis ketidakpastian pendapatan nelayan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Aceh. Tingkat pendapatan nelayan dianalisis dengan metode analisis pendapatan, Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan digunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pendapatan nelayan berkisar antara Rp. 50.000/hari hingga Rp. 100.000/hari dan nelayan hanya melaut 5 hari dalam seminggu. Jika pendapatan rata-rata nelayan dikonversi dalam seminggu adalah minimal Rp. 35.714,29/hari, hingga Rp. 71.428,57/hari. Jika diasumsikan anggota keluarga sebanyak 5 orang, maka pendapatan minimum Rp. 7.142,86 per kapita per hari dan maksimum Rp. 14.285,71 per kapita per hari atau Rp. 428.571,30 per kapita per bulan. Dengan menggunakan ukuran garis kemiskinan Sajogyo, nelayan di daerah penelitian dikategorikan sebagai kelompok nelayan paling miskin, karena pendapatan tertinggi nelayan berada di bawah Rp. 487.500. Ketidakpastian perolehan pendapatan nelayan mendorong nelayan pada jurang kemiskinan yang disebabkan oleh fluktuasi musim tangkapan, rendahnya sumberdaya manusia (SDM) nelayan, eksploitasi modal, ketimpangan dalam sistem bagi hasil, motorisasi, dan kebiasaan nelayan mengatasi kesulitan ekonomi.

Key word : ketidak pastian, pendapatan, dan kemiskinan nelayan

3.1 Pendahuluan

Lebih dari 22 persen dari seluruh penduduk Indonesia justru berada di bawah garis kemiskinan dan selama ini menjadi golongan yang paling terpinggirkan karena kebijakan dalam pembangunan yang lebih mengarah kepada daratan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2008, penduduk miskin di Indonesia mencapai 34,96 juta jiwa dan 63,47 persen % di antaranya adalah masyarakat yang hidup di kawasan pesisir dan pedesaan. Tahun 2010 angka kemiskinan yang dikeluarkan BPS terakhir mencapai 35 juta orang

atau 13,33 persen dari jumlah penduduk yang mencapai sekitar 237 juta jiwa, sedangkan Bank Dunia melaporkan kemiskinan di Indonesia masih berkisar sekitar 100 juta (Riyono, 2011).

Provinsi Aceh memiliki garis pantai 2.666,27 km dan wilayah laut kewenangan 43.339, 83 km² atau merupakan wilayah pesisir terbesar di Pulau Sumatera. Namun kenyataannya sumberdaya ini belum mampu mengangkat taraf kehidupan masyarakat pesisir. Faktanya, 25 persen masyarakat pesisir Aceh masih hidup di bawah garis kemiskinan atau belum sejahtera. Jumlah nelayan Aceh saat ini diperkirakan 61.768 orang dengan 58 persen adalah nelayan tetap dan sisanya nelayan paruh waktu. Akibat dari kemiskinan ini masyarakat berusaha mencari nafkah dengan merusak, misalnya dengan menebang hutan mangrove atau menangkap ikan pakai bom dan sebagainya. Fakta lain adalah terjadinya penurunan penutupan terumbu karang 7 persen dalam 3 tahun terakhir. Bila berlanjut terus dalam kurun waktu 15 tahun terumbu karang di Aceh akan habis dan berdampak pada penurunan produktivitas ikan dan hasil tangkapan laut lainnya (Bisnis, 2010).

Persoalan kemiskinan tidak hanya berupa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dalam pembahasan kemiskinan sangat penting untuk mengetahui tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang terjadi, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga harus mampu mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pada rentang waktu Bulan Maret 2009 hingga bulan Maret 2010 kedua indeks mengalami penurunan dimana indeks kedalaman kemiskinan menjadi 4,11 persen dan indeks keparahan kemiskinan menjadi 1,26 persen. Penurunan kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Banyak pendapat pakar tentang kemiskinan di pesisir, Nelayan tetap mau tinggal dalam kemiskinan karena kehendaknya untuk menjalani kehidupan itu (*preference for a particular way of life*). Nelayan lebih senang memiliki kepuasan hidup yang bisa diperolehnya dari menangkap ikan dan bukan berlaku sebagai pelaku yang semata-mata beorientasi pada peningkatan pendapatan. Akses-akses masyarakat pesisir (nelayan) Aceh dalam melakukan usaha-usaha peningkatan taraf hidup memiliki keterbatasan. Ketidakpastian pendapatan dan kurangnya akses nelayan dalam memperoleh modal usaha memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah.

Nelayan sebagai produsen ikan dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu (1) golongan nelayan kecil, dengan modal kecil atau bahkan dengan hanya bermodalkan tenaga kerja saja; (2) golongan nelayan menengah, dengan peralatan-peralatan sederhana seperti perahu kecil dan jala; dan (3) golongan nelayan tertinggi, yang mempunyai peralatan-peralatan dan perlengkapan khusus yang cukup canggih dan seringkali mempunyai cara-cara atau usaha lain (Alkausar 2013). Dalam bukunya, Satria *dalam* Saryani (2010) menyebutkan bahwa secara sosiologis karakteristik masyarakat nelayan berbeda dengan karakteristik masyarakat petani dalam pengelolaan atau dalam memanfaatkan lahan untuk mencari nafkah. Nelayan menghadapi sumberdaya yang tidak terkontrol dimana pada saat hasil tangkapan berkurang, maka nelayan tersebut harus mencari lahan baru. Artinya adalah nelayan lebih dipengaruhi oleh kondisi alam dan produktivitas tempat mereka mencari nafkah.

Pada umumnya nelayan menggantungkan hidupnya dari pemanfaatan sumberdaya laut dan pantai yang membutuhkan investasi besar dan sangat bergantung musim. Sebagian besar dari nelayan bekerja sebagai nelayan kecil, buruh nelayan, pengolah ikan skala kecil dan pedagang kecil karena memiliki kemampuan investasi terbatas. Nelayan kecil hanya mampu memanfaatkan sumberdaya di daerah pesisir dengan hasil tangkapan yang cenderung terus menurun akibat persaingan dengan kapal besar dan penurunan mutu sumberdaya pantai. Hasil tangkapan juga mudah rusak sehingga melemahkan posisi tawar mereka dalam transaksi penjualan. Selain itu, pola hubungan eksploitatif antara pemilik modal dengan buruh dan nelayan, serta usaha nelayan yang bersifat musiman dan tidak menentu menyebabkan masyarakat miskin di kawasan pesisir cenderung sulit untuk keluar dari jerat kemiskinan dan belitan hutang pedagang atau pemilik kapal. Berbagai peraturan, qanun, dan regulasi lain yang mengatur lingkungan hidup termasuk pesisir belum berjalan sebagaimana mestinya karena lemahnya SDM yang mengelolanya.

Program dan strategi penanggulangan kemiskinan yang diterapkan oleh pemerintah masih berorientasi pada pertumbuhan makro, kebijakan yang terpusat, cara pandang tentang kemiskinan yang diorientasikan pada ekonomi, menempatkan nelayan miskin sebagai objek pembangunan, seperti pembebasan uang sekolah, pemberian kartu sehat, kartu miskin, dan bantuan yang bersifat habis pakai. Ironisnya, nelayan miskin hidup diantara kekayaan potensi sumberdaya perikanan, yang menunjukkan pengelolaan yang lambat,

keterbatasan modal, kurangnya penguasaan teknologi perikanan, rendahnya akses informasi dan akses pasar, pemanfaatan sumberdaya yang belum optimal, menyebabkan kehidupan nelayan rentan dengan kemiskinan.

3.2 Metode Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Pidie Jaya karena memiliki persentase penduduk miskin paling banyak di Aceh dengan wilayah pesisir yang didominasi nelayan miskin.

Tingkat pendapatan nelayan dilihat dari indikator pendapatan, yaitu :

$$Pd = TR - TC \text{ dan } Pd = Y_i \cdot Py_i - \sum X_i \cdot Px_i$$

Keterangan :

Pd = Pendapatan bersih (Rp)

TR = Total penerimaan (Rp)

TC = Total biaya produksi / penangkapan (Rp))

Y_i = Jumlah produksi/hasil nelayan (Kg)

Py_i = Harga rata-rata ikan (Rp/kg)

X_i = Total biaya per satuan upaya (Rp/trip)

Px_i = Jumlah upaya (trip/bulan)

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan di wilayah pesisir dianalisis dengan menggunakan metode regresi linier berganda, yang dinyatakan dengan persamaan berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 Um + \beta_2 Pk + \beta_3 Tg + \beta_4 D_1 + \beta_5 D_2 + \beta_6 D_3 + \beta_7 D_4 + \beta_8 D_5 + \beta_9 D_6 + \epsilon_i$$

Keterangan :

Y = pendapatan nelayan (Rp)

β_0 = intercept

Um = umur nelayan (tahun)

Pk = Pengalaman kerja (tahun)

Tg = jumlah tanggungan keluarga (orang)

D_1 = Pendidikan (nilai 1 = SD, 0 = selain SD)

D_2 = akses ke pasar (nilai 1 = dekat, 0 = jauh)

D_3 = memiliki mesin motor (nilai 1 = pakai mesin, 0 = tidak pakai mesin)

D_4 = sarana penangkapan ikan (nilai 1 = kapal motor, 0 = perahu)

D_5 = jarak wilayah penangkapan

D_6 = tenaga kerja

β_1 = Koefisien regresi

ε_i = error term.

3.3 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pendapatan Nelayan Aceh

Salah satu ukuran kemakmuran adalah pendapatan karena kemakmuran itu sendiri tercipta karena adanya kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Artinya semakin besar pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat pada suatu wilayah, maka semakin makmur pula daerah itu. Selanjutnya bila pada suatu wilayah telah terjadi suatu kemakmuran dengan adanya peningkatan pendapatan, maka dapat dikatakan pula pada wilayah itu telah terjadinya suatu pengembangan wilayah. Sebaliknya semakin kecil pendapatan yang diterima oleh suatu masyarakat pada suatu wilayah, maka semakin kecil pula kemakmurannya pada wilayah itu. Dengan kata lain pada wilayah itu belum terjadinya suatu pengembangan wilayah, karena masyarakatnya miskin.

Tingkat pendapatan bersih nelayan dapat diperoleh setelah hasil penjualan dikurangi dengan biaya produksi yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Menurut Subri (2005) bahwa biaya produksi dalam usaha nelayan terdiri atas dua kategori yaitu biaya berupa pengeluaran nyata dan biaya yang tidak merupakan pengeluaran nyata. Dalam hal ini pengeluaran nyata Ada yang kontan dan ada yang tidak kontan. Pengeluaran-pengeluaran kontan adalah : (1) bahan bakar dan oli, (2) bahan pengawet : es dan garam, (3) pengeluaran untuk makanan/konsumsi awak, (4) pengeluaran untuk reparasi, dan (5) pengeluaran untuk retribusi dan pajak. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak nyata adalah penyusutan dari perahu/kapal, mesin-mesin dan alat penangkap. Upah atau gaji awak nelayan pekerja yang umumnya bersifat bagi hasil dan dibayar sesudah hasil dijual.

Sistem bagi hasil adalah pola pembagian dari hasil penjualan tangkapan setelah melakukan kegiatan menangkap ikan di laut dalam satu kali melaut. Sistem bagi hasil ini dilakukan oleh para nelayan karena adanya ketidakpastian hasil dalam usaha penangkapan ikan. Sistem bagi hasil yang berlaku pada masyarakat nelayan di daerah penelitian sangat bergantung pada jenis alat tangkap dan sarana penangkapan ikan (perahu/kapal) dikarenakan oleh adanya perbedaan modal yang dikeluarkan, maka bagian

pemilik kapal akan lebih besar bila dibandingkan dengan sistem bagi hasil pada perahu besarnya resiko kerusakan sarana pada saat digunakan dalam kegiatan melaut.

Setelah proses penjualan hasil tangkapan selesai, hasil penjualan tidak langsung dibagi. Jumlah keseluruhan pendapatan atau uang penghasilan dalam sekali melaut mula-mula dipotong untuk biaya retribusi kepada petugas TPI (3%) dan biaya perbekalan atau biaya operasional melaut. Untuk sekarang ini, dengan adanya kenaikan harga BBM, biaya perbekalan pada jenis alat tangkap ini mencakup antara lain: biaya solar, oli, minyak tanah, dan es. Biaya perbekalan tersebut terlebih dahulu ditanggung oleh pemilik perahu (toke). Sedangkan makanan dan rokok sebagai bekal nelayan di laut ditanggung sendiri oleh nelayan. Setelah dipotong biaya perbekalan, selanjutnya dipotong 10% dari hasil penjualan ikan untuk toke selaku pemilik modal. Sisanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu bagian atau 40 persen untuk pemilik perahu (toke) dan sisanya 60 persen untuk nelayan buruh. Jika nelayan yang melaut ada 2 orang, maka bagian 60% dibagi menurut tugasnya masing-masing yaitu nelayan pawang perahu sebesar 40% dan nelayan buruh sebesar 20%. Jika perahu yang digunakan tanpa mesin, sistem bagi hasil sama dengan perahu mesin. Perahu tanpa mesin dengan wilayah penangkapan ikan 300 m hingga 1 km sehingga volume perolehan ikan lebih sedikit dan jenis ikan yang diperoleh biasanya ikan bilih, dencis dan tongkol. Rata-rata pendapatan nelayan yang menggunakan perahu mesin dan tanpa mesin adalah Rp. 50.000/hari hingga Rp. 100.000/hari.

Tabel 1. Pembagian Hasil Nelayan Buruh pada Usaha Penangkapan Ikan Di Aceh

No.	Spesialisasi Kerja	Jumlah Orang	Bagian
1.	Pawang	1	5,0 bagian
2.	Wakil pawang	1	4,0 bagian
3.	Tukang Lampu	2	3,0 bagian
4.	Masnage	1	2,5 bagian
5.	ABK	15	1,0 bagian

Sumber : Data Primer (Diolah), 2014.

Jika usaha penangkapan ikan menggunakan kapal dengan lama penangkapan 3 hari (3 x 24 jam), maka hasil penjualan ikan yang diperoleh nelayan dikurangi dengan biaya bahan bakar solar

100 lt seharga Rp. 6.500/lt sebesar Rp. 650.000. Makanan selama 3 hari untuk 20 orang sebesar Rp. 1.000.000, penggunaan es sebanyak 50 bak (1 bak @ Rp. 25.000/bak) sebesar Rp. 1.250.000. Biaya bahan bakar, makanan dan es ditanggung oleh toke sedangkan rokok ditanggung oleh nelayan. Setelah dikurangi biaya bahan bakar selanjutnya dipotong 10% dari hasil penjualan ikan untuk toke selaku pemilik modal, dan sisanya dibagi sebesar 40% untuk toke dan 60% untuk nelayan yang ikut melaut. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kapal yang digunakan diikuti sertakan oleh 20 orang hingga 25 orang dalam melaut, maka bagian 60% untuk nelayan dibagi kepada 20 orang nelayan yang ikut melaut. Pembagian hasil diantara nelayan tersebut dibagi berdasarkan tugasnya masing-masing di kapal saat melaut sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 1.

Penghasilan rata-rata ABK (Anak Buah Kapal) sebesar Rp. 50.000/hari hingga Rp. 100.000/hari dan hanya melaut selama 5 hari dalam seminggu. Jika tidak ada keuntungan melaut atau perolehan hasil penjualan ikan hanya mampu menutupi biaya operasional maka nelayan yang ikut melaut tidak memiliki pendapatan, dan jika perolehan hasil penjualan ikan tidak mampu menutupi biaya operasional, maka kerugian ditanggung oleh toke. Di Kecamatan Pante Raja Kabuapten Pidie Jaya tidak ada kapal Langgar karena nelayan di daerah tersebut tidak mau menginap di laut atau tidak mau melaut lebih dari 1 x 12 jam. Tidak ada perbedaan sistem pembagian hasil antara nelayan di Kabupaten Aceh Utara dengan nelayan di Kabupaten Pidie Jaya.

Berdasarkan hasil analisis pendapatan diketahui bahwa pendapatan nelayan di daerah penelitian berkisar antara Rp. 50.000/hari hingga Rp. 100.000/hari dan nelayan hanya melaut 5 hari dalam seminggu. Jika pendapatan rata-rata nelayan dikonversi dalam seminggu adalah minimal Rp. 35.714,29/hari, hingga Rp. 71.428,57/hari. Jika diasumsikan anggota keluarga sebanyak 5 orang, maka pendapatan nelayan minimum Rp. 7.142,86 per kapita per hari dan maksimum Rp. 14.285,71 per kapita per hari atau Rp. 428.571,30 per kapita per bulan.

Jika pendapatan nelayan diukur dengan menggunakan ukuran garis kemiskinan Sajogjo, dimana perhitungan dilakukan dengan mengasumsikan anggota keluarga sebanyak 5 orang dan harga beras saat dilakukan penelitian berkisar antara Rp. 6.500 s/d Rp. 10.000 per kilogram. Adapun garis kemiskinan ini dihitung dengan menggunakan konsep kebutuhan fisik minimum (KFM), yaitu

KFM = kg beras/12 X Jak X HB. Dengan ketentuan KFM = kebutuhan fisik minimum, Jak = Jumlah anggota keluarga, dan HB = Harga beras saat dilakukan penelitian. Jadi berdasarkan formula tersebut, kebutuhan fisik minimum keluarga nelayan dapat dihitung sebagai berikut :

- Miskin : $320/12 \times 5 \times 6.500 = \text{Rp. } 866.666,67$
- Miskin sekali : $240/12 \times 5 \times 6.500 = \text{Rp. } 650.000$
- Paling Miskin : $180/12 \times 5 \times 6.500 = \text{Rp. } 487.500$

Jadi berdasarkan perhitungan di atas, nelayan tradisional dikategorikan sebagai kelompok nelayan paling miskin, karena pendapatan tertinggi nelayan berada di bawah Rp. 487.500. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Mubyarto (1984) dalam penelitiannya bahwa pada umumnya nelayan merupakan kelompok paling miskin.

Secara umum, kemiskinan dipahami oleh masyarakat nelayan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan akan sandang, pangan dan papan serta keterbatasan dalam menjangkau pelayanan pendidikan. Kemiskinan nelayan dapat dicirikan secara fisik dan sosial. Secara fisik kemiskinan nelayan dicirikan oleh kondisi rumah tempat tinggal nelayan yang sangat sederhana, yaitu berupa rumah-rumah semi permanen atau rumah-rumah yang terbuat dari dinding anyaman bambu. Meskipun nelayan Aceh pasca bencana gempa dan tsunami telah mendapat bantuan rumah tempat tinggal permanen, namun ciri khas kemiskinan masih melekat dalam kehidupan rumah tangga nelayan, seperti kurangnya pemilikan perabotan rumahtangga serta tidak memiliki barang-barang berharga yang dapat menunjukkan status sosial yang tinggi seperti perhiasan emas, perabotan rumahtangga yang mewah, alat transportasi, dan lain-lain. Secara sosial, kemiskinan nelayan dicirikan oleh tingkat pendidikan anggota rumah tangga yang masih rendah. Sebagian besar nelayan di Aceh hanya mampu menempuh pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar (SD), bahkan ada pula sebagian nelayan yang sama sekali tidak pernah mengenyam bangku pendidikan karena keterbatasan biaya dan sejak kecil sudah diikuti sertakan dalam kegiatan melaut.

Peran para istri nelayan dalam membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga juga patut diperhitungkan meskipun dalam kodratnya bertanggung jawab pada berbagai urusan rumah tangga dan gerak para istri nelayan dibatasi dalam lingkup rumah tangga. Mereka hadir dengan peran produktif tanpa meninggalkan peran reproduktif dengan modal sosial mereka menopang ekonomi

keluarga) namun rasanya masih perlu adanya pemberdayaan dari pemerintah untuk lebih jeli melihat kontribusi dari peran wanita ini.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan di wilayah pesisir

Berdasarkan analisa kualitatif dapat diidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi pendapatan nelayan di Aceh, yaitu :

- **Fluktuasi Musim Tangkapan**

Fluktuasi musim tangkapan ini dapat menyebabkan ketidakpastian pendapatan nelayan. Apabila sedang musim ikan, maka penghasilan nelayan pun cukup baik. Namun pada saat musim ikanpun mulai berkurang maka sering kali para nelayan mendapatkan hasil tangkapan yang pas-pasan atau bahkan tidak ada perolehan ikan sama sekali.

- **Sumberdaya Manusia (SDM) Nelayan**

SDM Nelayan sangat menentukan kinerja nelayan dalam usahanya memenuhi kebutuhan rumah tangga nelayan. Umumnya nelayan berpendidikan setaraf SD (Sekolah Dasar). Hal ini membuktikan ketidakmampuan nelayan dalam membiayai pendidikan anak-anaknya telah terjadi dalam waktu yang telah cukup lama. Kondisi sast ini juga memperlihatkan bahwa nelayan telah mengikut sertakan anak-anaknya untuk melaut yang didorong oleh keterbatasan ekonomi rumah tangga. Rendahnya tingkat pendidikan ini sangat berpengaruh terhadap ketrampilan, pola pikir, dan sikap mental nelayan. Dalam bekerja nelayan lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik atau tenaga, sehingga dapat dipastikan bahwa nelayan tidak mempunyai kesempatan yang cukup untuk mencari lapangan pekerjaan lain di luar sektor perikanan. Untuk itu, program pemerintah meluncurkan dana BOS dan pendidikan gratis hingga usia 9 tahun adalah langkah tepat guna mengantisipasi rendahnya kualitas sumber daya manusia nelayan di masa yang akan datang.

- **Eksplotasi Pemodal (Toke)**

Ekploitasi para pemodal (*toke*) yaitu berupa hubunganpatron-klien yang sangat merugikan nelayan kecil dan buruh nelayan. Keterbatasan modal menyebabkan nelayan harus melaut dengan menggunakan perahu milik toke dengan sistem pinjaman. Dengan ketentuan, nelayan harus menjual ikan, membayar fee 10% dari hasil tangkapan dan membagi hasil tangkapan dengan

toke sebagai pemilik modal/perahu. Jika nelayan berhenti melaut dan perahu dijual maka nelayan harus menggantikan biaya perahu ke toke sebesar pinjaman awal meskipun perahu tersebut telah digunakan selama beberapa tahun (susut). Jika biaya penjualan perahu tidak mencukupi maka nelayan dapat membayar sisa pembayaran perahu dengan cara dicicil. Sistem ini jelas sangat merugikan nelayan.

- **Ketimpangan dalam Sistem Bagi Hasil**

Sistem bagi hasil dilakukan oleh para nelayan dengan alasan karena hasil tangkapan yang tidak menentu. Sistem bagi hasil yang berlaku ini dianggap hanya menguntungkan pihak toke saja karena besarnya pembagian hasil yang sangat timpang. Ketidakpuasan nelayan terhadap sistem bagi hasil terjadi jika saat melaut tidak memperoleh penghasilan atau penjualan ikan hanya mampu memenuhi biaya operasional saja, pada situasi seperti itu, nelayan tidak mendapatkan suatu kompensasi dalam bentuk apapun dari toke pemilik kapal/perahu.

- **Motorisasi**

Motorisasi perahu-perahu nelayan dalam pelaksanaannya memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan adanya penggunaan mesin, perjalanan perahu nelayan untuk menangkap ikan dapat dilakukan dengan lebih cepat, penghematan tenaga pendayung dan kegiatan tidak tergantung pada arah angin, yang berarti waktu dan tenaga dapat dihemat. Selain itu juga, kegiatan menangkap ikan dapat dilakukan dengan lebih intensif. Namun, dalam perkembangannya motorisasi peralatan tangkap ini telah menyebabkan tersisihnya kelembagaan ekonomi (TPI) karena para nelayan harus menjual hasil tangkapannya kepada para *bakul* yang menjadi langganannya bukan melalui lelang bebas di TPI seperti sebelum diberlakukannya motorisasi. Selain itu, motorisasi peralatan tangkap erat kaitannya dengan penggunaan bahan bakar. Setelah adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) masyarakat nelayan sangat merasa terbebani karena harus mengeluarkan biaya operasional yang lebih besar. Kenaikan harga BBM tersebut tidak dibarengi dengan kenaikan harga hasil produksi nelayan.

- **Kebiasaan Nelayan**

Nelayan seringkali meminjam sejumlah uang kepada toke pada saat hasil tangkapan sedang tidak baik atau pada saat musim paceklik, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Peminjaman kepada toke dilakukan karena lebih mudah, cepat dan tidak

menggunakan anggunan seperti proses peminjaman melalui Bank. Peminjaman dilakukan atas dasar kepercayaan, dengan perjanjian bahwa nelayan akan mencicil pinjamannya saat memperoleh tangkapan ikan di laut. Kebiasaan ini menyebabkan para nelayan terjerat hutang dan semakin sulit untuk keluar dari kemiskinan.

Tabel 2. Hasil Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan

Variabel	Coefisients	Std. Error	T	Sig.	VIF
(Constant)	50746.579	6193.751	8.193	.000	
Umur Nelayan	52.530	321.668	.163	.870	14.069
Pengalaman Kerja	-272.608	316.061	-.863	.390	14.704
Tanggungans Klga	412.137	656.166	.628	.531	1.799
Pendidikan	101.525	476.692	.213	.832	1.456
Akses Thd Pasar	-199.367	2018.846	-.099	.921	1.284
Memiliki mesin	-14644.731	8834.294	-1.658	.099	19.671
Sarana Pengkapan	12724.067	3878.101	3.281	.001	4.975
Jarak tangkapan	5147.573	1005.662	5.119	.000	76.654
Tenaga Kerja	-2562.065	662.692	-3.866	.000	46.492

Untuk mengetahui faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi pendapatan nelayan dilakukan analisis dengan metode regresi linier berganda, dan diperoleh hasil sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2, maka persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + 52.530U_m - 272.608P_k + 412.137T_g + 101.525D_1 - 199.367D_2 - 14644.731D_3 + 12724.067D_4 + 5147.573D_5 - 2562.065D_6$$

Secara parsial atau berdasarkan hasil uji t, diketahui bahwa variabel-variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan nelayan adalah akses ke pasar, memiliki mesin motor, sarana penangkapan dan jarak penangkapan ikan. Sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan nelayan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Umur nelayan tidak berpengaruh nyata terhadap pendapatan nelayan karena berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata nelayan sejak kecil telah dilibatkan membantu dalam

kegiatan nelayan dan semenjak remaja sudah ikut menangkap ikan di laut.

- Pengalaman kerja tidak berpengaruh nyata terhadap pendapatan nelayan karena meskipun nelayan cukup berpengalaman dalam menangkap ikan namun persaingan yang tinggi dengan kapal besar dan adanya keterbatasan sarana nelayan membuat wilayah penangkapan ikan menjadi terbatas sehingga perolehan ikan menjadi lebih sedikit.
- Jumlah tanggungan keluarga tidak mempengaruhi pendapatan nelayan karena sejak kecil anak-anak nelayan sudah dilibatkan dalam kegiatan nelayan, beternak, dan berdagang, sehingga anak-anak nelayan tidak menjadi beban bagi orang tuanya.
- Pendidikan juga tidak berpengaruh nyata terhadap pendapatan nelayan karena pengetahuan tentang pekerjaan nelayan diperoleh secara turun temurun dari orang tua mereka yang berprofesi sebagai nelayan sehingga tidak ditentukan oleh tingginya tingkat pendidikan formal.
- Akses ke pasar tidak berpengaruh nyata terhadap pendapatan nelayan karena umumnya pemasaran ikan dilakukan oleh touke di lokasi PPI sehingga dapat menghemat biaya transportasi dan perolehan pendapatan nelayan menjadi lebih besar.
- Koefisien regresi untuk variabel memiliki mesin motor / kapal adalah $b_3 = -14644.731$ pada taraf nyata 10%, Hal ini menunjukkan bahwa nelayan yang memiliki perahu mesin motor/kapal memang dapat menjangkau wilayah penangkapan ikan yang dalam sehingga memperoleh ikan yang lebih besar dan lebih banyak namun disisi lain mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk pengadaan bahan bakar minyak (BBM) sehingga mempengaruhi besarnya pendapatan nelayan.
- Sarana penangkapan ikan berpengaruh nyata terhadap pendapatan nelayan dengan koefisien regresi sebesar $b_4 = 12724.067$ pada taraf nyata 1%. Hal ini disebabkan karena nelayan yang menggunakan perahu tanpa mesin biasanya hanya mampu menjangkau jarak 0,5 - 1 mil dan nelayan yang menggunakan perahu mesin mampu menempuh jarak penangkapan ikan $\pm 5 - 10$ mil. Sedangkan nelayan yang menggunakan kapal memiliki jarak tempuh yang lebih jauh dibandingkan nelayan yang menggunakan perahu motor yaitu ± 20 mil. Jarak tempuh mempengaruhi jumlah dan jenis ikan yang diperoleh nelayan dan akan menentukan besarnya pendapatan nelayan.

- Jarak wilayah penangkapan ikan berpengaruh nyata terhadap pendapatan nelayan dengan koefisien regresi sebesar $b_5 = 5147.573$ pada taraf nyata 1%. Hal ini karena jarak penangkapan ikan yang jauh biasanya diperoleh ikan besar-besar dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan jarak penangkapan ikan yang lebih dekat. Apalagi daerah pesisir pantai biasanya sudah *over fishing* sehingga ikan yang diperoleh jumlahnya relatif sedikit.
- Tenaga kerja berpengaruh nyata terhadap pendapatan nelayan dengan koefisien regresi sebesar $b_6 = - 2562.065$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar penggunaan tenaga kerja maka akan semakin sedikit perolehan pendapatan bagi nelayan.

Berdasarkan hasil uji determinasi diperoleh nilai R^2 (*R-Squared*) sebesar 0,764. Artinya 76,4% variasi pendapatan nelayan dapat dijelaskan oleh perubahan variabel umur nelayan, pengalaman kerja, jumlah tanggungan keluarga, pendidikan, akses ke pasar, memiliki atau tidak mesin motor/kapal, sarana penangkapan ikan, jarak wilayah penangkapan, dan tenaga kerja. Sedangkan 23.6% lagi dijelaskan oleh perubahan variabel lain di luar model.

3.4 Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

- Hasil analisis pendapatan diketahui bahwa pendapatan nelayan di daerah penelitian minimal sebesar Rp. 50.000 per hari hingga Rp. 100.000 per hari dan nelayan hanya melaut 5 hari dalam seminggu. Jika pendapatan rata-rata nelayan dikonversi dalam seminggu adalah minimal Rp. 35.714,29 per hari, hingga Rp. 71.428,57 per hari. Jika diasumsikan anggota keluarga sebanyak 5 orang, maka pendapatan nelayan minimum Rp. 7.142,86 per kapita per hari dan maksimum Rp. 14.285,71 per kapita per hari atau Rp. 428.571,30 per kapita per bulan. Dengan menggunakan ukuran garis kemiskinan Sajogyo (1991), nelayan di daerah penelitian dikategorikan sebagai kelompok nelayan paling miskin, karena pendapatan tertinggi nelayan berada di bawah Rp. 487.500.
- Ketidakpastian perolehan pendapatan nelayan yang mendorong nelayan pada jurang kemiskinan disebabkan oleh fluktuasi musim tangkapan, rendahnya sumberdaya manusia (SDM) nelayan, adanya eksploitasi modal, ketimpangan dalam sistem

bagi hasil, motorisasi yang mengharuskan penggunaan BBM non subsidi, dan kebiasaan nelayan dalam mengatasi kesulitan ekonomi.

Saran

- Pengembangan infrastruktur, penyediaan sarana dan prasarana perikanan dan bantuan pendanaan mutlak dibutuhkan nelayan saat ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap toulke dan meningkatkan pendapatan nelayan. Dalam hal ini, peran dunia usaha dalam usaha-usaha perikanan perlu diwujudkan mengingat belum adanya regulasi yang mengatur peran dunia usaha dalam pendanaan pembangunan Aceh.
- Mengingat rendahnya pendidikan dan keterbatasan nelayan dalam dunia usaha maka perlu ditingkatkan pendidikan dan pelatihan agar nelayan dapat melakukan usaha-usaha sampingan yang bernilai ekonomis guna mengantisipasi minimnya pendapatan melaut saat musim-musim tertentu yang menyebabkan rendahnya penangkapan ikan.

Daftar Pustaka

- Alkausar M. 2011. Keterancaman Ritual *Mappandesasi* Dalam Masyarakat Nelayan Etnik Mandar Kelurahan Bungkutoko Sulawesi Tenggara. [tesis]. [Internet]. [Diunduh 8 Oktober 2013]. Denpasar [ID]: Universitas Udayana. 187 hal. Dapat diunduh dari: http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-349-1033464347pdf%20tesis.pdf.
- Badan Pusat Statistik. 2008. Statistik Indonesia 2008. Badan Pusat Statistik Aceh. Banda Aceh
- Bisnis, 2010. Kemiskinan di Wilayah Terujung Indonesia. 23 November 2010.
- Riyono, 2011. Akar Kemiskinan Nelayan Indonesia. Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia. Jum'at 01 April 2011.
- Sajogio. 1991. Bunga Rampai Perekonomian Desa. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Saryani Y. 2010. *Langgan* bagi nelayan Muara-Binuangeun (studi kearifan lokal masyarakat nelayan Muara-Binuangeun, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten). [skripsi]. Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor. 161 hal.



BAB 4

ANALISIS KEUNTUNGAN DAN RENTABILITAS USAHA IKAN OLAHAN DI KOTA LHOEKSEUMAWE

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besaran keuntungan dan tingkat rentabilitas yang diterima pengrajin dari usaha ikan olahan di Kota Lhokseumawe. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan teknik cacah lengkap. Untuk menganalisis layak tidaknya usaha ikan olahan digunakan analisis return cost ratio dan rentabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai hasil produksi ikan teri kering yang diterima pengrajin adalah Rp. 118.680.000,00 per bulan, biaya produksi yang dikeluarkan pengrajin untuk pembuatan ikan teri kering melalui proses perebusan sebesar Rp. 95.583.208,33 dan tanpa proses perebusan sebesar Rp. 92.635.930,83, perolehan keuntungan pengrajin melalui proses perebusan sebesar Rp. 23.096.791,67 dan tanpa proses perebusan sebesar Rp. 26.044.069,17 maka perolehan nilai return cost ratio untuk pembuatan ikan teri kering tanpa proses perebusan sebesar 1,24 dan tanpa proses perebusan 1,28. Rata-rata nilai hasil produksi ikan kayu yang diterima pengrajin adalah Rp. 50.400.000,00 per bulan dan biaya produksi yang dikeluarkan sebesar Rp. 42.554.504,17, keuntungan sebesar Rp. 7.845.495,83 maka perolehan nilai return cost ratio sebesar 1,18. Hal ini menunjukkan bahwa usaha ikan teri kering dan ikan kayu di daerah penelitian cukup menguntungkan untuk dijalankan. Rentabilitas ikan teri kering melalui proses perebusan dan tanpa perebusan sebesar 24,16% dan 28,11%, dan rentabilitas ikan kayu sebesar 18,44%. Persentase rentabilitas yang diperoleh lebih besar dibanding persentase bunga modal yang berlaku yaitu 15% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa usaha ikan olahan cukup menguntungkan dan layak untuk diusahakan. Namun demikian, perolehan rentabilitas ikan kayu lebih kecil dibanding rentabilitas ikan teri kering. Ini berarti bahwa usaha ikan teri kering lebih menguntungkan dibanding ikan kayu.

Kata kunci: ikan olahan, keuntungan, rentabilitas.

4.1 Pendahuluan

Pemerataan sumber daya ikan hendaknya terwujud dalam perlindungan terhadap kegiatan usaha yang masih lemah seperti petani, nelayan dan petani kecil agar tidak terdesak oleh kegiatan usaha yang lebih kuat. Oleh karena itu dalam rangka pengembangan usaha perlu didorong ke arah kerja sama dalam koperasi. Disamping itu diharapkan pula adanya kerja sama antara perusahaan perikanan yang kuat dengan nelayan/petani ikan kecil atas dasar saling menguntungkan. Salah satu strategi untuk meningkatkan keuntungan adalah memperluas pemasaran melalui pengembangan produk perikanan sebagai terobosan baru dalam menghadapi persaingan pemasaran ikan olahan, sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah melalui mutu, gaya, kemasan bentuk produk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan harga, yang pada gilirannya mendapatkan keuntungan untuk mengembangkan usaha.

Provinsi Nanggrou Aceh Darussalam memiliki sumber daya kelautan yang potensial. Keadaan ini disamping didukung oleh daerah lautnya yang luas dan kaya, juga memiliki letak kelautan yang strategis. Berbagai keunggulan yang komperatif harus dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, disamping itu potensi ini juga dapat memberikan lapangan kerja dan kehidupan yang layak bagi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai.

Sebagian besar masyarakat Aceh yang tinggal di daerah pesisir bermata pencaharian sebagai nelayan, mereka telah menekuni pekerjaan tersebut secara turun temurun hingga kini. Namun masih ada nelayan melaut dengan menggunakan alat sederhana, umumnya penangkapan ikan masih secara tradisional. Oleh karena itu penghasilan yang mereka peroleh masih sangat terbatas, dan kadang-kadang tidak mencukupi bahkan ada yang harus berhutang dahulu sebelum melakukan aktifitasnya. Penangkapan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir dengan menggunakan perahu boat dan pancing tonda serta jaring insang hanyut.

Bencana gempa dan gelombang tsunami yang melanda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 telah menghancurkan infrastruktur dan melumpuhkan perekonomian daerah. Sebagian besar korban adalah masyarakat pesisir. Mereka kehilangan sanak keluarga, tempat tinggal dan sarana lainnya. Dalam hal ini, pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Lhokseumawe telah menyusun perencanaan dan melakukan berbagai upaya rehabilitasi dan

rekonstruksi di semua bidang yang mengalami kerusakan, salah satunya adalah sektor perikanan. Dalam hal ini, pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat lokal dan asing telah melakukan berbagai upaya pemberdayaan sektor perikanan khususnya industri rumahtangga ikan olahan, diantaranya pemberian modal usaha dan pelatihan pengembangan usaha.

Desa pusong adalah desa yang merupakan tempat pendaratan ikan di Kota Lhokseumawe. Urutan hasil ikan yang didaratkan paling banyak selama tahun 2000 s/d 2004 berturut-turut adalah ikan teri, ikan tuna, ikan dancis, dan ikan tongkol. Oleh sebab itu, jenis ikan olahan yang paling banyak diusahakan oleh pengolah adalah ikan teri kering, sedangkan ikan teri basah (rebus) dilakukan apabila musim hujan dan tidak memiliki panas yang cukup untuk penjemuran ikan. Ikan kayu dihasilkan dari ikan tongkol yang dikeringkan dan persentase olahan relatif lebih sedikit dibanding ikan teri kering. Khusus untuk ikan asin merupakan ikan olahan yang dibumbui garam, umumnya dari ikan belanak. Sebagian besar ikan olahan tersebut dipasarkan ke Medan, dan selebihnya dijual di pasar tradisional Kota Lhokseumawe.

Pada mulanya masyarakat membuat ikan olahan untuk konsumsi sendiri dalam jumlah kecil bila harga ikan murah, dengan tujuan sebagai persediaan apabila membutuhkan ikan sewaktu-waktu pada saat harga ikan mahal. Dengan adanya permintaan dari masyarakat, maka para nelayan Pusong memproduksi ikan olahan sebagai usaha industri rumah tangga untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Masyarakat Pusong merupakan nelayan perikanan rakyat yang memiliki permodalan yang sedikit untuk membuat usaha ikan olahan. Beberapa alasan masyarakat Pusong membuat ikan olahan ini adalah :

- Adanya permintaan dari masyarakat terhadap ikan olahan tersebut.
- Banyaknya ikan yang didaratkan sehingga tidak habis terjual.
- Tidak semua daerah dapat menghasilkan makanan sejenis karena tergantung pada alam yang sesuai dengan bahan makanan tersebut.
- Besarnya sumber daya hayati laut yang tak akan habis bila penangkapannya dilakukan tidak pada satu jenis ikan saja.
- Sosial budaya masyarakat Aceh yang sebagian besar mengkonsumsi ikan dalam jumlah besar dibandingkan dengan sayuran.

Dampak peningkatan usaha agroindustri ikan olahan terhadap masyarakat cukup banyak antara lain dapat menambah pendapatan keluarga, membuka lapangan usaha baru atau memberi lapangan pekerjaan kepada mereka yang belum memiliki pekerjaan. Usaha agroindustri ikan olahan merupakan usaha sampingan yang tergolong dalam industri rumah tangga yang akhirnya akan menghasilkan pendapatan untuk menambah penghasilan rumah tangga. Walaupun hanya industri rumah tangga yang mengandalkan keterampilan tangan dan alat-alat produksi yang sederhana, usaha ini dapat diteruskan dengan baik sehingga para pekerja dapat meningkatkan produksinya. Dengan bertambahnya jumlah produksi, maka secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap pendapatan atau keuntungan yang diterima dari usaha tersebut.

Dalam pengolahannya, ikan olahan membutuhkan biaya dan tenaga kerja. Biaya yang dikeluarkan meliputi biaya produksi, biaya upah tenaga kerja, biaya penyusutan bangunan, alat dan mesin serta biaya umum lainnya. Biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha akan mempengaruhi pendapatan atau keuntungan yang diterima oleh pengusaha tersebut. Setiap industri dalam menjalankan usahanya selalu ingin memperoleh pendapatan atau keuntungan yang besar, dimana pendapatan tersebut merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup suatu usaha atau aktivitas suatu perusahaan.

Besarnya nilai produksi tergantung pada besarnya modal, teknik pengelolaan dan harga jual. Meskipun modal besar tetapi harga jualnya rendah dan pengelolaannya tidak baik maka nilai produksi juga rendah. Jika modal kecil akan tetapi pengelolaannya baik dan harga jualnya tinggi nilai produksi relatif tinggi. Makin besar nilai produksi yang dihasilkan dari usaha tersebut, makin besar pula keuntungan yang diperoleh pengusahanya. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, perlu dikaji sejauh mana usaha ikan olahan dapat memberikan keuntungan dan rentabilitas bagi pengrajin di Kota Lhokseumawe.

4.2 Metodologi

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Lhokseumawe tepatnya di Desa Pusong. Penentuan lokasi ini dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan sentral produksi ikan olahan di Kota Lhokseumawe. Objek penelitian adalah pengolah ikan di Kota Lhokseumawe.

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada masalah keuntungan dan tingkat rentabilitas yang diterima pengolah ikan dengan menggunakan analisis ekonomi. Analisis ikan olahan hanya dilakukan pada ikan teri kering dan ikan kayu, mengingat kedua jenis ikan olahan ini relatif lebih banyak diusahakan dibanding ikan olahan lainnya. Penelitian sengaja dibatasi dengan pertimbangan keterbatasan biaya dan waktu.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan teknik cacah lengkap pada suatu usaha yang bergerak dalam suatu produksi ikan olahan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat nelayan yang mengusahakan ikan olahan di lokasi penelitian. Mengingat besarnya jumlah populasi pengolah di Desa Pusong Baru, maka jumlah sampel yang diambil hanya 10% dari jumlah populasi, yaitu 14 pengrajin. Sedangkan di Desa Pusong Lama, jumlah populasi pengolah relatif sedikit, maka semua populasi dijadikan sampel.

Model dan Metode Analisis

Model analisis yang digunakan untuk mengetahui untung atau tidaknya usaha ikan olahan, digunakan model analisis dengan menghitung besarnya formula ratio penerimaan biaya (R/C).

$$R/C = \frac{\text{Total penerimaan}}{\text{Total biaya}} \text{ (Soekartawi, 1995)}$$

Dengan kriteria keputusan sebagai berikut :

- Bila R/C lebih besar dari 1 ($R/C > 1$) = menguntungkan, layak diusahakan.
- Bila R/C sama dengan 1 ($R/C = 1$) = Balik modal (*Break Event Point*).
- Bila R/C lebih kecil dari 1 ($R/C < 1$) = belum menguntungkan, tidak layak diusahakan.

Sedangkan untuk melihat tingkat rentabilitas yang diperoleh, maka digunakan analisis dengan formula sebagai berikut :

$$R = \frac{L}{M} \times 100\% \text{ (Riyanto, 1992)}$$

Keterangan :

R = Tingkat rentabilitas yang dicapai (%)

L = Keuntungan yang diperoleh dalam satu bulan produksi (Rp)

M = Modal yang digunakan dalam satu bulan produksi (Rp).

Oleh karena perhitungan rentabilitas digunakan untuk mengukur besarnya penggunaan modal yang dikeluarkan pengusaha dimana akan diperoleh keuntungan yang dinyatakan dalam persentase, maka formula di atas akan diturunkan dengan kaedah keputusan sebagai berikut :

- Jika rentabilitas > dari bunga modal yang berlaku, maka usaha ikan kayu dapat dijalankan.
- Jika rentabilitas < dari bunga modal yang berlaku, maka usaha ikan kayu tidak dapat dijalankan.

4.3 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Gambaran Umum Usaha Ikan Olahan

Usaha ikan olahan merupakan usaha rumah tangga yang termasuk ke dalam agroindustri. Pengembangan agroindustri diprioritaskan pada komoditas yang mempunyai prospek pasar yang cerah, dengan memperhatikan dukungan berbagai macam bahan-bahan hasil pertanian yang potensial. Selain itu adanya sumberdaya manusia yang berpotensi dan teknologi yang mudah serta sederhana, sehingga dapat dikerjakan oleh manusia. Pengadaan modal usaha diperoleh dari modal sendiri dan pinjaman dari pihak lain dengan dasar kepercayaan antar kedua belah pihak dalam mengadakan hutang piutang.

Bahan baku ikan ikan teri kering adalah ikan teri segar. Sedangkan bahan baku ikan kayu adalah ikan tongkol. Kedua ikan ini diperoleh dari tempat pendaratan ikan di Desa Pusong, yang merupakan satu-satunya tempat pendaratan ikan di pusat Kota Lhokseumawe. Oleh sebab itu, Desa Pusong sangat berpotensi untuk pengembangan ikan olahan.

Pengolahan ikan tongkol menjadi ikan kayu dilakukan pada saat hasil tangkapan ikan tongkol relatif banyak dengan harga jual rata-rata Rp. 5.000/kg. Demikian juga dengan ikan teri segar, dengan harga jual rata-rata Rp. 8.000/kg. Selebihnya, pengajin akan memanfaatkan ikan tangkapan lainnya untuk pengeringan. Namun demikian, pengolahan ikan kayu dan ikan teri kering relatif lebih banyak dilakukan dibandingkan pengeringan ikan lainnya.

Karakteristik Pengrajin Ikan Olahan

Karakteristik pengrajin ikan olahan adalah keadaan atau gambaran tentang pengrajin yang dapat mempengaruhi kemampuan kerja serta keterampilan pengrajin ikan olahan tersebut dalam mengelola usaha dan meningkatkan keuntungan. Karakteristik

pengrajin meliputi umur, pendidikan, pengalaman berusaha dan jumlah tanggungan keluarga.

Kemampuan kerja pengrajin dipengaruhi oleh umur. Seiring dengan peningkatan umur pengrajin maka kemampuan kerja diduga semakin menurun. Pernyataan ini didukung oleh Soekartawi (1993) yang menyatakan bahwa umur produktif secara ekonomi adalah 15 - 45 tahun, diluar batasan tersebut kemampuan kerja seseorang itu tidak baik. Umur rata-rata pengrajin adalah 30,25 tahun, tergolong produktif dan masih memungkinkan untuk melakukan perubahan-perubahan dalam usahanya yang dapat meningkatkan pendapatan.

Pendidikan merupakan dasar pijakan untuk mengembangkan kemampuan dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada guna memicu peningkatan kreatifitas. Rata-rata pendidikan responden adalah 9,17 tahun setara dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP). Rendahnya pendidikan berpengaruh terhadap kinerja usaha khususnya kemampuan dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan pemamfaatan sumberdaya produktif secara efisien

Pengrajin ikan olahan rata-rata telah berpengalaman selama 14,20 tahun. Diperkirakan telah memahami usaha ikan olahan dan memiliki wilayah pemasaran tersendiri dalam upaya peningkatan pendapatannya. Mengingat bahan baku adalah ikan tangkapan segar, maka diduga pengrajin telah menguasai kegiatan produksi ikan olahan dengan memanfaatkan jenis ikan-ikan tertentu yang diperoleh dalam jumlah lebih banyak. Kegiatan produksi tersebut dilakukan guna menutupi perolehan pendapatan yang lebih kecil pada ikan kayu dan ikan teri kering saat hasil tangkapan ikan teri segar dan ikan tongkol menurun.

Jumlah tanggungan keluarga sangat menentukan besarnya pengeluaran dalam rumah tangga. Semakin banyak jumlah tanggungan keluarga maka semakin besar pengeluaran rumah tangga. Namun demikian, besarnya jumlah tanggungan keluarga dalam usia produktif justru akan sangat membantu dalam peningkatan produksi ikan olahan. Rata-rata jumlah tanggungan keluarga pengrajin di daerah penelitian adalah 4,30 jiwa atau setara dengan 4 jiwa. Jumlah ini tergolong besar jika tidak diiringi dengan peningkatan produksi ikan olahan dan perolehan pendapatan yang lebih besar baik pada usaha ikan olahan maupun dibidang lainnya maka dapat dipastikan pendapatan yang diperoleh pengrajin tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Penggunaan Bahan dan Alat

Ketersediaan bahan dan peralatan yang cukup, dan memadai akan memperlancar proses produksi. Bahan baku yang digunakan pada pengolahan ikan teri kering adalah ikan teri segar, garam, air, minyak tanah, dan tawas. Sedangkan bahan baku yang digunakan dalam pengolahan ikan kayu adalah ikan tongkol, garam, air, minyak tanah dan tawas. Bahan baku ini relatif mudah diperoleh mengingat daerah penelitian terletak di kawasan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) dan pusat pasar Kota Lhokseumawe. Berikut diperlihatkan rata-rata penggunaan bahan untuk pengolahan ikan teri kering dan ikan kayu.

Dalam satu bulan produksi, pengrajin ikan teri kering membutuhkan rata-rata ikan teri segar sebanyak 9.000 kg, garam sebanyak 5.400 kg, minyak tanah sebanyak 900 liter dan tawas sebanyak 6 ons. Biaya bahan yang paling besar adalah biaya bahan baku dibanding bahan penunjang lainnya. Hal ini disebabkan ikan teri segar merupakan bahan baku utama dalam pembuatan ikan teri kering. Biaya yang paling sedikit dikeluarkan dalam pengolahan ikan teri kering adalah untuk membeli tawas dan relatif paling sedikit digunakan dibanding bahan lainnya. Sedangkan untuk pengolahan ikan teri segar sebanyak 9.000 kg tanpa melalui proses perebusan hanya membutuhkan garam sebanyak 4.700 kg, sehingga biaya bahan baku yang dibutuhkan hanya Rp. 76. 700.000,00.

Untuk pembuatan ikan kayu, dalam satu bulan produksi membutuhkan ikan tongkol sebanyak 6.000 kg, garam sebanyak 1.800 kg, minyak tanah sebanyak 600 liter dan tepung kapur sebanyak 150 kg. Biaya bahan yang paling banyak dibutuhkan adalah biaya untuk membeli ikan tongkol sebagai bahan baku utama ikan kayu. Sedangkan biaya penunjang relatif lebih sedikit dibutuhkan. Biaya untuk membeli tepung kapur relatif lebih sedikit, mengingat bahwa tepung kapur digunakan hanya untuk mencegah adanya ulat dan membersihkan ikan dari kotoran yang masih melekat selama proses perebusan.

Peralatan yang digunakan dalam pengolahan ikan teri kering adalah drum, lantai jemur, keranjang, panci besar, sendok kayu ukuran besar, sendok kayu ukuran kecil, baskom, timba, tenda, dan sorok. Sedangkan peralatan yang digunakan pada pembuatan ikan kayu adalah drum, pisau, lantai jemur, keranjang, panci besar, sendok kayu ukuran besar, sendok kayu ukuran kecil, timba, tenda, dan sorok. Berikut diperlihatkan secara berturut-turut rincian penggunaan peralatan pada produksi ikan teri kering dan ikan kayu di daerah penelitian.

Rata-rata biaya peralatan yang digunakan untuk memproduksi ikan teri kering melalui proses perebusan dan tanpa perebusan adalah Rp. 2.246.000,00. Penggunaan peralatan relatif sama. Biaya yang paling besar digunakan untuk membeli lantai jemur yaitu Rp. 1.400.000,00 dan biaya yang paling kecil adalah untuk membeli timba yaitu Rp. 16.000,00. Lantai jemur merupakan aset penting sebagai tempat pengeringan ikan. Besarnya penggunaan peralatan disesuaikan dengan banyaknya bahan baku ikan teri segar.

Dalam memproduksi ikan kayu, rata-rata biaya peralatan yang digunakan sebesar Rp. 2.066.000,00. Sebagaimana halnya biaya peralatan yang dibutuhkan untuk memproduksi ikan teri kering, penggunaan biaya peralatan yang paling besar pada pembuatan ikan kayu adalah untuk membeli lantai jemur sebesar Rp. 1.400.000,00 dan biaya peralatan yang paling kecil adalah untuk membeli timba yaitu Rp. 16.000,00. Namun demikian, biaya peralatan yang digunakan untuk memproduksi ikan teri kering (Rp. 2.246.000,00) lebih besar dibandingkan biaya peralatan untuk memproduksi ikan kayu (Rp. 2.066.000,00). Hal ini menunjukkan tingginya permintaan konsumen akan ikan teri kering sehingga produksi ikan teri kering per bulannya lebih besar dibanding ikan kayu.

Penggunaan Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat mempengaruhi dalam usaha memproduksi ikan olahan. Kebutuhan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan sejumlah produk masyarakat dalam satu satuan waktu tertentu. Tenaga kerja yang digunakan dalam kegiatan produksi ikan olahan berasal dari dalam dan luar keluarga, yang dihitung dalam satu bulan produksi dan dikonversikan ke dalam Hari Kerja Pria (HKP). Rata-rata waktu kerja sehari diasumsikan sebesar 7 jam, dengan upah tenaga kerja sebesar Rp. 15.000,00 per HKP. Adapun jenis kegiatan yang dilakukan pada usaha ikan olahan meliputi penyiangan, perebusan, penjemuran dan pengapuran. Berikut diperlihatkan distribusi rata-rata penggunaan tenaga kerja menurut fase kegiatan dalam satu bulan produksi pada usaha ikan olahan di daerah penelitian.

Total rata-rata curahan tenaga kerja pada usaha ikan teri kering (melalui proses perebusan) adalah 42,20 HKP, didistribusikan dalam beberapa fase kegiatan yaitu kegiatan pembersihan sebesar 9,80 HKP (23,22%), perebusan sebesar 16,50 HKP (39,10%), penjemuran sebesar 11,00 HKP (26,07%), dan pengemasan sebesar 4,90 HKP (11,61%). Penggunaan tenaga kerja terbesar dicurahkan

pada kegiatan perebusan dan curahan kerja yang paling sedikit pada kegiatan pengemasan. Hal ini disebabkan lamanya waktu dan jenis tenaga kerja yang digunakan. Rata-rata tenaga kerja yang digunakan sebagian besar adalah tenaga kerja wanita yang dikonversikan dalam hari kerja Pria (HKP) sebanyak 5 orang dan 2 orang tenaga kerja pria. Rata-rata biaya tenaga kerja per HKP sebesar Rp. 15.000,00, maka total biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja selama satu bulan produksi pada usaha ikan teri kering melalui proses perebusan adalah Rp. 633.000,00. Sedangkan tanpa proses perebusan, pengolahan ikan teri segar menjadi ikan teri kering hanya membutuhkan tenaga kerja sebanyak 48,30 HKP. Dengan kata lain, hanya membutuhkan biaya tenaga kerja sebesar Rp. 1.500.150,00. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh tenaga kerja wanita.

Rata-rata curahan tenaga kerja terbesar pada usaha ikan kayu adalah kegiatan penjemuran yaitu 37,80 HKP (61,11%), kemudian diikuti oleh fase penyiangan sebesar 8,40 HKP (13,58%), pemisahan tulang sebesar 4,20 HKP (6,79%), perebusan sebesar 4,10 HKP (6,63%), pembersihan 3,15 HKP (5,09%), pengapuran sebesar 2,10 HKP (3,40%), dan pengemasan sebesar 2,10 HKP (3,40%). Jumlah penggunaan tenaga kerja ini berbeda-beda tergantung jumlah bahan baku yang digunakan dan lamanya sinar matahari saat penjemuran. Total rata-rata penggunaan tenaga kerja yang selama satu bulan produksi adalah 61,85 HKP dengan biaya per HKP sebesar Rp. 15.000,00, maka total biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja selama satu bulan produksi pada usaha ikan kayu adalah Rp. 927.750,00.

Biaya Produksi

Biaya produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan baik biaya tetap maupun biaya tidak tetap. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan dalam suatu proses produksi dan besarnya tidak tergantung pada besar kecilnya produksi yang dihasilkan, seperti biaya peralatan. Biaya tidak tetap adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi tergantung dari besar kecilnya produksi yang dihasilkan. Yang termasuk dalam biaya tidak tetap dalam usaha ikan olahan adalah biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan bunga modal. Perhitungan biaya produksi sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber-sumber modal, penggunaan sumberdaya dan penentuan harga jual ikan olahan.

Total pengeluaran biaya produksi ikan teri kering melalui proses perebusan adalah Rp.95.583.208,33, didistribusikan untuk biaya tetap sebesar Rp. 2.246.000,00, biaya tidak tetap sebesar Rp. 80.130.000,00, biaya tenaga kerja sebesar Rp. 633.000,00, biaya penyusutan peralatan sebesar Rp. 106.833,33, dan bunga modal sebesar Rp. 12.467.375,00. Pengeluaran biaya terbesar adalah biaya bahan baku ikan teri segar sebesar Rp. 72.000.000,00 (75,33%) dan biaya yang paling kecil adalah untuk membeli timba yaitu Rp. 16.000,00 (0,01%). Besaran pengeluaran biaya produksi tergantung pada jumlah bahan baku yang diolah, tenaga kerja yang digunakan dan bunga modal yang berlaku.

Penggunaan biaya produksi ikan teri kering tanpa melalui proses perebusan sebesar Rp. 92.635.930,83 relatif lebih kecil dibanding biaya produksi ikan teri kering dengan proses perebusan sebesar Rp. 95.583.208,33. Pengurangan biaya terjadi pada pembelian bahan baku dan pembayaran upah tenaga kerja sehingga berpengaruh terhadap besarnya pengeluaran terhadap bunga modal yang berlaku.

Total biaya produksi ikan kayu adalah Rp. 42.554.504,17 lebih kecil dibanding biaya produksi ikan teri kering baik melalui proses perebusan maupun tanpa proses perebusan. Pada usaha ikan kayu, pengeluaran biaya produksi yang paling besar adalah biaya pembelian bahan baku ikan tongkol sebesar Rp. 30.000.000,00 dan biaya produksi yang paling sedikit digunakan untuk membeli timba sebesar Rp. 16.000,00. Pengeluaran biaya tetap pada pembuatan ikan kayu sebesar Rp. 2.066.000,00, biaya tidak tetap sebesar Rp. 33.900.000,00, biaya tenaga kerja sebesar Rp. 927.750,00, biaya penyusutan peralatan sebesar Rp. 110.166,67, dan bunga modal sebesar Rp. 5.550.587,50.

Produksi dan Nilai Hasil Produksi

Produksi dalam penelitian adalah banyaknya ikan olahan yang dihasilkan dari sejumlah bahan yang digunakan dan dinyatakan dalam satuan kilogram. Sedangkan nilai hasil produksi merupakan hasil perkalian antara jumlah ikan olahan yang dihasilkan dengan harga jual ikan olahan tersebut pada periode tertentu dan dinyatakan dalam satuan rupiah. Berikut diperlihatkan besaran produksi dan nilai hasil produksi ikan olahan dengan rata-rata harga berlaku di daerah penelitian.

Rata-rata produksi ikan teri kering baik melalui proses perebusan maupun tanpa proses perebusan sebanyak 5.160,00 kg dengan harga jual rata-rata sebesar Rp. 23.000,00/kg diperoleh nilai

hasil produksi sebesar Rp. 118.680.000,00. Besarnya perolehan nilai hasil produksi ditentukan oleh harga jual yang berlaku dan saluran pemasaran yang ditempuh oleh pengrajin. Sebagian besar ikan teri kering dipasarkan ke beberapa daerah diluar Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu Padang, Medan, Pekan Baru, dan Duri. Hanya sedikit yang dipasarkan ke daerah sekitar produksi seperti Banda Aceh, Lhoksukon, Bireuen, dan Lhokseumawe. Namun demikian, konsumen pasar tradisional di Aceh lebih menyukai ikan teri kering tanpa proses perebusan karena lebih kenyal atau masih mengandung kadar air dengan volume tertentu. Ikan teri kering jenis ini tidak dipasarkan ke luar Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam karena dikhawatirkan terjadi pembusukan atau tidak bertahan lama.

Rata-rata produksi ikan kayu dalam satu bulan produksi adalah 1.440,00 kg dan harga jual sebesar Rp. 35.000,00/kg diperoleh nilai hasil produksi sebesar Rp. 50.400.000,00. Produksi ikan kayu relatif lebih sedikit dibanding ikan teri kering karena ikan kayu hanya dipasarkan di seputar Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu Banda Aceh, Sigli, Bireuen, Lhokseumawe, Matang Kuli, Lhoksukon, dan Kuta Binjai.

Keuntungan

Keuntungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keuntungan bersih yang merupakan selisih antara nilai hasil produksi dan jumlah biaya selama satu bulan produksi ikan olahan. Besar kecilnya keuntungan yang diterima pengrajin dari usaha ikan olahan ditentukan oleh besar kecilnya produksi dan harga jual yang berlaku serta besaran biaya yang dikeluarkan dalam satu bulan produksi ikan olahan di daerah penelitian. Besaran keuntungan yang diterima sangat menentukan besaran rentabilitas yang diperoleh pengrajin dari usaha ikan olahan.

Perolehan keuntungan bagi pengrajin dari usaha ikan teri kering (melalui proses perebusan) adalah Rp. 23.096.791,67. Besaran keuntungan ini bervariasi antar pengrajin di daerah penelitian dan ditentukan oleh besaran biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi ikan teri kering, produksi yang dihasilkan dan sistem pemasaran yang digunakan. Sedangkan untuk ikan teri kering tanpa perebusan, pada produksi dan harga jual yang sama dengan ikan teri kering dengan perebusan, diperoleh keuntungan sebesar Rp. 26.044.069,17. Selanjutnya biaya produksi ikan kayu sebesar Rp. 42.554.504,17 dan nilai hasil produksi sebesar Rp. 50.400.000,00 diperoleh keuntungan sebesar Rp. 7.845.495,83. Saluran pemasaran yang terbatas dan produksi ikan kayu yang relatif kecil menyebabkan

keuntungan yang diperoleh pengrajin dari usaha ikan kayu lebih kecil dibanding usaha ikan teri kering.

Analisis Return Cost Ratio

Analisis return cost ratio merupakan perbandingan antara penerimaan (nilai hasil produksi) dengan biaya yang dikeluarkan. Analisis ini digunakan untuk mengetahui untung tidaknya atau layak tidaknya suatu usaha untuk dijalankan, dengan ketentuan bahwa jika nilai return cost ratio yang diperoleh lebih besar dari satu ($R/C > 1$) maka usaha tersebut layak untuk dijalankan. Sebaliknya, jika perolehan nilai return cost ratio lebih kecil dari satu atau sama dengan satu, ($R/C < 1$ atau $R/C = 1$) maka usaha tersebut tidak layak untuk dijalankan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa total penerimaan atau nilai hasil produksi ikan teri kering (melalui proses perebusan) yang diterima pengrajin adalah Rp. 118.680.000,00 dan biaya produksi yang harus dikeluarkan pengrajin sebesar Rp. 95.583.208,33 maka perolehan nilai return cost ratio sebesar 1,24, artinya setiap penambahan biaya produksi sebesar satu satuan rupiah akan menambah keuntungan usaha ikan teri kering sebesar Rp 1,24. Sedangkan untuk ikan teri kering (tanpa proses perebusan), dengan biaya produksi sebesar Rp. 92.635.930,83 diperoleh nilai return cost ratio sebesar 1,28, lebih besar dari nilai return cost ratio ikan teri kering dengan proses perebusan. Hal ini memperlihatkan bahwa usaha ikan teri kering tanpa proses perebusan lebih menguntungkan dibanding usaha ikan teri kering melalui proses perebusan. Pemilihan proses produksi ikan teri kering disesuaikan dengan kondisi cuaca saat pengolahan. Apabila cuaca mendung maka pengrajin harus merebus ikan teri segar untuk diolah menjadi ikan teri kering, dan bila cuaca cerah dan penyinaran sinar matahari cukup maka pengrajin langsung menjemur ikan teri segar untuk diolah menjadi ikan teri kering. Secara keseluruhan menunjukkan bahwa usaha ikan teri kering di daerah penelitian sudah menguntungkan dan layak untuk diusahakan.

Pada usaha ikan kayu, diperoleh nilai return cost ratio sebesar 1,18, artinya setiap penambahan biaya produksi ikan kayu akan meningkatkan perolehan keuntungan bagi pengrajin sebesar 1,84. Hasil penelitian juga memperlihatkan perolehan nilai return cost ratio ikan teri kering lebih besar dibanding perolehan nilai return cost ratio ikan kayu. Hal ini menunjukkan bahwa di daerah penelitian usaha ikan teri kering jauh lebih menguntungkan dibanding usaha ikan kayu pada harga berlaku.

Rentabilitas Usaha Ikan Olahan

Rentabilitas adalah perbandingan antara keuntungan yang diperoleh dengan modal yang digunakan oleh pengrajin tersebut dalam usaha ikan olahan. Besaran rentabilitas tergantung pada besaran produksi ikan olahan, harga jual yang berlaku, besaran modal yang dikeluarkan, dan perolehan keuntungan bagi pengrajin ikan olahan, yang dinyatakan dalam persentase.

Rentabilitas Usaha Ikan Teri Kering

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat bunga modal sebesar 15% diperoleh rentabilitas usaha ikan teri kering dengan proses perebusan sebesar 24,16% dan ikan teri kering tanpa perebusan sebesar 28,11%. Hal ini menunjukkan bahwa usaha ikan teri kering sangat menguntungkan, dengan keuntungan bersih berturut-turut sebesar 24,16% dan 28,11% dalam satu bulan produksi dari modal yang diinvestasikan pada usaha ikan teri kering.

Perolehan rentabilitas ikan teri kering dengan proses perebusan sebesar 24,16% berarti bahwa setiap pengeluaran biaya sebesar Rp. 95.583.208,33 akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 23.096.791,67, demikian juga halnya untuk ikan teri kering tanpa perebusan dengan tingkat rentabilitas 28,11%, dengan ketentuan bahwa modal yang dikeluarkan dalam proses produksi ikan teri kering telah digunakan dengan efektif dan efisien. Peningkatan perolehan rentabilitas juga didukung oleh penggunaan tenaga kerja yang terampil dan baik. Persentase rentabilitas yang diperoleh lebih besar dibanding persentase bunga modal yang berlaku maka usaha ikan teri kering cukup menguntungkan dan layak untuk dijalankan.

Rentabilitas Usaha Ikan Kayu

Pada tingkat bunga modal sebesar 15% diperoleh rentabilitas usaha ikan kayu sebesar 18,44%, menunjukkan bahwa usaha ikan kayu memberikan keuntungan bersih sebesar 18,44% dalam satu bulan produksi dari modal yang diinvestasikan. Hal ini juga berarti bahwa setiap pengeluaran biaya produksi sebesar Rp. 42.554.504,17 akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 7.845.495,83, dengan ketentuan bahwa modal yang dikeluarkan dalam proses produksi ikan kayu telah digunakan secara efektif dan efisien. Peningkatan perolehan rentabilitas juga didukung oleh penggunaan tenaga kerja yang terampil dan baik.

Persentase rentabilitas yang diperoleh sebesar 18,44% lebih besar dibanding persentase bunga modal yang berlaku yaitu 15% per tahun. Dengan demikian, usaha ikan kayu cukup menguntungkan dan

layak untuk dijalankan. Namun demikian, perolehan rentabilitas ikan kayu sebesar 18,44% lebih kecil dibanding rentabilitas ikan teri kering sebesar 24,16%. Ini berarti bahwa usaha ikan teri kering lebih menguntungkan dibanding ikan kayu.

4.4 Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Rata-rata nilai hasil produksi ikan teri kering yang diterima pengrajin adalah Rp. 118.680.000,00 per bulan dan biaya produksi yang dikeluarkan baik melalui proses perebusan dan tanpa proses perebusan berturut-turut adalah Rp. 95.583.208,33 dan Rp. 92.635.930,83 dengan perolehan keuntungan berturut-turut sebesar Rp. 23.096.791,67 dan Rp. 26.044.069,17 maka perolehan nilai return cost ratio untuk ikan teri kering melalui proses perebusan sebesar 1,24 dan tanpa proses perebusan sebesar 1,28, menunjukkan bahwa usaha ikan teri kering di daerah penelitian sudah menguntungkan dan layak untuk diusahakan. Sedangkan rata-rata nilai hasil produksi ikan kayu yang diterima pengrajin adalah Rp. 50.400.000,00 per bulan dan biaya produksi yang dikeluarkan sebesar Rp. 42.554.504,17 dan keuntungan sebesar Rp. 7.845.495,83 maka perolehan nilai return cost ratio sebesar 1,18, artinya setiap penambahan biaya produksi ikan kayu akan meningkatkan perolehan keuntungan bagi pengrajin sebesar 1,84. Hal ini menunjukkan bahwa usaha ikan teri kering di daerah penelitian cukup menguntungkan untuk dijalankan.
2. Rentabilitas ikan teri kering melalui proses perebusan sebesar 24,16%, tanpa perebusan sebesar 28,11, dan rentabilitas ikan kayu sebesar 18,44%. Persentase rentabilitas yang diperoleh lebih besar dibanding persentase bunga modal yang berlaku yaitu 15% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa usaha ikan olahan cukup menguntungkan dan layak untuk diusahakan. Namun demikian, perolehan rentabilitas ikan kayu relatif lebih kecil dibanding rentabilitas ikan teri kering. Ini berarti bahwa usaha ikan teri kering lebih menguntungkan dibanding ikan kayu.

Saran

- Mengingat tingginya permintaan ikan teri kering dan besarnya keuntungan yang diperoleh pengrajin dibanding ikan kayu,

hendaknya pengrajin usaha ikan olahan dapat memanfaatkan peluang pasar dan sumberdaya seefisien mungkin serta melakukan inovasi dalam proses pengolahan ikan olahan.

- Dalam rangka meningkatkan permintaan konsumen terhadap ikan kayu, diharapkan pemerintah dan jajarannya di sektor perdagangan dan industri dapat membuka pasar ikan kayu ke daerah luar propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Daftar Pustaka

- Assauri. 1993. *Manajemen Pemasaran*. PT. Rajawali. Jakarta.
- Junianto. 2002. *Kiat Memilih Ikan Segar & Produk Olahannya*. Pikiran Rakyat. 21 Juli 2002.
- Mubyarto. 1995. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. LP3ES. Jakarta.
- Munawir, S. 1981. *Analisa Laporan Keuangan*. Liberty. Jakarta.
- Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bandung.
- Riyanto, B. 1992. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Gajah Mada. Yogyakarta.
- Samosir, A. 1985. *Alat-alat Analisa Dalam Pembelanjaan Perusahaan*. Universitas Nommensen. Medan.
- Soekartawi. 1990. *Teori Ekonomi Produksi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Soekartawi. 1993. *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian. Teori dan Aplikasinya*. Rajawali Pers. Jakarta.
- _____. 1995. *Analisis Usahatani*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Soekirno, S. 1997. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.



BAB 5

PROGRAM MINAPOLITAN DAN PERANANNYA DALAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP DI KABUPATEN ACEH TIMUR

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk menganalisis program minapolitan dan peranannya dalam pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Aceh Timur. Metode yang digunakan adalah metode survei. Penentuan kabupaten dilakukan secara purposive, yaitu Kabupaten Aceh Timur sebagai kawasan minapolitan perikanan tangkap berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/KEPMEN-KP/2013. Analisis peranan program Minapolitan dalam pengembangan Perikanan Tangkap Kabupaten Aceh Timur mencakup capaian dan kendala pelaksanaan program minapolitan di Kabupaten Aceh Timur dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perikanan tangkap Kabupaten Aceh Timur berpotensi untuk dikembangkan karena terletak pada kawasan segitiga pertumbuhan kerjasama Indonesia-Thailand-Malaysia (IMT-GT), ketersediaan sumberdaya perikanan, infrastruktur, dan terbukanya peluang pasar ekspor produk perikanan. Minimnya pengolahan ikan mendorong pemerintah daerah meningkatkan unit-unit pengolahan ikan (UPI). Program Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Aceh Timur memberikan dampak positif bagi perikanan tangkap diantaranya peningkatan infrastruktur kawasan minapolitan, peningkatan produksi perikanan tangkap di kawasan minapolitan, penyerapan tenaga kerja, penambahan sarana dan prasarana penangkapan ikan, peningkatan usaha perikanan tangkap, peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia (SDM), dan peningkatan permodalan & investasi.

Key word : peranan, program minapolitan, perikanan tangkap.

5.1 Pendahuluan

Kabupaten Aceh Timur memiliki perairan seluas 1.683,5 km², dengan daerah pesisir seluas 2.236 km² dan daratan seluas 6.040,4 km². Pada perikanan tangkap, kabupaten tersebut memiliki satu unit Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), 5 unit Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), 17 unit dermaga dan 8 unit balai nelayan. Adapun jumlah nelayan sebanyak 8.988 orang. Sementara itu, armada penangkapan ikan sebanyak 121 unit kapal motor, kapal motor temple sebanyak 645 unit, perahu tanpa motor atau sampan sebanyak 462 unit. Jumlah produksi ikan di Kabupaten Aceh Timur untuk perikanan tangkap mencapai 16.620,61 ton, sedangkan perikanan hasil budidaya sebanyak 8.426 ton. Sehingga, jumlah keseluruhan produksi ikan per tahun sebanyak 25.046,61 ton (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur, 2015). Namun demikian sumberdaya ini belum mampu mengangkat taraf kehidupan masyarakat pesisir. Faktanya, 25 persen masyarakat pesisir Aceh masih hidup di bawah garis kemiskinan atau belum sejahtera. Degradasi sumberdaya alam pesisir dan laut, kebanyakan terjadi karena perbuatan manusia (anthropogenic), baik akibat aktifitas produksi penangkapan ikan, maupun karena aktifitas nonproduksi, seperti pencemaran akibat limbah domestik maupun industri (Fauzi dan Anna, 2002).

Kemiskinan dan kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan isu utama pembangunan ekonomi Aceh. Namun kemiskinan nelayan Aceh yang mencerminkan kondisi keprihatinan rumah tangga, permasalahan, keterbatasan sumberdaya nelayan dan harapan nelayan Aceh masih belum digambarkan secara nyata, bahkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang digulirkan pemerintah belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan nelayan yang menjeratnya dalam jurang kemiskinan.

Faktor penyebab terjadinya lingkaran kemiskinan pada sebagian besar masyarakat nelayan, terutama nelayan lokal adalah keterbatasan sarana dan pra sarana, keterbatasan penguasaan teknologi penangkapan, keterbatasan akses ke sumber permodalan seperti bank, serta rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan para nelayan. Di samping itu, jenis pekerjaan sebagai nelayan memiliki sifat ketergantungan yang tinggi terhadap musim. Kondisi ini berakibat pada sulitnya kelompok masyarakat tersebut untuk meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik. Masyarakat nelayan lokal sebagai kelompok masyarakat yang sangat rentan dan hidup dalam kemiskinan seringkali tidak tersentuh oleh program-

program yang dilaksanakan pemerintah daerah. Kondisi ini disebabkan karena dalam perencanaan program pembangunan daerah tidak melibatkan masyarakat nelayan lokal, sehingga program yang digulirkan sering tidak tepat sasaran. Konsekuensinya, kebutuhan permodalan nelayan dipenuhi oleh rentenir, tengkulak dan tauke yang dalam kenyataannya secara jangka panjang tidak banyak menolong bahkan mungkin makin menjerat utang masyarakat pantai (Subri, 2007). (Subri, 2007).

Minapolitan perikanan tangkap merupakan kawasan pengembangan ekonomi wilayah berbasis usaha penangkapan ikan yang dikembangkan secara bersama oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah (KKP, 2010). Tujuan pengelolaan perikanan tangkap berdasarkan UU No 31 Tahun 2004, yaitu; meningkatkan taraf hidup nelayan, penerimaan dan devisa negara, mendorong perluasan kesempatan kerja, meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ikan, meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing, meningkatkan ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan, mencapai pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan secara optimal dan menjamin kelestarian sumberdaya ikan.

Program minapolitan perikanan tangkap salah satunya ditujukan untuk mengembangkan wilayah pesisir dan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap secara efektif dan efisien serta pengembangan sumberdaya perikanan. Dasar pelaksanaannya mengacu pada potensi perikanan dan masalah dalam perikanan tangkap. Sebagian besar nelayan di Aceh masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sumberdaya perikanan yang melimpah belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh nelayan karena keterbatasan sarana dan prasarana. Permasalahan penting yang harus dipecahkan oleh pengelola program minapolitan adalah menjaga keseimbangan untuk kepentingan keberlanjutan sumber daya ikan, kepentingan nelayan setempat, kepentingan industri terkait, dan kepentingan pemerintah. Beberapa permasalahan yang ada saat ini diantaranya adalah 1) persaingan usaha yang tidak sehat, 2) praktek bisnis monopoli dan eksploitatif, 3) sosialisasi program kurang optimal, dan 4) keterbatasan anggaran implementasi program. Hal ini diperkirakan berdampak kepada beberapa permasalahan lain diantaranya adalah belum optimalnya percepatan kegiatan minapolitan, keterbatasan

anggaran, belum tersosialisasikannya program dengan baik, potensi timbulnya praktek bisnis monopoli serta persaingan usaha antara nelayan tradisional dan nelayan modern.

Sebagian besar dari nelayan bekerja sebagai nelayan kecil, buruh nelayan, pengolah ikan skala kecil dan pedagang kecil karena memiliki kemampuan investasi terbatas. Nelayan kecil hanya mampu memanfaatkan sumberdaya di daerah pesisir dengan hasil tangkapan yang terus menurun akibat persaingan dengan kapal besar dan penurunan mutu sumberdaya pantai. Hasil tangkapan (ikan) yang mudah rusak dapat melemahkan posisi tawar mereka dalam transaksi penjualan. Selain itu, pola hubungan eskploitatif antara pemilik modal dengan buruh dan nelayan, serta usaha nelayan yang bersifat musiman dan tidak menentu menyebabkan masyarakat miskin di kawasan pesisir cenderung sulit untuk keluar dari jerat kemiskinan dan hutang dengan pemilik kapal. Berbagai peraturan, qanun, dan regulasi lain yang mengatur lingkungan hidup termasuk pesisir belum berjalan sebagaimana mestinya. Disisi lain, potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan yang melimpah hingga kini belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Dalam hal ini, sejauh mana program minapolitan berperan dalam pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Aceh Timur mengingat subsektor perikanan kabupaten ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam rangka mewujudkan perikanan yang berkelanjutan.

5.2 Metode Penelitian

Lokasi Penelitian Penentuan kabupaten dilakukan secara purposive, yaitu Kabupaten Aceh Timur sebagai kawasan minapolitan perikanan tangkap berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/KEPMENKP/2013. Penentuan kecamatan dilakukan secara purposive sampling berdasarkan penentuan Kabupaten, yaitu Kecamatan Darul Aman dan Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan explanatory research dengan metode survei(Survey Method). Analisis peranan program Minapolitan dalam pengembangan Perikanan Tangkap Kabupaten Aceh Timur mencakup capaian dan kendala pelaksanaan program minapolitan di Kabupaten Aceh Timur dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

5.3 Hasil dan Pembahasan

Potensi dan Kendala Pengembangan Perikanan Tangkap

Kabupaten Aceh Timur merupakan sentra produksi dan pengembangan perikanan di Provinsi Aceh. Kepemilikan sumberdaya perikanan dan letak wilayah perikanan yang strategis pada Kawasan Segitiga Pertumbuhan Kerjasama Indonesia-Thailand-Malaysia (IMT-GT) merupakan potensi bagi pengembangan perikanan dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Sumberdaya ikan yang melimpah dan terbukanya peluang pasar internasional memberikan peluang ekspor produk perikanan. Hingga saat ini produk perikanan Kabupaten Aceh Timur (ikan segar) telah diekspor ke Malaysia. Untuk mendukung pengembangan perikanan tangkap, kabupaten ini memiliki 1 unit Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Kecamatan Idi Rayeuk; 5 unit Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pelabuhan tradisional yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Simpang Ulim, Julok, Darul Aman, Kuala Bugak Peureulak, dan Rantau Selamat; 1 unit Balai Benih Pantai di Desa Alue Bu Kecamatan Peureulak Barat; dan banyak pembenihan tradisional; 17 unit dermaga; 8 unit balai nelayan; sarana perikanan tangkap berupa 121 unit kapal motor, 645 unit kapal motor tempel, dan 462 unit perahu tanpa motor atau sampan.

Aktivitas penangkapan ikan di Perairan Kabupaten Aceh Timur sudah berlangsung sejak lama dan mengalami peningkatan seiring dengan penambahan penduduk. Peningkatan jumlah penduduk juga berdampak kepada meningkatnya permintaan produk-produk hasil perikanan untuk memenuhi kebutuhan akan protein hewani yang berasal dari ikan. Meningkatnya eksploitasi sumberdaya ikan sebagai akibat meningkatnya permintaan terhadap sumberdaya tersebut akan berdampak pada semakin tingginya tekanan terhadap keberlanjutan sumberdaya ikan di Perairan Kabupaten Aceh Timur. Menurut FAO dalam Fauzi A (2005), diperkirakan bahwa 47 persen sumberdaya perikanan dunia telah mengalami full exploited, 19 persen dinyatakan overexploited, 9 persen diantaranya sudah depleted (terkurus). Dengan demikian 75 persen sumberdaya ikan sudah mengalami kritis. Kondisi tersebut di atas jika tidak segera dikendalikan (manage) dengan baik cepat atau lambat dikhawatirkan akan mengancam kelestarian sumberdaya ikan. Namun demikian, di Kabupaten Aceh Timur, hingga saat ini kondisi tersebut masih bisa dikendalikan dengan baik berdasarkan hukum-hukum adat laot.

Di Kabupaten Aceh Timur, sumberdaya ikan (SDI) relatif melimpah, dengan komoditas unggulannya berbagai jenis ikan pelagis dan demersal, seperti tongkol komo, layang deles, madidihang, cakalang, lisung, kapas, albacora, bawal hitam, golok-golok dan jenis non ikan seperti udang-udangan (crustacea) yang berkulit keras maupun berkulit lunak seperti cumi-cumi, sotong dan lain-lain. Dari segi pola pemanfaatan hasil laut, sebagian besar dipasarkan untuk konsumsi dalam bentuk ikan segar, hanya sebagian kecil dalam bentuk olahan tradisional menjadi ikan asin atau terasi. Ke depan, sebagai bagian dari kawasan pengembangan minapolitan, Kecamatan Idi Rayeuk (basis pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Aceh Timur) diharapkan tidak hanya mengandalkan perekonomian dari penjualan ikan segar tetapi secara bertahap akan diarahkan pada kawasan pengembangan agroindustri berbasis ikan untuk menghasilkan ikan olahan, meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah menyiapkan lahan seluas 10 Ha yang dikhususkan sebagai sentra kawasan minapolitan Aceh Timur dengan alokasi salah satunya untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI).

Adanya industri pengolahan ikan tentunya memerlukan pasokan ikan yang banyak dan kontinyu yang bisa dicapai dengan memfasilitasi kapal-kapal besar agar bisa bersandar melalui peningkatan kategori Pelabuhan Idi Rayeuk dari PPP menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) dengan luas areal menjadi 62 Ha sejak tahun 2013.

Tabel 3. Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi Ikan, Tahun 2013-2016

Tahun	Produksi (Kg)	Nilai Produksi (Rp)
2013	19.935.497	281.003.760.855
2014	10.276.460	142.484.787.500
2015	16.847.282	206.147.245.500
2016	19.447.711	324.107.427.000

Sumber : PPN Idi, 2017.

Adanya peningkatan hasil tangkapan di sektor perikanan tangkap pada tahun 2006 produksi ikan sebanyak 5,119.32 kg meningkat menjadi 12.127,47 kg pada tahun 2008. Namun terjadi penurunan tetapi tidak terlalu signifikan pada tahun 2009 hingga

2010 berturut-turut yaitu 10,895.99 kg dan 9,764.59 kg. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan iklim dengan gelombang laut yang tinggi sehingga pada tahun tersebut banyak nelayan tidak melaut (Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Aceh Timur, 2011).

Tabel 3 memperlihatkan adanya kenaikan produksi dan nilai produksi ikan sejak tahun 2014 hingga 2016. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi ekosistem berjalan dengan baik atau tingkat pemulihan dari jenis-jenis ikan tersebut masih berjalan baik dan didukung oleh program pengembangan kawasan minapolitan yang digalakkan pemerintah Kabupaten Aceh Timur sejak tahun 2013. Semakin baik fungsi ekosistem maka secara tidak langsung risiko/ancaman bagi keberlanjutan semakin kecil (Hartono et. al 2005).

Sumberdaya perikanan adalah aset yang dapat bertambah dan berkurang baik secara alami maupun karena intervensi manusia. Seluruh dinamika alam dan intervensi manusia ini mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi sumberdaya perikanan tersebut sepanjang waktu oleh sebab itu untuk mencapai hasil yang optimal dalam pengelolaan sumberdaya perikanan tidak bisa dilepaskan dari pendekatan pengelolaan sistem dinamik. Keputusan pengelolaan/eksploitasi yang dilakukan di masa lalu akan mempengaruhi kondisi sumberdaya perikanan tersebut di masa sekarang dan yang akan datang (Fauzi dan Anna 2005).

Wilayah pesisir dan pulau dipandang dari segi pembangunan merupakan potensi sumberdaya yang dapat diperbaharui (pulih), terdiri atas : perikanan laut, hutan mangrove, terumbu karang, industri bioteknologi kelautan dan pulau-pulau kecil (Dahuri 2001). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan jo. UU no. 45 tahun 2009, pengelolaan perikanan menyangkut berbagai tugas yang kompleks yang bertujuan untuk menjamin adanya hasil dari sumberdaya alam yang optimal bagi masyarakat setempat, daerah dan negara yang diperoleh dari memanfaatkan sumberdaya ikan secara berkelanjutan. selama ini, pengelolaan sumberdaya perikanan cenderung berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata dengan mengeksploitasi sumberdaya perikanan secara besar-besaran tanpa memperhatikan aspek keberlanjutannya. Ini berdampak pada kondisi sumberdaya perikanan khususnya di wilayah pantai mulai terancam keberlanjutannya. Hasil tangkapan beberapa jenis ikan terus mengalami penurunan. Kondisi seperti ini dapat terjadi karena semakin banyaknya komunitas pemanfaat sumberdaya atau semakin

efektifnya alat tangkap yang digunakan namun daya dukung lingkungan (carrying capacity) sumberdaya perikanan semakin menurun. Kondisi ini selain dapat menurunkan tingkat produktivitas dan pendapatan nelayan juga memicu terjadinya dampak sosial berupa konflik antar nelayan di wilayah pantai (Mulyani, 2013). Tantangan masa depan dalam mengelola perairan di Kabupaten Aceh Timur adalah mampu mengakomodir semua kepentingan stakeholder terkait dan berkelanjutan sebab pertumbuhan ekonomi tidak akan sustainable jika ekologi tidak sustainable karena kelestarian sumberdaya pulih adalah penentu keberlanjutan ekonomi berbasis kepulauan (Kusumastanto 2002).

Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Aceh Timur Dalam rangka memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada khususnya yang terkait dengan pengembangan perikanan dalam arti luas maka diupayakan suatu pendekatan melalui produk yaitu perencanaan pengembangan kawasan berbasis ekonomi perikanan budidaya dan tangkap (Minapolitan). Minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis manajemen ekonomi kawasan dengan motor penggerak sektor kelautan dan perikanan. Program yang mulai dijalankan Pemerintah Republik Indonesia (RI) sejak 2009 ini merupakan upaya untuk merevitalisasi sentra produksi perikanan dan kelautan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan rakyat. Minapolitan ini merupakan salah satu realisasi dari program revolusi biru yang digalakkan Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia yang salah satu pilarnya adalah mengubah pola pikir daratan ke maritim.

Kabupaten Aceh Timur ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 35/KEPMEN-KP/2013, Tanggal : 2 Juli 2013, Tentang Penetapan Kabupaten Aceh Timur Sebagai Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap dan Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya, dan merujuk pada Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 523/510/2010 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan dan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 523/ 341 / 2013 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Sekretariat Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Aceh Timur, Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 523/ 336/ 2014, Tanggal 13 Mai 2014, Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Minapolitan Dalam Kabupaten Aceh Timur. Kawasan minapolitan Kabupaten Aceh Timur terdiri dari 6 Kecamatan, 15 Mukim dan 110 Desa dengan total luas 755,47 km², dimana 53 desa

diantaranya merupakan desa pesisir seluas 137,66 km² (18,22 %) yang menjadi Kawasan Inti dan Kawasan Pendukung, sedangkan desa non pesisir menjadi Kawasan Penyangga ditambah desa pesisir yang tidak termasuk dalam kawasan pengembangan Minapolitan Kabupaten Aceh Timur. Adapun 6 kecamatan yang termasuk dalam kawasan minapolitan, yaitu : 1. Kecamatan Darul Aman, 2. Kecamatan Idi Rayeuk, 3. Kecamatan Idi Timur, 4. Kecamatan Peudawa, 5. Kecamatan Peureulak Barat, 6. Kecamatan Peureulak.

Pengembangan Kawasan Minapolitan adalah suatu pendekatan pembangunan kawasan perdesaan melalui upaya-upaya percepatan pembangunan kelautan dan perikanan pada sentra-sentra produksi dengan prinsip terintegrasi dan efisiensi, efektif serta berdaya saing. Tata laksana pengembangan Minapolitan tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan, yang antara lain menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Kabupaten Aceh Timur untuk menjadi kawasan Minapolitan, antara lain komitmen daerah, memiliki komoditas unggulan dan tersedianya fasilitas pendukung, seperti pelabuhan, industri pengolahan, jalan, listrik dan lainnya. Pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan dilakukan secara terpadu dan dimonitor oleh kelompok kerja. Selain itu juga melibatkan kerjasama dengan pihak provinsi sebagai koordinator wilayah dalam upaya pengembangan dan penyusunan anggaran. Peran pemerintah pusat cukup memberikan kontribusi dalam implementasi pengembangan kawasan baik dalam sektor produksi maupun pemasaran hasil produksi kelautan dan perikanan.

Capaian Program Minapolitan Adapun capaian pelaksanaan program pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Aceh Timur adalah :

- **Peningkatan Infrastruktur Kawasan Minapolitan**

Pengembangan infrastruktur kawasan bertujuan untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana perikanan yang sudah ada dengan perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana sehingga mampu mendorong produktifitas nelayan dalam rangka peningkatan kesejahteraan nelayan. Pembangunan infrastruktur merupakan indikator yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur berkembangnya sebuah wilayah. Kabupaten Aceh Timur, telah memiliki beberapa fasilitas untuk melayani bongkar muat barang dan hasil perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Idi (Tabel 4).

Tabel 4. Perkembangan Pembangunan Insfrastruktur di Kawasan Minapolitan

No.	Perkembangan Infrastruktur	Lokasi	Implikasi ke Masyarakat
1	PPN	Kecamatan Idi Rayeuk	Terpenuhinya seluruh kebutuhan Nelayan baik dari tempat sandar kapal maupun kegiatan bongkar muat hasil tangkapan, serta tersedianya Tempat Transaksi Produk dan Kebutuhan Pendukung Lainnya
3	Cool Storage	Kecamatan Idi Rayeuk	Stabil Harga Pokok Penjualan Ikan
4	Dermaga	Seluruh KecamatanKawasan Minapolitan	Lancarnya Proses Bongkar Muat
5	PPI/TPI	Kecamatan Rantau Seulamat & Kecamatan Darul Aman	Tersedianya Tempat Transaksi Produk dan Kebutuhan Pendukung Lainnya
6	Balai Nelayan	Kecamatan Idi Rayeuk,Peureulak dan Darul Aman	Kemudahan proses pengambilan Keputusan
7	SPDN	Kecamatan Idi Rayeuk	Terpenuhinya Suplai BBM
8	Gudang Garam	Kecamatan Darul Aman	Tata niaga garam berjalan lancar,berakibat meningkatkan pendapatan
9	Bengkel Nelayan	Kecamatan Idi Rayeuk	Terpenuhinya kebutuhan nelayan dalam hal permesinan kapal.
10	Tambatan Perahu	Kecamatan Kawasan Minapolitan	Lancarnya Proses Bongkar Muat

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur, 2017.

- **Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Kawasan Minapolitan**

Produksi perikanan tangkap yang diperoleh nelayan di perairan Kabupaten Aceh Timur merupakan jenis-jenis ikan ekonomis penting dan merupakan produk unggulan kawasan

minapolitan. Produksi perikanan tangkap cenderung berfluktuasi (Tabel 5). Produksi ikan tertinggi di Kecamatan Idi Rayeuk berkisar antara 14.296,65 kg hingga 17.826,03 kg sedangkan Kecamatan Darul Aman menduduki posisi kedua dengan produksi antara 845,82 kg hingga 3.097,25 kg. Komoditas unggulannya berbagai jenis ikan pelagis dan demersal, seperti tongkol komo, layang deles, madidihang, cakalang, lisung, kapas, albacora, bawal hitam, golok-golok dan jenis non ikan seperti udang-udangan (crustacea) yang berkulit keras maupun berkulit lunak seperti cumi-cumi, sotong dan lain-lain. Dari segi pola pemanfaatan hasil laut, sebagian besar dipasarkan untuk konsumsi dalam bentuk ikan segar, hanya sebagian kecil dalam bentuk olahan tradisional menjadi ikan asin atau terasi.

Tabel 5. Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap

No	Kecamatan	Jumlah Produksi Ikan (Ton)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Serbajadi	-	-	-	-	-
2	Simpang Jernih	-	-	-	-	-
3	Peunaron	-	-	-	-	-
4	Birem Bayeun	33,80	20,74	34,78	36,06	34,01
5	Rantau Selamat	54,80	67,97	34,36	34,82	38,58
6	Sungai Raya	50,48	60,89	98,89	98,50	95,86
7	Peureulak	1.183,21	1.148,42	503,98	506,25	542,00
8	Peureulak Timur	27,75	29,98	19,57	20,14	19,03
9	Peureulak Barat	-	-	-	-	-
10	Rantau Peureulak	-	-	-	-	-
11	Idi Rayeuk	14.296,65	17.826,03	17.222,26	17.122,50	16.505,53
12	Peudawa	47,41	56,69	135,51	141,26	170,76
13	Banda Alam	-	-	-	-	-
14	Idi Tunong	-	-	-	-	-
15	Darul Ihsan	-	-	-	-	-
16	Idi Timur	-	-	-	-	-
17	Darul Aman	898,79	845,82	1.319,99	3.097,25	1.801,93
18	Nurussalam	30,30	33,14	108,09	122,58	133,56
19	Darul Falah	-	-	-	-	-
20	Julok	103,93	355,74	376,15	390,43	470,51

21	Indra Makmu	-	-	-	-	-
22	Pantee Bidari	-	-	-	-	-
23	Simpang Ulim	84,14	88,03	176,98	177,08	180,55
24	Madat	850,74	940,06	35,19	58,78	39,01
	Jumlah	17.662,00	21.473,51	20.065,75	21.805,65	20.031,34

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2016

Sebagian besar ikan segar (sekitar 60%) dipasarkan di luar kabupaten dan diekspor ke Malaysia, dan hanya sebagian kecil yang dipasarkan di wilayah Kabupaten Aceh Timur. Ke depan, sebagai bagian dari kawasan pengembangan minapolitan, Kecamatan Idi Rayeuk diharapkan tidak hanya mengandalkan perekonomian dari penjualan ikan segar tetapi secara bertahap akan diarahkan pada kawasan pengembangan agroindustri berbasis ikan untuk menghasilkan ikan olahan, meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah menyiapkan lahan seluas 10 Ha yang dikhususkan sebagai sentra kawasan minapolitan Aceh Timur dengan alokasi salah satunya untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI).

Penyerapan Tenaga Kerja

Tolak ukur perkembangan penyerapan tenaga kerja di bidang perikanan tangkap di Kabupaten Aceh Timur terlihat dari penambahan jumlah nelayan sebagaimana disajikan pada Tabel 6. Tenaga kerja nelayan terdiri dari nelayan penuh, sambilan dan sambilan tambahan. Penambahan tenaga kerja ini diperkirakan sebagai alih profesi dari petani tambak ke nelayan

Tabel 6. Perkembangan Jumlah Nelayan dari tahun 2012 s/d 2015

No	Nelayan	Jumlah Nelayan			
		2012	2013	2014	2015
1	Nelayan Penuh	5.047	5.265	5.271	5.271
2	Nelayan Sambilan	4.695	4.862	4.862	4.862
3	Nelayan Sambilan Tambahan	-	-	3.083	3.083
	Jumlah	9.742	10.127	13.216	13.216

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2016

- **Penambahan Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana perikanan tangkap di Kabupaten Aceh Timur terdiri dari Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), pelabuhan pendaratan ikan, dermaga, balai nelayan, bengkel nelayan, tambatan perahu, dan gedung perbaikan jarring (Tabel 7).

Selama rentang tahun 2012 hingga 2015 tidak ada perubahan yang berarti terhadap sarana dan prasarana perikanan tangkap kecuali adanya penambahan bengkel nelayan, tambatan perahu, dan ketersediaan gedung perbaikan jaring. Sejauh ini, lebih difokuskan pada perbaikan jalan untuk memperlancar distribusi produk dan penambahan armada tangkap. Pada tahun 2012, kapal motor sebanyak 1.218 unit meningkat menjadi 1.486 unit (2015), motor tempel sebanyak 645 unit meningkat menjadi 713 unit (2015), dan perahu tanpa motor sebanyak 2.325 unit meningkat menjadi 2.753 unit (2015). Alat tangkap yang digunakan berupa gillnet/jarring insang, rawai, alat tangkap pancing, trammel net, purse seine, dan pancing tonda.

Tabel 7. Jumlah Prasarana

No	Prasarana	Lokasi	Jumlah Prasarana			
			2012	2013	2014	2015
1	PPP (Tahun 2016 menjadi PPN)	Kawasan Inti Minapolitan	1	1	1	1
2	PPI	Kawasan Minapolitan	2	2	2	2
3	Dermaga	Seluruh Kec. Kawasan Minapolitan	18	18	18	18
4	Balai Nelayan	Seluruh Kec. Kawasan Minapolitan	8	8	8	8
5	Bengkel Nelayan	Kec. Darul Aman	-	-	-	1
6	Tambatan Perahu	Kawasan Penyanggah Minapolitan	5	5	5	6
7	Gedung Perbaikan Jaring	Kec. Peureulak	-	-	-	1
Jumlah			34	34	34	37

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2016

- **Peningkatan Usaha Perikanan Tangkap**

Peningkatan usaha perikanan tangkap meliputi peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi perikanan, antara lain melalui: peningkatan kapasitas Unit Pengolahan Ikan (UPI),

revitalisasi pabrik es, cold storage, dan peningkatan efisiensi usaha perikanan.

- **Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia bidang perikanan, melalui program minapolitan pemerintah memberikan bantuan modal dan pelatihan kepada kelompok nelayan/KUB, kelompok usaha garam, pelatihan petani garam, pelatihan nelayan, dan pembentukan lembaga koperasi perikanan. Ke depan, peningkatan sumberdaya nelayan difokuskan kepada kemampuan nelayan untuk mengoperasikan peralatan kapal, komunikasi dan navigasi yang modern, termasuk sertifikasi nahkoda kapal dengan membangun Balai Pelatihan Nelayan dan Awak Kapal. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keadilan gender dilakukan melalui tingkat partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, pemerataan kesempatan kerja, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- **Peningkatan Permodalan dan Investasi**

Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Timur memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada sektor swasta dalam bentuk investasi pada sektor industri pengolahan ikan (UPI) sehingga mampu meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, industri pembuatan kapal dan jasa dok perbaikan kapal, pabrik es, cold storage, air bersih dan sektor sarana produksi perikanan ataupun peralatan perikanan. Dengan demikian diharapkan dapat berkembang sistem serta usaha minabisnis di kawasan minapolitan.

Kendala Pelaksanaan Program Minapolitan

Dalam pelaksanaan pengembangan perikanan tangkap, program minapolitan mengalami berbagai permasalahan, diantaranya adalah pola pengusahaan masih tradisional, minimnya investasi dan tenaga ahli di bidang pengolahan ikan akibatnya ikan banyak dipasarkan dalam bentuk segar, Sumberdaya manusia petambak yang rendah yang belum paham teknologi budidaya ikan secara modern.

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada kawasan minapolitan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Hal ini disebabkan kurangnya penyuluhan kepada masyarakat pelaku perikanan. Minimnya pelatihan - pelatihan yang dibutuhkan masyarakat pelaku perikanan terhambat oleh masalah dana dan kurangnya tenaga ahli di daerah. Adanya keterlibatan stakeholder

lintas sektor merupakan salah satu faktor utama dalam hal percepatan proses pembangunan melalui kegiatan pertemuan seperti rapat pokja dan FGD diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan kerjasama antar dinas. Hal ini perlu disikapi dengan lebih bijak oleh pemerintah daerah.

5.4 Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

- a. Perikanan Tangkap Kabupaten Aceh Timur memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena terletak pada kawasan segitiga pertumbuhan kerjasama Indonesia-Thailand-Malaysia (IMT-GT), ketersediaan sumberdaya perikanan dan infrastruktur, dan terbukanya peluang pasar ekspor produk perikanan. Minimnya pengolahan ikan mendorong pemerintah daerah meningkatkan unit-unit pengolahan ikan (UPI).
- b. Program Pengembangan Kawasan Minapolitan memberikan dampak positif bagi perikanan Kabupaten Aceh Timur diantaranya adalah peningkatan infrastruktur kawasan minapolitan, peningkatan produksi perikanan tangkap di kawasan minapolitan, penyerapan tenaga kerja, penambahan sarana dan prasarana penangkapan ikan, peningkatan usaha perikanan tangkap, peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia, dan peningkatan permodalan dan investasi. Program ini perlu dilakukan secara berkesinambungan guna mengembangkan perikanan tangkap yang berkelanjutan di Kabupaten Aceh Timur.
- c. Dalam pelaksanaan pengembangan perikanan tangkap, program minapolitan mengalami berbagai permasalahan, diantaranya adalah pola pengusahaan masih tradisional, minimnya investasi dan tenaga ahli di bidang pengolahan ikan akibatnya ikan banyak dipasarkan dalam bentuk segar, kurangnya sinergitas stakeholder lintas sektor dalam proses pembangunan, keterbatasan dana sehingga masih minimnya penyuluhan dan pelatihan, akibatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada kawasan minapolitan belum menunjukkan peningkatan yang berarti.

Saran

Mengingat besarnya kontribusi program minapolitan bagi pengembangan perikanan Kabupaten Aceh Timur dan guna meningkatkan akses nelayan dalam penangkapan ikan, maka

diharapkan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kapal/perahu dengan sistim kredit bergulir dan mendorong peran swasta dalam peningkatan investasi bidang pengolahan perikanan.

Daftar Pustaka

- Dahuri, R. 2002. Strategi Pengelolaan Kawasan Pesisir Indonesia. PKSPL. Institut Pertanian Bogor. Bogor. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur. 2016.
- Laporan Tahunan Program Minapolitan Kabupaten Aceh Timur. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur. Idi Rayeuk. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur. 2017.
- Kabupaten Aceh Timur Dalam Angka 2017. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur. Idi Rayeuk.
- Fauzi A. 2000. Persepsi Terhadap Nilai Ekonomi Sumberdaya. Pelatihan Untuk Pelatih Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Kerjasama Antara Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Kelautan Institut Pertanian Bogor dengan Proyek Pesisir Coastal Resources Center University Of Rhode Island.
- Fauzi A dan S Anna. 2002. Evaluasi Status Keberlanjutan Pembangunan Perikanan : Aplikasi Pendekatan Rappfish (Studi Kasus Perairan Pesisir DKI Jakarta). Jurnal Pesisir dan Lautan Indonesia Vil 4 (2) pp: 36-49.
- Fauzi A dan S Anna. 2005. Pemodelan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan untuk Analisis Kebijakan. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. 343 hal.
- Hartono. et al. Pengembangan Teknik Rapid Appraisal for Fisheries (RAPFISH) untuk Penentuan Indikator Kinerja Perikanan Tangkap Berkelanjutan di Indonesia.
- Buletin Ekonomi Perikanan Vol. VI Nomor 1 Tahun 2005. [KKP]. 2010. Pengembangan minapolitan perikanan tangkap. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. http://www.pupi.kkp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=103 . [29 Jul 2011].
- Kusumastanto. 2002. Reposisi Ocean Policy dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia di Era Otonomi Daerah. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Bidang Kebijakan Ekonomi Perikanan dan Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.
- Mulyani AT. 2013. Kebijakan Pengembangan Ekonomi Perikanan Tangkap Berkelanjutan di Provinsi DKI Jakarta. Tesis. Institut Pertanian Bogor. Bogor.



BAB 6

PELUANG DAN KENDALA PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP DI KABUPATEN ACEH TIMUR

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengkaji peluang dan kendala pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di Kabupaten Aceh Timur dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Penetapan Kabupaten Aceh Timur sebagai kawasan minapolitan perikanan tangkap berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/KEPMEN-KP/2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perikanan tangkap Kabupaten Aceh Timur berpotensi untuk dikembangkan karena terletak pada kawasan segitiga pertumbuhan kerjasama Indonesia-Thailand-Malaysia (IMT-GT), ketersediaan sumberdaya perikanan, infrastruktur, dan terbukanya peluang pasar ekspor produk perikanan. Minimnya pengolahan ikan mendorong pemerintah daerah meningkatkan unit-unit pengolahan ikan (UPI). Program Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Aceh Timur memberikan dampak positif bagi perikanan tangkap di kawasan minapolitan, penyerapan tenaga kerja, penambahan sarana dan prasarana penangkapan ikan, peningkatan usaha perikanan tangkap, peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia (SDM), dan peningkatan permodalan & investasi. Program ini perlu dilakukan secara berkesinambungan guna mengembangkan perikanan tangkap yang berkelanjutan di Kabupaten Aceh Timur. Dalam pelaksanaan pengembangan kawasan perikanan tangkap, program minapolitan mengalami berbagai permasalahan, diantaranya adalah pola pengusahaan masih tradisional, minimnya investasi dan tenaga ahli di bidang pengolahan ikan akibatnya ikan banyak dipasarkan dalam bentuk segar, kurangnya sinergitas stakeholder lintas sektor dalam proses pembangunan, keterbatasan dana sehingga masih minimnya penyuluhan dan pelatihan, akibatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada kawasan minapolitan belum menunjukkan peningkatan yang berarti.

Key word: peluang, kendala, pengembangan, kawasan, minapolitan, perikanan tangkap.

6.1 Pendahuluan

Kabupaten Aceh Timur merupakan salah satu sentra produksi dan pengembangan perikanan di Provinsi Aceh memiliki perairan seluas 1.683,5 km², dengan daerah pesisir seluas 2.236 km² dan daratan seluas 6.040,4 km². Kepemilikan sumberdaya perikanan dan letak wilayah perikanan yang strategis pada Kawasan Segitiga Pertumbuhan Kerjasama Indonesia-Thailand-Malaysia (IMT-GT) merupakan potensi bagi pengembangan perikanan dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Sumberdaya ikan yang melimpah dan terbukanya peluang pasar internasional memberikan peluang ekspor produk perikanan. Hingga saat ini produk perikanan Kabupaten Aceh Timur (ikan segar) telah diekspor ke Malaysia. Komoditas unggulan perikanan darat terdiri dari udang windu, kerapu, bandeng, nila dan lele, namun sejak tahun 2015 mengalami penurunan hingga 11,70% mengingat mulai maraknya budidaya kakap dan udang vaname dikalangan petambak (Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Aceh Timur, 2017).

Pada kawasan Pengembangan Minapolitan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri dari 6 kecamatan pesisir memiliki potensi perikanan tangkap atau kelautan dengan letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan laut yaitu Selat Malaka dengan area penangkapan pada wilayah pengembangan perikanan I (WPP-I) Selat Malaka - Laut Andaman. Masih simpang siur perdebatan kondisi WPP I Selat Malaka-Laut Andaman dalam kondisi penangkapan berlebih atau over fishing. Kondisi perikanan tangkap di Kabupaten Aceh Timur sebagian besar masih dalam bentuk usaha menengah dan kecil. Dari 1.314 unit armada yang bergerak dalam bidang perikanan tangkap, 687 unit berupa armada kapal motor kurang dari 5 GT (gross tonase) atau 52,2 %. Akibatnya ruang gerak nelayan menjadi terbatas karena tidak mampu beroperasi lebih sehingga konsentrasi daerah penangkapan (fishing ground) berada di perairan kurang dari 4 mil laut.

Perkembangan atau dinamika sektor perikanan dapat dilihat dari kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Aceh Timur. Jika dalam wilayah/unit yang dianalisis sektor perikanan relatif memberikan kontribusi terhadap perekonomian yang lebih besar (tampak dari kontribusi terhadap PDRB) maka perhatian stakeholder terhadap keberlanjutan usaha perikanan tangkap akan semakin tinggi (Hartono et.al 2005). Data PDRB Kabupaten Aceh Timur menunjukkan bahwa sektor pertanian masih mendominasi perekonomian daerah Aceh Timur dengan sumbangannya terhadap

total PDRB berdasarkan harga berlaku dan kontribusinya semakin meningkat setiap tahunnya (2010-2016). Pada tahun 2016, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 45,97 persen atau senilai Rp. 3.899.883,8 juta kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran; pada posisi ke dua dengan kontribusi sebesar 9,4 persen, dan urutan ketiga didominasi oleh administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 9,1 persen (Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur, 2017). Kontribusi sub sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten tergabung dalam sektor pertanian sehingga tidak dapat dijelaskan secara spesifik. Secara keseluruhan, pada tahun 2016 Kabupaten Aceh Timur menghasilkan 27.474,29 ton hasil perikanan laut dari berbagai jenis dengan nilai produksi Rp. 599.565.982,30. Dari nilai tersebut Kecamatan Idi Rayeuk merupakan penyumbang tertinggi sektor perikanan yakni produksi ikan mencapai 23.738,11 ton dan nilai produksi Rp. 511.395.991,00 (Aceh Timur Dalam Angka, 2017).

Walaupun pemanfaatan sumberdaya tersebut telah menunjukkan sumbangan berarti bagi daerah, tetapi sebagian masyarakat khususnya nelayan belum menikmatinya dengan baik. Potensi sumber daya perikanan yang besar terindikasi belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terlihat dari tingginya angka kemiskinan nelayan di wilayah pesisir Aceh yang tercermin dari lingkungan perumahan yang tidak sehat, terbatasnya fasilitas kesehatan dan minimnya sarana pendidikan. Kondisi ini menjadi kendala dalam pembangunan ekonomi wilayah. Menurut Fauzi (2000), upaya yang diperlukan untuk mengatasi keadaan di atas haruslah memperhitungkan seluruh komponen biaya termasuk biaya untuk memulihkan sumberdaya tersebut seperti biaya pengelolaan sumberdaya, degradasi lingkungan yang terjadi (environmental cost) serta biaya korbanan (opportunity cost) dari pemanfaatan sumberdaya.

Program minapolitan perikanan tangkap salah satunya ditujukan untuk mengembangkan wilayah pesisir dan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap secara efektif dan efisien serta pengembangan sumberdaya perikanan. Dasar pelaksanaannya mengacu pada potensi perikanan dan masalah dalam perikanan tangkap. Sebagian besar nelayan di Aceh masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara potensi perikanan laut Aceh mencapai 1,8 juta ton per tahun, dan baru bisa diproduksi sekitar 10 persen saja.

Sumberdaya perikanan yang melimpah belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh nelayan karena keterbatasan sarana dan prasarana.

Potensi sumberdaya perikanan Kabupaten Aceh Timur belum menjadi tolak ukur kemajuan suatu daerah. Hal ini terlihat dari tingginya angka kemiskinan nelayan di wilayah pesisir. Kemiskinan nelayan Aceh yang mencerminkan kondisi keprihatinan rumah tangga, permasalahan, keterbatasan sumberdaya nelayan dan harapan nelayan Aceh masih belum digambarkan secara nyata, bahkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang digulirkan pemerintah belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan nelayan yang menjeratnya dalam jurang kemiskinan. Besarnya angka kemiskinan di wilayah pesisir Aceh mengindikasikan adanya ketimpangan pendapatan yang tinggi diantara masyarakat khususnya masyarakat diwilayah perkotaan. Hal ini juga memperlihatkan bahwa akses-akses masyarakat pesisir (nelayan) Aceh dalam melakukan usaha-usaha peningkatan taraf hidup memiliki keterbatasan. Ketidakpastian pendapatan dan kurangnya akses nelayan dalam memperoleh modal usaha memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah.

6.2 Metode Penelitian

Lokasi Penelitian Penentuan kabupaten dilakukan secara purposive, yaitu Kabupaten Aceh Timur sebagai kawasan minapolitan perikanan tangkap berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/KEPMEN-KP/2013. Penentuan kecamatan dilakukan secara purposive sampling berdasarkan penentuan Kabupaten, yaitu Kecamatan Darul Aman dan Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.

Metode Analisis Penelitian ini menggunakan pendekatan explanatory research dengan metode survei(Survey Method). Analisis peranan program Minapolitan dalam pengembangan Perikanan Tangkap Kabupaten Aceh Timur mencakup capaian dan kendala pelaksanaan program minapolitan di Kabupaten Aceh Timur dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

6.2 Hasil dan Pembahasan

Keragaan Perikanan dan Sumberdaya Perikanan di Kabupaten Aceh Timur

Kabupaten Aceh Timur memiliki panjang pantai 161 km dan 14 kecamatan pesisir merupakan potensi perikanan yang cukup

besar sebagai motor penggerak ekonomi wilayah bila hal itu dapat dikembangkan secara terintegrasi dalam kawasan minapolitan. Terdapat 250.833 jiwa penduduk yang tersebar pada 14 kecamatan pesisir atau 71,79 % dari penduduk Aceh Timur dan sebagian besar berprofesi sebagai nelayan atau petambak.

Program minapolitan perikanan tangkap salah satunya ditujukan untuk mengembangkan wilayah pesisir dan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap secara efektif dan efisien serta pengembangan sumberdaya perikanan. Dasar pelaksanaannya mengacu pada potensi perikanan dan masalah dalam perikanan tangkap. Sebagian besar nelayan di Aceh masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Sumberdaya perikanan yang melimpah belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh nelayan karena keterbatasan sarana dan prasarana. Kabupaten Aceh Timur ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 35/KEPMEN-KP/2013, Tanggal : 2 Juli 2013, Tentang Penetapan Kabupaten Aceh Timur Sebagai Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap dan Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya, dan merujuk pada Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 523/510/2010 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan dan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 523/ 341 / 2013 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Sekretariat Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Aceh Timur, Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 523/ 336/ 2014, Tanggal 13 Mai 2014, Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Minapolitan Dalam Kabupaten Aceh Timur.

Di sektor perikanan darat, luas areal perikanan darat di Kabupaten Aceh Timur mencapai 23.003,26 Ha (terdiri dari tambak sebesar 22.940,56 Ha dan kolam sebesar 63,4 Ha yang tersebar di wilayah pesisir pada 14 Kecamatan dengan jumlah petani tambak sebanyak 5.203 orang petani. Kecamatan dengan luas areal tambak terbesar adalah; Madat, Sungal Raya, Julok, Peureulak, Bireun Bayeun, Peureulak Timur dan Rantau Selamat. Sebahagian besar pola pengelolaan budidaya tambak masih bersifat tradisional dengan luas lahan 22.940,56 Ha sedangkan pengelolaan tambak semi intensif dan intensif yang dilakukan oleh pengusaha hingga saat ini belum ada karena imbas dari masa konflik dan terpuruknya komoditas udang akibat serangan virus. Komoditi utama di sektor ini adaiah ikan Bandeng, udang windu, Udang Putih, Udang Api-Api dan serta Kepiting.

Peluang Pengembangan Perikanan Tangkap Berbasis Kawasan Minapolitan

Sumberdaya ikan yang melimpah dan terbukanya peluang pasar internasional memberikan peluang ekspor produk perikanan. Hingga saat ini produk perikanan Kabupaten Aceh Timur (ikan segar) telah diekspor ke Malaysia. Untuk mendukung pengembangan perikanan tangkap, kabupaten ini memiliki 1 unit Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Kecamatan Idi Rayeuk; 5 unit Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pelabuhan tradisional yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Simpang Ulim, Julok, Darul Aman, Kuala Bugak Peureulak, dan Rantau Selamat; 1 unit Balai Benih Pantai di Desa Alue Bu Kecamatan Peureulak Barat; dan banyak pembenihan tradisional; 17 unit dermaga; 8 unit balai nelayan; sarana perikanan tangkap berupa 121 unit kapal motor, 645 unit kapal motor tempel, dan 462 unit perahu tanpa motor atau sampan. Armada tangkap yang beroperasi di Pelabuhan Perikanan Idi terdiri dari berbagai ukuran mulai dari < 5 GT hingga yang berukuran 90 GT. Kepemilikan sarana penangkapan ada yang dimiliki pemilik lokal, campuran antara pemilik lokal dan non lokal maupun pemilik non lokal yang menanamkan modalnya di usaha perikanan pada suatu wilayah. Sifat kepemilikan sarana penangkapan ini selain menunjukkan penerimaan keuntungan juga menunjukkan tingkat kemandirian penduduk sekitar terhadap kepemilikan aset usaha perikanan yang tidak tergantung pada pihak luar. Jika keuntungan lebih banyak dinikmati oleh penduduk lokal maka kecenderungan penduduk lokal akan lebih mendukung keberlanjutan usaha perikanan tangkap (risiko/ancaman terhadap kelestarian sumberdaya perikanan tangkap akan semakin kecil) (Hartono et.al 2005). jenis alat tangkap yang ada di Pelabuhan Perikanan Idi sebagian besar berupa pancing dan purse seine.

Pembangunan infrastruktur merupakan indikator yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur berkembangnya perikanan. Kabupaten Aceh Timur, telah memiliki beberapa fasilitas untuk melayani bongkar muat barang dan hasil perikanan tangkap yaitu; Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Cool Storage, dermaga, PPI/TPI, balai nelayan, SPBU, gudang garam, bengkel nelayan, dan tambatan perahu (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur, 217). Dalam pengembangan infrastruktur kawasan minapolitan, program yang diprioritaskan adalah pengembangan jaringan jalan dan drainase, jaringan listrik, fasilitas umum dan

sarana transportasi. Pembangunan infrastruktur meliputi sarana pembenihan, budidaya dan pasca panen untuk perikanan budidaya.

Dalam perikanan tangkap, penggunaan teknologi juga dapat mengindikasikan etika pengelola perikanan dalam memanfaatkan sumberdaya ikan. Penggunaan teknologi yang tidak tepat dapat memicu terjadinya kerusakan lingkungan atau dapat menimbulkan konflik sosial antar pemanfaat sumberdaya ikan. Beberapa kriteria untuk teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan yaitu selektifitas tinggi, tidak destruktif terhadap habitat, tidak membahayakan nelayan, menghasilkan ikan bermutu baik, produk tidak membahayakan kesehatan konsumen, hasil tangkapan ikan yang dibuang minimum, mempunyai dampak minimum terhadap keanekaragaman sumberdaya hayati, tidak menangkap spesies yang dilindungi atau terancam punah, dan diterima secara sosial (Monintja dalam Bengen 2000).

Sebagai bagian dari kawasan pengembangan minapolitan, Kecamatan Idi Rayeuk diharapkan tidak hanya mengandalkan perekonomian dari penjualan ikan segar tetapi secara bertahap akan diarahkan pada kawasan pengembangan agroindustri berbasis ikan untuk menghasilkan ikan olahan, meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah menyiapkan lahan seluas 10 Ha yang dikhususkan sebagai sentra kawasan minapolitan Aceh Timur dengan alokasi salah satunya untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI). Adanya industri pengolahan ikan tentunya memerlukan pasokan ikan yang banyak dan kontinyu yang bisa dicapai dengan memfasilitasi kapal-kapal besar agar bisa bersandar melalui peningkatan kategori Pelabuhan Idi Rayeuk dari PPP menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) dengan luas areal menjadi 62 Ha sejak tahun 2013.

Pada tahun 2014, produksi ikan di Kecamatan Idi Rayeuk sebanyak 10.276.460 kg dengan nilai produksi sebesar Rp. 142.484.787.500. Terjadi peningkatan produksi ikan hampir mencapai 100% yakni sebanyak 19.447.711 kg pada tahun 2016 dengan nilai produksi sebesar Rp. 324.107.427.000. Adanya kenaikan produksi dan nilai produksi ikan sejak tahun 2014 hingga 2016. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi ekosistem berjalan dengan baik atau tingkat pemulihan dari jenis-jenis ikan tersebut masih berjalan baik dan didukung oleh program pengembangan kawasan minapolitan yang digalakkan pemerintah Kabupaten Aceh Timur sejak tahun 2013. Semakin baik fungsi ekosistem maka secara

tidak langsung risiko/ancaman bagi keberlanjutan semakin kecil (Hartono et. al 2005).

Keberadaan pasar sangat menentukan terutama pada daerah-daerah sentra produksi perikanan. Di Kabupaten Aceh Timur, khususnya di kawasan pengembangan minapolitan Kabupaten Aceh Timur, sudah terdapat beberapa lokasi pasar yang menyebar hampir di tiap kecamatan. Di sisi lain, lokasi Kabupaten Aceh Timur dekat dengan Provinsi Sumatera sehingga membuka peluang pasar ikan hingga ke medan dan wilayah lainnya di Provinsi Sumatera Utara.

Kendala Nelayan Dalam Penangkapan Ikan

Aktivitas penangkapan ikan di Perairan Kabupaten Aceh Timur sudah berlangsung sejak lama dan mengalami peningkatan seiring dengan penambahan penduduk. Peningkatan jumlah penduduk juga berdampak kepada meningkatnya permintaan produk-produk hasil perikanan untuk memenuhi kebutuhan akan protein hewani yang berasal dari ikan. Meningkatnya eksploitasi sumberdaya ikan sebagai akibat meningkatnya permintaan terhadap sumberdaya tersebut akan berdampak pada semakin tingginya tekanan terhadap keberlanjutan sumberdaya ikan di Perairan Kabupaten Aceh Timur. Menurut FAO dalam Fauzi A (2005), diperkirakan bahwa 47 persen sumberdaya perikanan dunia telah mengalami full exploited, 19 persen dinyatakan overexploited, 9 persen diantaranya sudah depleted (terkurus). Dengan demikian 75 persen sumberdaya ikan sudah mengalami kritis. Kondisi tersebut di atas jika tidak segera dikendalikan (manage) dengan baik cepat atau lambat dikhawatirkan akan mengancam kelestarian sumberdaya ikan. Namun demikian, di Kabupaten Aceh Timur, hingga saat ini kondisi tersebut masih bisa dikendalikan dengan baik berdasarkan hukum-hukum adat laot.

Sebagian besar dari nelayan bekerja sebagai nelayan kecil, buruh nelayan, pengolah ikan skala kecil dan pedagang kecil karena memiliki kemampuan investasi terbatas. Nelayan kecil hanya mampu memanfaatkan sumberdaya di daerah pesisir dengan hasil tangkapan yang terus menurun akibat persaingan dengan kapal besar dan penurunan mutu sumberdaya pantai. Hasil tangkapan (ikan) yang mudah rusak dapat melemahkan posisi tawar mereka dalam transaksi penjualan. Selain itu, pola hubungan eksploitatif antara pemilik modal dengan buruh dan nelayan, serta usaha nelayan yang bersifat musiman dan tidak menentu menyebabkan masyarakat miskin di kawasan pesisir cenderung sulit untuk keluar dari jerat kemiskinan dan hutang dengan pemilik kapal. Berbagai peraturan,

qanun, dan regulasi lain yang mengatur lingkungan hidup termasuk pesisir belum berjalan sebagaimana mestinya. Disisi lain, potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan yang melimpah hingga kini belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Dalam hal ini, sejauh mana program minapolitan berperan dalam pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Aceh Timur mengingat subsektor perikanan kabupaten ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam rangka mewujudkan perikanan yang berkelanjutan.

Hanya sebagian kecil nelayan yang memiliki sampan dan perahu motor dan tidak memiliki kapal. Rendahnya pendapatan nelayan diperairakan karena hasil tangkapan ikan yang tidak menentu akibat perubahan musim/angin dan sistim bagi hasil dalam penangkapan ikan. Keterikatannya dengan pemilik kapal menyebabkan nelayan terlibat hutangdan menyebabkan nelayan sulit lepas dari jurang kemiskinan. Untuk itu, secara bertahap beragam program pemberdayaan masyarakat nelayan dan pengembangan perikanan digulirkan pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Keberlanjutan sosial terwujud apabila aktivitas perikanan tangkap mampu mendistribusikan keuntungan ekonomi yang diterimanya untuk peningkatan sumberdaya dan kesejahteraan tenaga kerja secara terus menerus (Kennedy 2002). Keberlanjutan sosial akan semakin tinggi apabila keberlanjutan ekonomi dapat dicapai. Dimensi sosial merupakan cerminan dari bagaimana sistem sosial manusia (masyarakat perikanan tangkap) yang terjadi dan berlangsung dapat/tidak dapat mendukung berlangsungnya pembangunan perikanan tangkap dalam jangka panjang dan secara berkelanjutan.

Sudarso (2007) juga menyatakan kemiskinan nelayan tradisional di Kenjeran disebabkan oleh dua faktor yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan modal usana dan teknologi penangkapan. Secara umum kemiskinan nelayan disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal, Faktor eksternal meliputi keterbatasan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh nelayan, persaingan yang semakin ketat, ketidakjelasan mekanisme pasar, posisi tawar nelayan di tengkulak keadaan infiastruktur pelabuhan perikanan dan yuridiksi daerah otonomi, sedangkan faktor internal meliputi keterbatasan pendidikan, kurangnya kesempatan untuk mengakses dan menguasai teknologi yang lebih modem dan keterbatasan modal. Beberapa penelitian

telah membuktikan bahwa tekanan kemiskinan struktural yang melanda kehidupan nelayan tradisional disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks (Satria 2002 dan Suyanto, dkk., 2003 dalam Sudarso, 2007). Faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan fluktuasi musim-musim ikan, keterbatasan sumber daya manusia modal serta akses, jaringan perdagangan ikan yang eksploitatif terhadap nelayan sebagai produsen, tetapi juga disebabkan oleh dampak negatif modernisasi perikanan atau Revolusi Biru yang mendorong terjadinya pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan.

Sebagaimana umumnya masyarakat nelayan, dalam kesehariannya, selain melakukan kegiatan penangkapan ikan, mereka juga melakukan pengolahan ikan, karena tidak semua hasil tangkapan bisa diserap langsung oleh pasar. Kegiatan pengolahan ikan di Kabupaten Aceh Timur adalah pembuatan ikan asin, ikan kayu, abon ikan, terasi/belacan, dan pembuatan pindang ikan presto. Pembuatan ikan asin merupakan proses pengolahan atau pengawetan ikan dengan menggunakan garam agar ikan tersebut tidak cepat busuk dan dapat dikonsumsi dalam waktu yang lama. Lokasi pengolahan ikan ini tersebar di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Darul Aman, Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Idi Timur, dan Kecamatan Peudawa. Pengusaha perikanan tangkap atau nelayan pemilik merupakan pengelola penyedia sarana dan fasilitas untuk kegiatan melaut, pada tahun 2012 pengusaha perikanan tangkap berjumlah 188 orang. Anak buah kapal (ABK) dalam kegiatan melaut hanya sebagai pemberi jasa kepada pengusaha perikanan tangkap atau nelayan pemilik, jumlah anak buah kapal (ABK) pada tahun 2012 8.058 orang.

Touke Bangku atau nelayan pemilik dan anak buah kapal (ABK) yang ada di Pelabuhan Perikanan Idi Rayeuk, masih menggunakan sistem atau cara tradisional dalam mencari ikan. Hanya sebahagian yang sudah mengadopsikan menggunakan teknologi modern. Touke Bangku atau nelayan pemilik yang telah mengadopsikan teknologi modern dalam mencari dan menangkap ikan, sudah terikat kontrak dengan para importir dari luar. Dalam hal ini, para importir membantu pendanaan dan harga jual ikan ditentukan oleh importir (price maker). Hal ini sangat merugikan nelayan..

Masalah yang dihadapi oleh para nelayan yang ada di kawasan Pelabuhan Perikanan Idi Rayeuk yaitu dalam hal permodalan. Selain dari pada modal masalah yang dihadapi sekarang

oleh para pengusaha perikanan tangkap yang ada di Pelabuhan Perikanan Idi Rayeuk yaitu ketersediaan fasilitas tempat pelelangan ikan (TPI) yang bisa mempengaruhi terhadap harga. Masalah lain yang dihadapi oleh para pengusaha perikanan yaitu ketika musim tangkap ikan dengan jumlah hasil yang melimpah akan tetapi harga ikan mengalami penurunan, dan tidak ada cara bagi pengusaha perikanan tangkap atau nelayan pemilik untuk dapat menyimpan ikan tersebut dalam jangka waktu yang lama seperti halnya belum tersedianya Cold Storage, pabrik es. Industri pengolahan ikan hasil tangkapan juga belum tersedia, produksi turunan yang bisa dihasilkan hanya pengasinan ikan (ikan asin).

Pada saat para nelayan ingin melakukan pendekatan dengan pihak perbankan, ini juga menjadi kendala bagi para nelayan. Hal ini dikarenakan pengusaha perikanan tangkap atau nelayan pemilik dalam mengajukan permohonan permodalan (kredit) tidak ada jaminan yang bisa menguatkan pihak perbankan. Nelayan pemilik hanya bisa memberikan jaminan yaitu alat untuk mencari ikan (boat), sedangkan bagi pihak perbankan ini tidak bisa menjadi jaminan, karena dengan pertimbangan alasan yaitu boat memiliki nilai penyusutan sehingga ini tidak bisa menjadi jaminan yang kuat bagi pihak perbankan. Serta lahan tangkapan juga tidak bisa menjadi jaminan bagi pihak perbankan disebabkan lautan merupakan milik bersama para nelayan sehingga tidak ada kawasan laut yang menjadi hak perorangan para nelayan. Disisi lain untuk dapat meningkatkan hasil produksi yang lebih maksimal nelayan hanya mengandalkan kemampuan dari pengalaman yang telah dimiliki selama bekerja sebagai pengusaha perikanan tangkap atau nelayan pemilik dan kerja sama yang baik dengan nelayan buruh. Selain itu juga pasar yang menjadi tumpuan bagi para nelayan masih bersifat lokal, hanya didistribukan hasil tangkapan untuk daerah disekitar Kabupaten Aceh Timur atau bersifat domestik.

63 Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

- a. Perikanan Tangkap Kabupaten Aceh Timur memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena terletak pada kawasan segitiga pertumbuhan kerjasama Indonesia-Thailand-Malaysia (IMT-GT), ketersediaan sumberdaya perikanan dan infrastruktur, dan terbukanya peluang pasar ekspor produk perikanan.

Minimnya pengolahan ikan mendorong pemerintah daerah meningkatkan unit-unit pengolahan ikan (UPI).

- b. Program Pengembangan Kawasan Minapolitan memberikan dampak positif bagi perikanan Kabupaten Aceh Timur diantaranya adalah peningkatan infrastruktur kawasan minapolitan, peningkatan produksi perikanan tangkap di kawasan minapolitan, penyerapan tenaga kerja, penambahan sarana dan prasarana penangkapan ikan, peningkatan usaha perikanan tangkap, peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia, dan peningkatan permodalan dan investasi. Program ini perlu dilakukan secara berkesinambungan guna mengembangkan perikanan tangkap yang berkelanjutan di Kabupaten Aceh Timur.
- c. Dalam pelaksanaan pengembangan perikanan tangkap, program minapolitan mengalami berbagai permasalahan, diantaranya adalah pola pengusahaan masih tradisional, minimnya investasi dan tenaga ahli di bidang pengolahan ikan akibatnya ikan banyak dipasarkan dalam bentuk segar, kurangnya sinergitas stakeholder lintas sektor dalam proses pembangunan, keterbatasan dana sehingga masih minimnya penyuluhan dan pelatihan, akibatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada kawasan minapolitan belum menunjukkan peningkatan yang berarti.

Saran

Mengingat besarnya kontribusi program minapolitan bagi pengembangan perikanan Kabupaten Aceh Timur dan guna meningkatkan akses nelayan dalam penangkapan ikan, maka diharapkan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kapal/perahu dengan sistim kredit bergulir dan mendorong peran swasta dalam peningkatan investasi bidang pengolahan perikanan.

Daftar Pustaka

- Dahuri, R. 2002. Strategi Pengelolaan Kawasan Pesisir Indonesia. PKSPL. Institut Pertanian Bogor. Bogor. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur. 2016.
- Laporan Tahunan Program Minapolitan Kabupaten Aceh Timur. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur. Idi Rayeuk. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur. 2017. Kabupaten Aceh Timur Dalam Angka 2017. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur. Idi Rayeuk.
- Fauzi A. 2000. Persepsi Terhadap Nilai Ekonomi Sumberdaya. Pelatihan Untuk Pelatih Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Kerjasama Antara Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Kelautan Institut Pertanian Bogor dengan Proyek Pesisir Coastal Resources Center University Of Rhode Island.
- Fauzi A dan S Anna. 2002. Evaluasi Status Keberlanjutan Pembangunan Perikanan : Aplikasi Pendekatan Rappfish (Studi Kasus Perairan Pesisir DKI Jakarta). Jurnal Pesisir dan Lautan Indonesia Vol 4 (2) pp: 36-49.
- Fauzi A dan S Anna. 2005. Pemodelan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan untuk Analisis Kebijakan. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. 343 hal.
- Hartono. et al. Pengembangan Teknik Rapid Appraisal for Fisheries (RAPFISH) untuk Penentuan Indikator Kinerja Perikanan Tangkap Berkelanjutan di Indonesia.
- Buletin Ekonomi Perikanan Vol. VI Nomor 1 Tahun 2005. [KKP]. 2010. Pengembangan minapolitan perikanan tangkap. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- http://www.pupi.kkp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=103. [29 Jul 2011].
- Kusumastanto. 2002. Reposisi Ocean Policy dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia di Era Otonomi Daerah. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Bidang Kebijakan Ekonomi Perikanan dan Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Mulyani AT. 2013. Kebijakan Pengembangan Ekonomi Perikanan Tangkap Berkelanjutan di Provinsi DKI Jakarta. Tesis. Institut Pertanian Bogor. Bogor.



BAB 7

STRUKTUR PENDAPATAN DAN PENGELUARAN RUMAH TANGGA NELAYAN PADA KAWASAN MINAPOLITAN

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis struktur pendapatan dan pengeluaran rumah tangga nelayan pada kawasan minapolitan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *explanatory research* dengan metode survei (*Survey Method*). Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Aceh Timur sebagai kawasan minapolitan perikanan tangkap berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/KEPMEN-KP/2013. Struktur pendapatan rumah tangga nelayan merupakan rangkaian sumber pendapatan yang diperoleh nelayan dan anggota keluarganya, baik yang bersumber dari kegiatan perikanan seperti menangkap ikan, pengolahan ikan, pemasaran ikan maupun dari sumber lain diluar kegiatan perikanan. Pendapatan nelayan ditentukan oleh fluktuasi harga ikan dan besarnya tangkapan yang dipengaruhi oleh fluktuasi musim tangkapan, sarana penangkapan ikan, dan sistem bagi hasil antara nelayan dengan pemilik modal. Pola hubungan eksploitatif antara pemilik modal dengan nelayan, serta usaha penangkapan nelayan yang bersifat musiman menyebabkan nelayan miskin di kawasan pesisir cenderung sulit untuk keluar dari jerat kemiskinan dan hutang dengan pemilik kapal. Lokasi desa nelayan yang dekat dengan pusat kota menyebabkan nelayan pesisir berada pada fase transisi dengan pola kehidupan sehari-hari masih bersifat desa tetapi pola konsumsi cenderung menunjukkan masyarakat kota. Hal ini akan mempengaruhi besarnya pengeluaran rumah tangga nelayan. Pengembangan Kabupaten Aceh Timur melalui Program Minapolitan belum memberikan hasil maksimal, saat ini berada pada tahap pengembangan infrastruktur dan belum mencapai tahap pengembangan sumberdaya perikanan terutama nelayan. Pengembangan perikanan dan potensi sumberdaya perikanan dengan pendekatan pengembangan agroindustri perikanan melalui program minapolitan diharapkan dapat mengatasi masalah fluktuasi harga ikan, menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja, mengurangi ketergantungan terhadap pemilik modal, dan meningkatkan pendapatan nelayan.

Kata kunci: struktur pendapatan, pengeluaran, nelayan, kawasan, minapolitan.

7.1 Latar Belakang

Kabupaten Aceh Timur ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 35/KEPMEN-KP/2013, Tanggal : 2 Juli 2013, Tentang Penetapan Kabupaten Aceh Timur Sebagai Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap dan Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya. Subsektor Perikanan Kabupaten Aceh Timur berpotensi untuk dikembangkan karena terletak pada kawasan segitiga pertumbuhan kerjasama Indonesia-Thailand-Malaysia (IMT-GT), ketersediaan sumberdaya perikanan, infrastruktur, dan terbukanya peluang pasar ekspor produk perikanan. Namun demikian sumberdaya ini belum mampu mengangkat taraf kehidupan masyarakat pesisir. Walaupun pemanfaatan sumberdaya tersebut telah menunjukkan sumbangan berarti bagi daerah. Pada tahun 2016 kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Aceh Timur sebesar 45,97 persen atau senilai Rp. 3.899.883,8 juta) tetapi sebagian masyarakat khususnya nelayan masih belum mampu memanfaatkan sumberdaya secara optimal. Hal ini terlihat dari tingginya angka kemiskinan masyarakat pesisir di Kabupaten Aceh Timur. Pada tahun 2016 penduduk miskin di Kabupaten Aceh Timur berjumlah 61.630 jiwa atau sebesar 15,06 persen dan sebagian besar berada di wilayah pesisir dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 350.186/kapita/bulan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur, 2017).

Selama ini, pengelolaan sumberdaya perikanan cenderung berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata dengan mengeksploitasi sumberdaya perikanan secara besar-besaran tanpa memperhatikan aspek keberlanjutannya. Ini berdampak pada kondisi sumberdaya perikanan khususnya di wilayah pantai mulai terancam keberlanjutannya. Hasil tangkapan beberapa jenis ikan terus mengalami penurunan. Kondisi seperti ini dapat terjadi karena semakin banyaknya komunitas pemanfaat sumberdaya atau semakin efektifnya alat tangkap yang digunakan namun daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) sumberdaya perikanan semakin menurun. Kondisi ini selain dapat menurunkan tingkat produktivitas dan pendapatan nelayan juga memicu terjadinya dampak sosial berupa konflik antar nelayan di wilayah pantai (Mulyani, 2013). Degradasi sumberdaya alam pesisir dan laut, kebanyakan terjadi karena perbuatan manusia (*anthropogenic*), baik akibat aktifitas produksi penangkapan ikan, maupun karena aktifitas nonproduksi, seperti pencemaran akibat limbah domestik maupun industri (Fauzi dan Anna, 2002).

Di Kabupaten Aceh Timur, sebagian besar dari nelayan bekerja sebagai nelayan kecil, buruh nelayan, pengolah ikan skala kecil dan pedagang kecil karena memiliki kemampuan investasi terbatas. Nelayan kecil hanya mampu memanfaatkan sumberdaya di daerah pesisir dengan hasil tangkapan yang terus menurun akibat persaingan dengan kapal besar dan penurunan mutu sumberdaya pantai. Hasil tangkapan (ikan) yang mudah rusak dapat melemahkan posisi tawar mereka dalam transaksi penjualan. Selain itu, pola hubungan eksploitatif antara pemilik modal dengan buruh dan nelayan, serta usaha nelayan yang bersifat musiman dan tidak menentu menyebabkan masyarakat miskin di kawasan pesisir cenderung sulit untuk keluar dari jerat kemiskinan dan hutang dengan pemilik kapal. Berbagai peraturan, qanun, dan regulasi lain yang mengatur lingkungan hidup termasuk pesisir belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini didukung oleh Sugiharto *et al.* (2013) menyatakan bahwa perangkat kemiskinan yang melanda kehidupan nelayan disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan fluktuasi musim-musim ikan, keterbatasan sumber daya manusia, modal serta akses, jaringan perdagangan ikan yang eksploitatif terhadap nelayan sebagai produsen, tetapi juga disebabkan oleh dampak negatif modernisasi perikanan yang mendorong terjadinya pengurasan sumberdaya laut secara berlebihan.

7.2 Metode Penelitian

Lokasi Penelitian

Penentuan kabupaten dilakukan secara *purposive*, yaitu Kabupaten Aceh Timur sebagai kawasan minapolitan perikanan tangkap berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/KEPMEN-KP/2013. Penentuan kecamatan dilakukan secara *purposive sampling* yaitu Kecamatan Darul Aman dan Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.

Metode Analisis

Struktur pendapatan rumah tangga nelayan merupakan rangkaian sumber pendapatan yang diperoleh nelayan dan anggota keluarganya, baik yang bersumber dari kegiatan perikanan seperti menangkap ikan, pengolahan ikan, pemasaran ikan maupun dari sumber lain diluar kegiatan perikanan. Struktur pengeluaran rumah tangga nelayan terdiri atas pengeluaran pangan, non pangan, tembakau, pendidikan, dan kesehatan.

7.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Struktur Pendapatan Rumah Tangga Nelayan pada Kawasan Minapolitan

Sumber utama pendapatan rumahtangga nelayan adalah hasil penjualan ikan yang sangat tergantung kepada musim dan besarnya hasil tangkapan. Aktifitas nelayan sebagian besar pada usaha penangkapan ikan seperti perbaikan alat tangkap (jaring), pengolahan ikan, pengangkutan, dan pemasaran ikan. Aktifitas lain yang mungkin dilakukan adalah berdagang dan kegiatan di luar pertanian. Namun sebagian besar nelayan hanya mengandalkan hidupnya dari kegiatan penangkapan ikan.

Pada rumah tangga nelayan, penangkapan ikan merupakan pekerjaan laki-laki. Selain secara fisik merupakan lapangan pekerjaan yang tinggi resiko, wanita sulit untuk terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan karena sangat bertentangan dengan waktu pengasuhan anak-anak (Subri, 2007). Kegiatan wanita pada perikanan cenderung pada kegiatan pengolahan (agroindustri perikanan) terutama disaat terjadi penurunan harga ikan. Kegiatan di luar dan di dalam perikanan yang dilaksanakan pada musim penangkapan ikan memberikan corak yang berbeda terhadap perilaku ekonomi rumah tangga nelayan. Adanya hubungan komplementer antara kegiatan melaut dengan kegiatan agroindustri perikanan. Jika besarnya pendapatan dari laut menurun maka rumah tangga nelayan cenderung meningkatkan jumlah curahan kerja pada kegiatan agroindustri perikanan.

Tingkat pendapatan bersih nelayan merupakan selisih antara penjualan ikan dengan biaya penangkapan ikan. Biaya penangkapan ikan terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya penyusutan dan pemeliharaan dari sarana dan prasarana ikan yang digunakan. Biaya variabel terdiri dari biaya bahan bakar minyak (BBM) dan oli, es batu, konsumsi, dan rokok yang digunakan nelayan dalam 1 (satu) trip melaut. Menurut Subri (2007) biaya produksi dalam usaha penangkapan ikan oleh nelayan terdiri dari dua kategori yaitu biaya pengeluaran nyata dan biaya yang tidak merupakan pengeluaran nyata. Biaya pengeluaran nyata adalah : (1) bahan bakar dan oli, (2) bahan pengawet : es dan garam, (3) pengeluaran untuk makanan/konsumsi nelayan, (4) pengeluaran untuk reparasi, dan (5) pengeluaran untuk retribusi dan pajak. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak nyata adalah penyusutan dari perahu/kapal, mesin-mesin dan alat tangkap.

Pada musim panen ikan antara bulan Desember hingga bulan Maret, jumlah tangkapan ikan per hari sebanyak 2 ton ikan. Rata-rata pendapatan nelayan yang menggunakan perahu bermotor berkisar antara Rp. 50.000/hari hingga Rp. 100.000/hari dan nelayan hanya melaut 5 hari dalam seminggu. Jika usaha penangkapan ikan menggunakan kapal maka pendapatan nelayan ditentukan oleh sistem bagi hasil antara nelayan dengan pemilik kapal. Sistem bagi hasil merupakan salah satu aspek kelembagaan dalam produksi berupa perjanjian pembagian hasil tangkapan ikan yang berlaku antara nelayan dengan pemilik kapal/perahu beserta perjanjian lainnya yang mengikat. Dalam pelaksanaannya, sistem bagi hasil meskipun tidak tertulis hanya berlandaskan kepercayaan kedua belah pihak namun ketentuan hukumnya sangat mengikat. Bagi hasil ini memiliki cara yang berbeda-beda tergantung pada jenis alat tangkap dan sarana penangkapan ikan (perahu/kapal) dikarenakan oleh adanya perbedaan modal yang dikeluarkan, maka bagian pemilik kapal akan lebih besar bila dibandingkan dengan sistem bagi hasil pada perahu, dan adanya perbedaan besarnya resiko kerusakan sarana pada saat digunakan dalam kegiatan melaut.

Ikan hasil tangkapan dijual oleh touke bangku. Touke bangku merupakan pemilik modal atau orang yang ditugaskan oleh pemilik modal untuk mengelola kapal. Jika touke bangku bukan pemilik kapal maka biaya operasional dalam penangkapan ikan ditanggung oleh touke bangku sedangkan pemilik modal hanya menyediakan kapal dan sarana penangkapan ikan. Hasil penjualan ikan yang diperoleh dikurangi dengan biaya bahan bakar solar 100 lt seharga Rp. 6.500/lt sebesar Rp. 650.000. Makanan selama 5 hari untuk 20 orang sebesar Rp. 1.000.000, penggunaan es sebanyak 50 bak (1 bak @ Rp. 25.000/bak) sebesar Rp. 1.250.000. Biaya bahan bakar, makanan dan es ditanggung oleh touke sedangkan rokok ditanggung oleh nelayan. Setelah dikurangi biaya bahan bakar selanjutnya dipotong 10% dari hasil penjualan ikan untuk pemilik modal, dan sisanya dibagi sebesar 40% untuk touke bangku dan 60% untuk nelayan yang ikut melaut. Bagian 60% untuk nelayan dibagi kepada 20 orang nelayan yang ikut melaut. Anak buah kapal (15 orang) hanya memperoleh 1/15 bagian dari 1 bagian (dari bagian 60% setelah dikurangi bagian 40% untuk touke bangku) dengan penghasilan berkisar antara Rp. 50.000/hari hingga Rp. 100.000/hari tergantung besarnya tangkapan ikan dan persediaan stock untuk melaut (Jamilah, 2015).. Dalam hal ini, pawang terkadang juga mendapat bonus tambahan dari touke bangku. Sistem pembagian hasil ini jelas sangat menguntungkan

touke bangku atau pemilik modal. Penerimaan nelayan atau anak buah kapal tak sebanding dengan waktu yang digunakan untuk melaut dan bersifat fluktuatif tergantung banyaknya ikan tangkapan dan harga jual ikan.

Jika tidak ada keuntungan melaut atau perolehan hasil penjualan ikan hanya mampu menutupi biaya operasional maka nelayan yang ikut melaut tidak memiliki pendapatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maka nelayan akan berhutang kepada touke bangku. Hal inilah yang mendasari terbentuknya hubungan patron klien antara nelayan dengan pemilik modal. Jika perolehan hasil penjualan ikan tidak mampu menutupi biaya operasional, maka kerugian ditanggung oleh touke. Keterbatasan nelayan dalam kepemilikan alat tangkap menyebabkan minimnya pendapatan nelayan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan adalah fluktuasi musim tangkapan, kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia (SDM) nelayan, eksploitasi pemodal, ketimpangan dalam sistem bagi hasil, motorisasi, dan pola hidup nelayan (Jamilah, 2015).

Tingkat pendapatan rumah tangga nelayan ditentukan oleh faktor eksternal dan internal. Faktor internal berkaitan dengan kemampuan teknis dan manajemen. Dalam hal teknis hanya memiliki perahu dan alat tangkap yang terbatas. Dalam hal manajemen, nelayan sulit merubah sikap dan perilaku kearah pengembangan usaha sebagai akibat tingkat pendidikan yang umumnya rendah. Faktor eksternal berkaitan dengan degradasi lingkungan, kelembagaan ekonomi, dan konversi lahan. Kontribusi pendapatan rumah tangga nelayan pemilik perahu dari kegiatan penangkapan ikan berkisar 36,05% dan kegiatan diluar penangkapan ikan sebesar 63,95%. Sedangkan bagi rumah tangga nelayan buruh, kontribusi pendapatan dari kegiatan melaut sebesar 79,5% dan kegiatan non melaut sebesar 20,5%. Kondisi ini terjadi karena nelayan buruh tidak memiliki asset produksi dan rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan nelayan buruh sulit melakukan perubahan perilaku pendapatan di luar kegiatan melaut (Nuraisah, 2000).

Tabel 8. Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Kabupaten Aceh Timur

Kecamatan	Lokasi Unit Pengolahan Ikan	Jenis
Darul Aman	Seuneubok Baro	Penggaraman ikan
Idi Rayeuk	Blang Geulumpang	Penggaraman ikan & pindang ikan
	Ketapang mameh	Penggaraman ikan & abon ikan
	Calok Geulima	Penggaraman ikan & pembuatan terasi/belacan
	Kuala Peudawa Puntong	Penggaraman ikan
Idi Timur	Matang Rayeuk PP	Penggaraman ikan
Peudawa	Kuala Peudawa	Penggaraman ikan
	Kampong Keudee	Penggaraman ikan

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur, 2017.

Jika terjadi penurunan harga jual ikan di tingkat nelayan, maka nelayan cenderung melakukan kegiatan pengolahan. Umumnya kegiatan ini dilakukan oleh wanita (isteri atau remaja putri). Pola nafkah ganda merupakan perilaku rumah tangga nelayan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Adapun kegiatan pengolahan ikan dimaksud adalah pengeringan ikan (misalnya ikan teri, ikan kayu), penggaraman ikan, pengasapan ikan, pembuatan abon ikan, pindang ikan, dan terasi. Unit pengolahan ikan tersebar di beberapa kecamatan sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 8. Aktivitas pengolahan ikan merupakan agroindustri berbasis ikan skala rumah tangga dan relatif sedikit dilakukan karena nelayan di Kabupaten Aceh Timur cenderung menjual ikan segar baik dalam wilayah kabupaten (sekitar 40% dari total produksi ikan) maupun luar kabupaten (sekitar 60% dari total produksi ikan). Sebagian besar ikan di ekspor ke Malaysia. Hal ini terjadi karena belum adanya investasi skala perusahaan dibidang pengolahan ikan.

Industri perikanan dengan investasi skala perusahaan sangat mungkin dikembangkan di Propinsi Aceh, mengingat tingginya potensi perikanan dan sumberdaya perikanan, ketersediaan lahan, dan tingginya permintaan produk olahan berbasis ikan di tingkat konsumen baik nasional maupun internasional. Integrasi secara sinergik antara pemerintah daerah, swasta, perbankan, lembaga swadaya lokal dan asing akan menjadi pilar utama pengembangan

agroindustri perikanan di Propinsi Aceh sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nelayan, mengurangi angka kemiskinan masyarakat pesisir, menciptakan nilai tambah produk, meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi gejolak sosial dalam masyarakat, dan meningkatkan perekonomian daerah dan nasional.

Struktur Pengeluaran Rumah Tangga Nelayan pada Kawasan Minapolitan

Struktur pengeluaran rumah tangga nelayan ditentukan oleh tingkat pendapatan rumah tangga. Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan suatu keluarga selama sebulan untuk konsumsi semua anggota keluarga. Pengeluaran keluarga untuk pangan dan non-pangan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan (BPS 1998). Struktur pengeluaran rumah tangga nelayan terdiri atas pengeluaran pangan, non pangan, tembakau, pendidikan, dan kesehatan. BPS (2002) membagi pengeluaran keluarga menjadi pengeluaran untuk pangan dan non-pangan. Pengeluaran untuk pangan yaitu pengeluaran untuk konsumsi kelompok padi-padian, ikan, daging, telur, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, makanan dan minuman jadi. Sementara pengeluaran untuk non-pangan adalah pengeluaran untuk konsumsi perumahan, bahan bakar, penerangan, air, barang dan jasa, pakaian, dan barang-barang tahan lama lainnya.

Umumnya nelayan akan mendahulukan pengeluaran untuk konsumsi pangan. Jika pendapatan yang digunakan untuk pengeluaran konsumsi meningkat, menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan rumah tangga nelayan semakin meningkat. Rumah tangga nelayan akan cenderung mengurangi curahan kerja dan meningkatkan waktu luang jika pendapatan meningkat. Alokasi pengeluaran terbesar adalah pengeluaran pangan sebesar 80,7%, pengeluaran non pangan sebesar 13,9%, sedangkan pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan sebesar 5,4%. Lokasi desa nelayan yang dekat pusat kota menyebabkan masyarakat nelayan pesisir berada pada fase transisi, yaitu pola kehidupan sehari-hari masih bersifat desa tetapi pola konsumsi cenderung menunjukkan masyarakat kota (urban). Hal ini akan mempengaruhi besarnya pengeluaran rumah tangga nelayan yang berada di sekitar pusat kota atau jauh dari pusat kota. Peningkatan harga-harga kebutuhan hidup memaksa setiap keluarga berpendapatan rendah untuk melakukan tindakan memprioritaskan pengeluaran untuk pangan (Sulaeman, 2008). Lebih lanjut Suhardjo (1989) mengemukakan

bahwa pendapatan sangat berpengaruh terhadap alokasi pengeluaran keluarga. Keluarga dengan pendapatan rendah akan menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk pangan sebagai kebutuhan pokok. Ada kecenderungan makin tinggi pendapatan keluarga maka makin rendah elastisitas konsumsi pangan dibanding konsumsi bukan pangan (Mangkuprawira, 1985).

Daftar Pustaka

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2002. *Indikator Kesejahteraan Rakyat*. BPS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur. 2017. *Angka Kemiskinan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010-2016*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur. Idi Rayeuk. <https://acehtimurkab.bps.go.id>
- Fauzi A dan S Anna. 2002. Evaluasi Status Keberlanjutan Pembangunan Perikanan : Aplikasi Pendekatan Rappfish (Studi Kasus Perairan Pesisir DKI Jakarta). *Jurnal Pesisir dan Lautan Indonesia*. 4(2): 36-49.
- Jamilah. 2015. Analisis Ketidakpastian Pendapatan Nelayan Aceh. *Jurnal E-Mabis*. 16(1): 120-127.
- Mangkuprawira S. 1985. Alokasi waktu dan kontribusi kerja anggota keluarga dalam kegiatan ekonomi rumah tangga (studi kasus di dua tipe Desa di Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat). *Disertasi*. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Mulyani AT. 2013. Kebijakan Pengembangan Ekonomi Perikanan Tangkap Berkelanjutan di Provinsi DKI Jakarta. *Tesis*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Nuraisah. 2000. Analisis Ekonomi Alokasi Waktu, Pendapatan, dan Kemiskinan Rumah Tangga Nelayan Di Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi. *Skripsi*. Program Studi Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Subri M. 2005. *Ekonomi kelautan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 224 hal.
- Sugiharto E, Salmani, Gunawan BI. 2013. Studi tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di Kampung Gurimbang Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Dalam: *Jurnal Ilmu Perikanan Tropis*. 3(2): 87-94.

- Suhardjo. 1989. *Sosio Budaya Gizi*. Bogor: Pusat Antara Universitas Pangan dan Gizi, Institut Pertanian Bogor.
- Sulaeman, D.P. 2008. Analisis Alokasi Pengeluaran Keluarga Peserta dan Bukan Peserta Proyek Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Perkotaan. *Skripsi*. Program Studi Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.



BAB 8

PROSPEK PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN DI KABUPATEN ACEH TIMUR

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengkaji prospek pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Aceh Timur. Metode yang digunakan adalah metode survei. Penentuan kabupaten dilakukan secara purposive, yaitu Kabupaten Aceh Timur sebagai kawasan minapolitan perikanan tangkap dan budidaya berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/KEPMEN-KP/2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Aceh Timur berpotensi untuk dikembangkan berdasarkan posisi perikanan pada laut internasional yaitu pada Kawasan Segitiga Pertumbuhan Kerjasama Indonesia-Thailand-Malaysia (IMT-GT) dan wilayah perairan laut termasuk dalam Wilayah Pengembangan Perikanan I (WPP I) Selat Malaka-Laut Andaman, serta potensi perikanan dan sumberdaya perikanan baik ditinjau dari luas wilayah perikanan, ketersediaan infrastruktur, sumberdaya ikan, sumberdaya manusia perikanan, sarana penangkapan ikan, ketersediaan lahan budidaya, pasar, pengolahan, kelembagaan, dan terbukanya peluang pasar ekspor produk perikanan. Integrasi kelembagaan pemerintah, perbankan, swasta diharapkan mampu mengatasi permasalahan perikanan dan nelayan, pemberdayaan nelayan dan petani tambak, serta mendorong pengembangan agroindustri perikanan terpadu pada kawasan minapolitan.

Kata kunci: prospek, pengembangan, kawasan, minapolitan.

8.1 Latar Belakang

Minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis manajemen ekonomi kawasan dengan motor penggerak sektor kelautan dan perikanan. Program Minapolitan mulai dijalankan pemerintah Republik Indonesia (RI) sejak tahun 2009 dan merupakan realisasi dari program revolusi biru yang digalakkan Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia untuk mengubah pola pikir daratan ke maritim, dengan penekanan

pemanfaatan sumberdaya lokal yang unggul dan berdaya saing. Pengembangan kawasan minapolitan mencakup kegiatan produksi, pengolahan, serta pemasaran produk perikanan dan kelautan. Melalui program minapolitan diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah perikanan dan masyarakat pesisir. Masalah tersebut menurut Dahuri (2008) terletak pada: (1) daerah yang didiami nelayan pada umumnya terisolir, (2) akses jalan, pasar, dan jaringan komunikasi tidak tersedia, (3) pengetahuan dan keterampilan sangat rendah sehingga tidak menguasai teknologi perikanan tangkap dan budidaya, serta kemampuan berpikir antisipatif rendah, (4) rendahnya kemampuan penanganan dan pengolahan hasil - hasil perikanan dan kelautan, (5) terbatasnya sarana dan prasarana, dan (6) tidak memiliki modal usaha.

Kabupaten Aceh Timur memiliki perairan laut seluas 1.683,5 km², garis pantai sepanjang 46,4 km, dan posisi strategis perikanan pada kawasan segitiga pertumbuhan kerjasama Indonesia-Thailand-Malaysia (IMT-GT) dan wilayah perairan laut termasuk dalam Wilayah Pengembangan Perikanan I (WPP I) Selat Malaka-Laut Andaman Adapun Sarana dan prasarana perikanan yang dimiliki adalah 1 unit Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Idi, Pelabuhan. Pendaratan Ikan (PPI) di Kuala Idi Cut dan Kuala Bagok ditambah pelabuhan tradisional yang tersebar, dan jalan nasional sepanjang 43,4 km. Tambak produktif yang diusahakan secara tradisional seluas 3.787 Ha dan kolam air tawar seluas 2,6 Ha, lahan tambak non produktif (*idle*) seluas 2.272,2 Ha dan kolam seluas 3,9 Ha. Berdasarkan potesi perikanan dan sumberdaya perikanan tersebut maka Kabupaten Aceh Timur ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 35/KEPMEN-KP/2013, Tanggal : 2 Juli 2013, Tentang Penetapan Kabupaten Aceh Timur Sebagai Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap dan Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya.

Kawasan minapolitan Kabupaten Aceh Timur seluas 755,47 km² terdiri dari 6 Kecamatan, 15 Mukim dan 110 Desa dengan total, 53 desa diantaranya merupakan desa pesisir seluas 137,66 km² (18,22 %) yang menjadi Kawasan Inti dan Kawasan Pendukung, sedangkan desa non pesisir menjadi Kawasan Penyangga ditambah desa pesisir yang tidak termasuk dalam kawasan pengembangan Minapolitan Kabupaten Aceh Timur. Wilayah pesisir Kawasan Minapolitan dibentuk dari batas 4 mil laut (1mil laut = 1,85 km) dari pantai dan batas kecamatan pesisir. Kawasan Minapolitan Kabupaten Aceh Timur merujuk pada Keputusan Bupati Aceh Timur

Nomor 523/510/2010 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Aceh Timur, meliputi enam kecamatan yang memiliki batas pantai, yaitu: (1) Kecamatan Darul Aman, (2) Kecamatan Idi Rayeuk, (3) Kecamatan Idi Timur, (4) Kecamatan Peudawa, (5) Kecamatan Peureulak Barat, dan (6) Kecamatan Peureulak (Gambar 2)



Gambar 2. Geostrategis Kabupaten Aceh Timur

Kondisi perikanan tangkap di Kabupaten Aceh Timur sebagian besar masih dalam bentuk usaha menengah dan kecil. Kabupaten ini memiliki armada penangkapan ikan sebanyak 121 unit kapal motor, 645 unit kapal motor tempel, perahu tanpa motor atau sampan sebanyak 462 unit. Dari 1.314 unit armada yang bergerak dalam bidang perikanan tangkap, 687 unit berupa armada kapal motor kurang dari 5 GT (gross tonase) atau 52,2 %. Akibatnya ruang gerak nelayan menjadi terbatas karena tidak mampu beroperasi lebih sehingga konsentrasi daerah penangkapan (*fishing ground*) berada di perairan kurang dari 4 mil laut.

Sumberdaya perikanan belum mampu mengangkat taraf kehidupan masyarakat pesisir. Walaupun pemanfaatan sumberdaya tersebut telah menunjukkan sumbangan berarti bagi daerah. Pada tahun 2016 kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Aceh Timur sebesar 45,97 persen atau senilai Rp. 3.899.883,8 juta) tetapi sebagian masyarakat khususnya nelayan masih belum mampu memanfaatkan sumberdaya secara optimal. Hal ini terlihat dari tingginya angka kemiskinan masyarakat pesisir di Kabupaten Aceh Timur. Pada tahun 2016 penduduk miskin di

Kabupaten Aceh Timur berjumlah 61.630 jiwa atau sebesar 15,06 persen dan sebagian besar berada di wilayah pesisir dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 350.186/kapita/bulan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur, 2017).

Potensi perikanan laut Aceh mencapai 1,8 juta ton per tahun, dan baru bisa diproduksi sekitar 10 persen saja. Sumberdaya perikanan yang melimpah belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh nelayan karena keterbatasan sarana dan prasarana. Sebagian besar dari nelayan bekerja sebagai nelayan kecil, buruh nelayan, pengolah ikan skala kecil dan pedagang kecil karena memiliki kemampuan investasi terbatas. Nelayan kecil hanya mampu memanfaatkan sumberdaya di daerah pesisir dengan hasil tangkapan yang terus menurun akibat persaingan dengan kapal besar dan penurunan mutu sumberdaya pantai. Hasil tangkapan juga mudah rusak sehingga melemahkan posisi tawar mereka dalam transaksi penjualan. Selain itu, pola hubungan eksploitatif antara pemilik modal dengan buruh dan nelayan, serta usaha nelayan yang bersifat musiman dan tidak menentu menyebabkan masyarakat miskin di kawasan pesisir cenderung sulit untuk keluar dari jerat kemiskinan dan hutang dengan pemilik kapal.

Sebagian besar dari nelayan bekerja sebagai nelayan kecil, buruh nelayan, pengolah ikan skala kecil dan pedagang kecil karena memiliki kemampuan investasi terbatas. Nelayan kecil hanya mampu memanfaatkan sumberdaya di daerah pesisir dengan hasil tangkapan yang terus menurun akibat persaingan dengan kapal besar dan penurunan mutu sumberdaya pantai. Hasil tangkapan (ikan) yang mudah rusak dapat melemahkan posisi tawar mereka dalam transaksi penjualan. Selain itu, pola hubungan eksploitatif antara pemilik modal dengan buruh dan nelayan, serta usaha nelayan yang bersifat musiman dan tidak menentu menyebabkan masyarakat miskin di kawasan pesisir cenderung sulit untuk keluar dari jerat kemiskinan dan hutang dengan pemilik kapal. Berbagai peraturan, qanun, dan regulasi lain yang mengatur lingkungan hidup termasuk pesisir belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini didukung oleh Sugiharto et al. (2013) menyatakan bahwa perangkap kemiskinan yang melanda kehidupan nelayan disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan fluktuasi musim-musim ikan, keterbatasan sumber daya manusia, modal serta akses, jaringan perdagangan ikan yang eksploitatif terhadap nelayan sebagai produsen, tetapi juga disebabkan oleh

dampak negatif modernisasi perikanan yang mendorong terjadinya pengurasan sumberdaya laut secara berlebihan.

8.2 Metode Penelitian

Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive, yaitu Kabupaten Aceh Timur sebagai kawasan minapolitan perikanan tangkap berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/KEPMEN-KP/2013.

Metode Analisis

Penelitian menggunakan metode survei (survey method) dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.

8.3 Hasil Dan Pembahasan

Sumberdaya Perikanan

Kabupaten Aceh Timur merupakan sentra produksi dan pengembangan perikanan di Provinsi Aceh. Sumber Daya Ikan (SDI) relatif melimpah, dengan komoditas unggulannya berbagai jenis ikan pelagis dan demersal, seperti tongkol komo, layang deles, madidihang, cakalang, lisung, kapas, albacora, bawal hitam, golok-golok dan jenis non ikan seperti udang-udangan (crustacea) yang berkulit keras maupun berkulit lunak seperti cumi-cumi, sotong dan lain-lain. Pada tahun 2014, produksi ikan untuk perikanan tangkap mencapai 16.620,61 ton meningkat menjadi 27.474,29 ton pada tahun 2016 dengan nilai produksi sebesar Rp. 599.565.982,30. Dari nilai tersebut Kecamatan Idi Rayeuk merupakan penyumbang tertinggi sektor perikanan yakni produksi ikan mencapai 23.738,11 ton dan nilai produksi Rp. 511.395.991 (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur, 2017).

Kepemilikan sumberdaya perikanan dan letak wilayah perikanan yang strategis pada Kawasan Segitiga Pertumbuhan Kerjasama Indonesia-Thailand-Malaysia (IMT-GT) merupakan potensi bagi pengembangan perikanan dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Untuk mendukung pengembangan perikanan tangkap, kabupaten ini memiliki 1 unit Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Kecamatan Idi Rayeuk; 5 unit Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pelabuhan tradisional yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Simpang Ulim, Julok, Darul Aman, Kuala Bugak Peureulak, dan Rantau Selamat; 1 unit Balai Benih Pantai di Desa Alue Bu

Kecamatan Peureulak Barat; dan banyak pembenihan tradisional. sarana perikanan tangkap berupa 61 armada motor tempel dan 1.253 armada kapal motor. Jenis alat tangkap yang ada di Pelabuhan Perikanan Idi sebagian besar berupa pancing dan purse seine. Penggunaan teknologi juga dapat mengindikasikan etika pengelola perikanan dalam memanfaatkan sumberdaya ikan. Penggunaan teknologi yang tidak tepat dapat memicu terjadinya kerusakan lingkungan atau dapat menimbulkan konflik sosial antar pemanfaat sumberdaya ikan. Beberapa kriteria untuk teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan yaitu selektifitas tinggi, tidak destruktif terhadap habitat, tidak membahayakan nelayan, menghasilkan ikan bermutu baik, produk tidak membahayakan kesehatan konsumen, hasil tangkapan ikan yang dibuang minimum, mempunyai dampak minimum terhadap keanekaragaman sumberdaya hayati, tidak menangkap spesies yang dilindungi atau terancam punah, dan diterima secara sosial (Monintja dalam Bengen 2000).

Sarana dan Prasarana Perikanan

Armada tangkap yang beroperasi di Pelabuhan Perikanan Idi terdiri dari berbagai ukuran mulai dari < 5 GT hingga yang berukuran 90 GT. Sifat kepemilikan sarana penangkapan berhubungan dengan penerimaan keuntungan dari usaha perikanan. Kepemilikan sarana penangkapan terdiri dari pemilik lokal, campuran antara pemilik lokal dan non lokal maupun pemilik non lokal yang menanamkan modalnya di usaha perikanan pada suatu wilayah. Sifat kepemilikan sarana penangkapan ini selain menunjukkan penerimaan keuntungan juga menunjukkan tingkat kemandirian masyarakat pesisir terhadap kepemilikan aset usaha perikanan yang tidak tergantung pada pihak luar. Jika keuntungan lebih banyak dinikmati oleh penduduk lokal maka kecenderungan penduduk lokal akan lebih mendukung keberlanjutan usaha perikanan tangkap sehingga risiko/ancaman terhadap kelestarian sumberdaya perikanan tangkap akan semakin kecil (Hartono et.al., 2005).

Sejak tahun 2013, pengembangan kawasan Minapolitan telah diintegrasikan dengan kegiatan industrialisasi kelautan dan perikanan dengan pendekatan konsep *Blue Economy*. Pengembangan Pusat Kawasan Minapolitan terintegrasi dalam kompleks Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Idi seluas 10 Ha dengan peruntukan ruang sebagai berikut: Unit Pengolahan Ikan (industri penggaraman ikan, industri fillet ikan, industri ikan/udang beku), permukiman nelayan, pusat kuliner ikan, pusat pelatihan perikanan, pusat sarana

produksi perikanan, balai nelayan dan fasilitas perumahan permukiman. Luas lahan tambak Kawasan Inti Minapolitan mencapai 3.515 Ha dengan Kecamatan Peureulak sebagai kawasan terluas mencapai 1.852 Ha, berikutnya Kecamatan Darul Aman dengan luas kawasan 684 Ha, Kecamatan Peureulak Barat dengan luas lahan mencapai 541 Ha dan yang terkecil adalah Kecamatan Idi Timur seluas 24 Ha. Intervensi pengembangan kawasan inti minapolitan paling sering dilakukan di Kecamatan Peureulak serta kawasan inti lainnya sejak tahun 2013 hingga tahun 2015.

Pasar dan Pemasaran

Keberadaan pasar dan perbankan sangat menentukan terutama pada daerah-daerah sentra produksi perikanan. Di Kabupaten Aceh Timur, khususnya di kawasan pengembangan minapolitan Kabupaten Aceh Timur terdapat beberapa lokasi pasar yang menyebar hampir di tiap kecamatan sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 9. Sebagian besar pasar terpusat di Kecamatan Idi Rayeuk. Hal ini akan memudahkan nelayan memasarkan ikan dan mendapatkan bahan baku yang dibutuhkan untuk melaut. Hingga saat ini masyarakat pesisir belum memiliki Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di tingkat nelayan untuk memudahkan akses kredit modal. Lembaga Keuangan Mikro mampu memberikan pelayanan kredit dalam skala yang cukup besar tanpa agunan, tanpa aturan yang ketat dan intensitas pendampingan lebih tinggi dibanding dengan pola kredit komersial (Aghion and Morduch, 2000). Lembaga Keuangan Mikro menerapkan berbagai sistem dalam usaha memperdayakan masyarakat. Sistem yang diterapkan mempunyai keunggulan masing-masing dalam rangka membantu pengentasan kemiskinan (Morduch, 1999).

Guna mendukung pemasaran produk perikanan, Kabupaten Aceh Timur telah tersedia jaringan jalan sepanjang 1.797,4 Km yang terdiri dari jalan negara sepanjang 112 Km, jalan provinsi sepanjang 116,8 Km dan jalan kabupaten sepanjang 1.568,60 Km. Jalan kabupaten yang telah diaspal di Kabupaten Aceh Timur adalah sepanjang 105,30 Km, sedangkan jalan yang jenis permukaannya berbatu adalah sepanjang 500,4 Km, jalan yang jenis permukaannya kerikil sepanjang 804 Km dan jalan jenis permukaannya tanah sepanjang 116,1 Km. Sementara jembatan adalah sepanjang 2.440 m, diantaranya yang tersedia dalam keadaan baik sepanjang 810 m, dalam keadaan sedang sepanjang 410 m, dan dalam keadaan rusak sepanjang 1.220 m (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur, 2017).

Tabel 9. Fasilitas Pemasaran dan Perbankan di Kawasan Minapolitan Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2017

Fasilitas	Kecamatan					
	Darul Aman	Peureulak Barat	Peudawa	Idi Rayeuk	Idi Timur	Peureulak
Pasar Tradisional	0	17	8	4	0	
Pasar Permanen	1	5	2	19	0	2
Toko	50	97	34	277	31	165
Warung/Kedai	30	91	50	146	37	46
Koperasi	4	0	5	6	2	4
Bank	0	0	0	1	0	1

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur, 2017.

Sumberdaya ikan yang melimpah dan terbukanya peluang pasar internasional memberikan peluang ekspor produk perikanan. Pemasaran ikan sebagian besar dilakukan di luar Kabupaten Aceh Timur, bahkan diantaranya ada yang diekspor ke Malaysia. Namun jumlah ikan yang diekspor dan nilai ekspor belum terdata secara akurat. Pemasaran ikan dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur mencapai 6.749.713 kg atau berkisar 40% dari total ikan segar yang dipasarkan pada tahun 2015 yaitu 16.874.282 kg. Pemasaran luar kabupaten berkisar 60% dari total ikan segar yang dipasarkan ditujukan ke kota Medan dan Padang serta diekspor ke Maaysia. Hanya sebagian kecil ikan segar diolah menjadi ikan kayu (pengeringan), ikan asin, terasi, dan abon ikan. Hingga saat ini belum ada agroindustri pengolahan ikan siap saji (ikan kaleng).

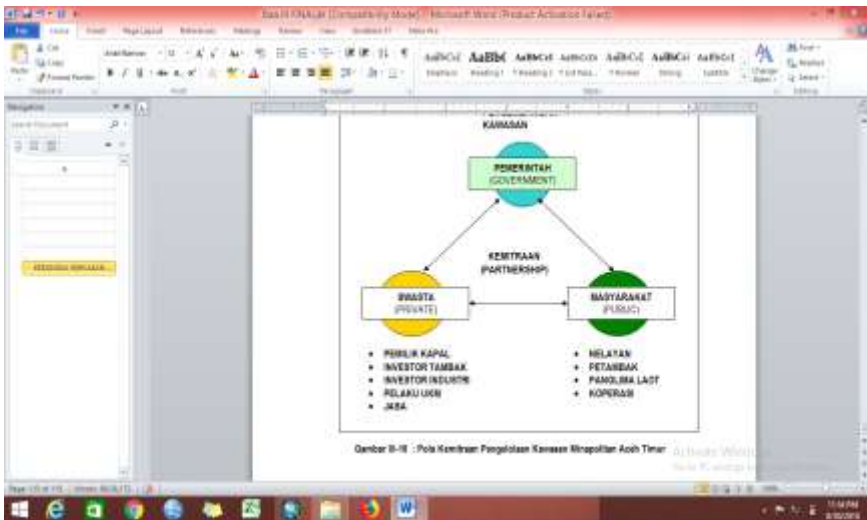
Sarana Pengolahan Ikan

Sebagaimana umumnya masyarakat pesisir, dalam kesehariannya selain melakukan kegiatan penangkapan ikan, nelayan juga melakukan pengolahan ikan, karena tidak semua hasil tangkapan bisa diserap langsung oleh pasar. Kegiatan pengolahan ikan umumnya dilakukan pada saat terjadi penurunan harga ikan akibat produksi ikan melimpah. Adapun pengolahan ikan berupa pembuatan ikan asin, ikan kayu, abon ikan, terasi/belacan, dan pembuatan pindang ikan presto. Pembuatan ikan asin merupakan proses pengolahan atau pengawetan ikan dengan menggunakan garam agar ikan tersebut tidak cepat busuk dan dapat dikonsumsi dalam waktu yang lama.

Ke depan, sebagai bagian dari kawasan pengembangan minapolitan, Kecamatan Idi Rayeuk diharapkan tidak hanya mengandalkan perekonomian dari penjualan ikan segar tetapi secara bertahap akan diarahkan pada kawasan pengembangan agroindustri berbasis ikan untuk menghasilkan ikan olahan, meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Adanya industri pengolahan ikan tentunya memerlukan pasokan ikan yang banyak dan kontinyu yang bisa dicapai dengan memfasilitasi kapal-kapal besar agar bisa bersandar pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Idi.

Kelembagaan

Kelembagaan yang dominan dalam mengelola kawasan minapolitan adalah organisasi pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Disamping pemangku kepentingan dari aparat Pemerintah Kabupaten Aceh Timur perlu juga memasukan kelembagaan yang ada di masyarakat, dalam hal ini yang erat kaitannya dengan sektor perikanan seperti Lembaga Hukum Laot/ Panglima Laot Aceh Timur dari tingkat Kabupaten sampai tingkat Lhok (Kecamatan) dan kelompok profesi seperti Kelompok Tani dan Nelayan Andalan, serta Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia sebagai mitra dalam implementasi program (Gambar 3).



Gambar 3. Pola kemitraan Pengelolaan Kawasan Minapolitan Kabupaten Aceh Timur.

Kelembagaan yang dominan dalam mengelola kawasan minapolitan melibatkan pemerintah, pihak swasta dan masyarakat sebagaimana diperlihatkan pada gambar 1. Secara khusus pemerintah memerankan fungsi *regulatory* dan *development* secara sekaligus (Shankar and Conan, 2002). Pemerintah daerah berperan sebagai pengatur atau fasilitator dalam membangun dan mengelola fasilitas pada kawasan Minapolitan, seperti industri pengolahan ikan, industri es balok, galangan kapal. Dalam pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat atau pihak swasta; sementara pihak pemerintah mengatur kebijaksanaan mengenai lokasi dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Akan tetapi, untuk penyediaan kebutuhan dasar yang tidak efisien secara ekonomi maka harus tetap menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, misalnya. perumahan nelayan, pusat kuliner ikan, balai benih ikan, puskesmas dan lain-lain.

Pengembangan Infrastruktur pada Kawasan Minapolitan

Pembangunan infrastruktur merupakan indikator yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur berkembangnya sebuah wilayah. Kondisi ini cukup terlihat di Kabupaten Aceh timur sejak ditetapkan sebagai kawasan minapolitan. Sentra produksi dan perdagangan perikanan tangkap yang dapat dijadikan penggerak utama ekonomi di kawasan minapolitan adalah pelabuhan perikanan atau tempat pendaratan ikan. Pada Kawasan Pengembangan Minapolitan Kabupaten Aceh Timur Sebagai penunjang perikanan tangkap di Kabupaten Aceh Timur, telah memiliki beberapa fasilitas untuk melayani bongkar muat barang dan hasil perikanan tangkap, pelabuhan yang cukup representatif ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Idi yang terletak di Desa Geumpang Kecamatan Idi Rayeuk. Adapun beberapa infrastruktur yang telah dibangun pada Kawasan Minapolitan yaitu Balai induk benih pantai, perluasan jalan produksi, jembatan produksi, saluran tambak, pabrik es, cool storage, dermaga, PPI/TPI, balai nelayan, dan gedung transit induk.

Dalam pengembangan infrastruktur kawasan minapolitan, program yang diprioritaskan adalah pengembangan jaringan jalan dan drainase, jaringan listrik, fasilitas umum dan sarana transportasi. Pembangunan di kawasan Minapolitan secara serius terus dilakukan oleh pemerintah daerah demi peningkatan kehidupan masyarakat dan perkembangan kawasan minapolitan yang telah direncanakan sebelumnya.

Kontribusi Subsektor Perikanan Terhadap Perekonomian Daerah

Perkembangan atau dinamika sektor perikanan dapat dilihat dari kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Aceh Timur. Jika dalam wilayah/unit yang dianalisis sektor perikanan relatif memberikan kontribusi terhadap perekonomian yang lebih besar (tampak dari kontribusi terhadap PDRB) maka perhatian stakeholder terhadap keberlanjutan usaha perikanan tangkap akan semakin tinggi (Hartono et.al 2005). Data PDRB Kabupaten Aceh Timur menunjukkan bahwa sektor pertanian masih mendominasi perekonomian daerah Aceh Timur dengan sumbangannya terhadap total PDRB berdasarkan harga berlaku dan kontribusinya semakin meningkat setiap tahunnya (2010-2016). Pada tahun 2016, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 45,97 persen atau senilai Rp. 3.899.883,8 juta kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran; pada posisi ke dua dengan kontribusi sebesar 9,4 persen, dan urutan ketiga didominasi oleh administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 9,1 persen (Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur, 2017). Kontribusi sub sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten tergabung dalam sektor pertanian sehingga tidak dapat dijelaskan secara spesifik. Secara keseluruhan, pada tahun 2016 Kabupaten Aceh Timur menghasilkan 27.474,29 ton hasil perikanan laut dari berbagai jenis dengan nilai produksi Rp. 599.565.982,30. Dari nilai tersebut Kecamatan Idi Rayeuk merupakan penyumbang tertinggi sektor perikanan yakni produksi ikan mencapai 23.738,11 ton dan nilai produksi Rp. 511.395.991,00 (Aceh Timur Dalam Angka, 2017).

Walaupun pemanfaatan sumberdaya tersebut telah menunjukkan sumbangan berarti bagi daerah, tetapi sebagian masyarakat khususnya nelayan belum menikmatinya dengan baik. Potensi sumber daya perikanan yang besar terindikasi belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terlihat dari tingginya angka kemiskinan nelayan di wilayah pesisir Aceh yang tercermin dari lingkungan perumahan yang tidak sehat, terbatasnya fasilitas kesehatan dan minimnya sarana pendidikan. Kondisi ini menjadi kendala dalam pembangunan ekonomi wilayah. Menurut Fauzi (2000), upaya yang diperlukan untuk mengatasi keadaan di atas haruslah memperhitungkan seluruh komponen biaya termasuk biaya untuk memulihkan sumberdaya tersebut seperti biaya pengelolaan sumberdaya, degradasi lingkungan yang terjadi (*environmental cost*)

serta biaya korbanan (*opportunity cost*) dari pemanfaatan sumberdaya.

8.4 Kesimpulan dan Saran

Pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Aceh Timur berpotensi untuk dikembangkan berdasarkan posisi perikanan pada laut internasional yaitu pada Kawasan Segitiga Pertumbuhan Kerjasama Indonesia-Thailand-Malaysia (IMT-GT) dan wilayah perairan laut termasuk dalam Wilayah Pengembangan Perikanan I (WPP I) Selat Malaka-Laut Andaman, serta potensi perikanan dan sumberdaya perikanan baik ditinjau dari luas wilayah perikanan, ketersediaan infrastruktur, sumberdaya ikan, sumberdaya manusia perikanan, sarana penangkapan ikan, ketersediaan lahan budidaya, pasar, pengolahan, kelembagaan, dan terbukanya peluang pasar ekspor produk perikanan.

Integrasi kelembagaan pemerintah, perbankan, swasta diharapkan mampu mengatasi permasalahan perikanan dan nelayan, pemberdayaan nelayan dan petani tambak, serta mendorong pengembangan agroindustri perikanan terpadu pada kawasan minapolitan

Daftar Pustaka

- Aghion, B.A. de and Morduch, J. 2000. *Microfinance Beyond Group Lending, in Economics of Transition*, 8(2): 401 – 420.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur, 2017. *Aceh Timur Dalam Angka*, 2017. Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur, Langsa.
- Bengen D.G. 2000. Pemanfaatan Pesisir dan Laut untuk Kegiatan Perikanan Tangkap. Prosiding Pelatihan untuk Pelatih Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Bogor, 21-26 Februari 2000. (45-57). Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB dan Proyek Pesisir-CRMP. *Coastal Resources-University of Rhode Island*.
- Dahuri, R. 2008. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur. 2017. *Laporan Tahunan Program Minapolitan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur*. Idi Rayeuk.
- Idi Rayeuk, R. 2002. Strategi Pengelolaan Kawasan Pesisir Indonesia. PKSPL. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur. 2016. *Perikanan Laut Kabupaten Aceh Timur Dalam Angka*. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Aceh Timur. Idi Rayeuk.
- Fauzi A. 2000. Persepsi Terhadap Nilai Ekonomi Sumberdaya. Pelatihan Untuk Pelatih Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Kerjasama Antara Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Kelautan Institut Pertanian Bogor dengan Proyek Pesisir *Coastal Resources Center University Of Rhode Island*.
- Hartono. et al. 2005. Pengembangan Teknik Rapid Appraisal for Fisheries (RAPFISH) untuk Penentuan Indikator Kinerja Perikanan Tangkap Berkelanjutan di Indonesia. *Buletin Ekonomi Perikanan* .Vol. VI Nomor 1 Tahun 2005.
- Morduch, J. 1999. *The Microfinance Promises, in Journal of Economic Literature*, 37(4): 1569 – 1614.
- Shankar, R. and Conan, G., 2002. *Second Critical Study on Cooperative Legislation and Policy Reform*, ICA, RAPA, New Delhi.

Sugiharto E, Salmani, Gunawan BI. 2013. Studi tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di Kampung Gurimbang Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Dalam: *Jurnal Ilmu Perikanan Tropis*. 3(2): 87-94.



GLOSARI

Minapolitan

Konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis manajemen ekonomi kawasan dengan motor penggerak sektor kelautan dan perikanan.

Panglima Laot

Pemegang otoritas menegakkan Hukum Adat Laot pada kegiatan perikanan terutama perikanan laut.

PPN

Pelabuhan Perikanan Nusantara merupakan pelabuhan yang cukup representatif memiliki beberapa fasilitas untuk melayani bongkar muat barang dan hasil perikanan tangkap, serta tersedianya Tempat Transaksi Produk dan Kebutuhan Pendukung Lainnya, ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor 32/Kepmen-KP/2016 Tentang Penetapan Pelabuhan Perikanan Idi Sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi di Provinsi Aceh

PPI

Pangkalan Pendaratan Ikan sebagai salah satu unsur prasarana ekonomi di pelabuhan, dibangun dengan tujuan untuk menunjang keberhasilan pembangunan perikanan, terutama perikanan skala kecil

TPI

Tempat Pelelangan Ikan sebagai bagian Pangkalan Pendaratan Ikan berperan penting dalam menggerakkan dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan nelayan

UPI

Unit Pengolahan Ikan adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktifitas pengolahan ikan

INDEKS

—G—

GT, 6, 51, 55, 65, 68, 69, 73, 79, 83, 92,
93, 94, 96, 97, 103, 107

—P—

PPI, 32, 52, 60, 63, 73, 93, 101, 106, 107
PPN, 19, 52, 55, 56, 60, 63, 73, 74, 93, 97,
100, 101, 106, 107

—T—

TPI, 18, 26, 30, 42, 52, 55, 60, 73, 78, 96,
101, 106, 107

—U—

UPI, 51, 56, 62, 64, 65, 68, 74, 79, 88,
106, 107

RIWAYAT PENULIS



Dr. Jamilah, S.P.,M.P adalah staf pengajar di Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh – Aceh. Pada tahun 1996 menyelesaikan pendidikan Sarjana (S-1) pada Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Syiah Kuala. Pada Tahun 2003 mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan Magister melalui beasiswa Dirjen DIKTI, sehingga memperoleh gelar Magister Pertanian predikat *Cumlaude* pada Program Pascasarjana Ekonomi Pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Pada tahun 2016, melalui beasiswa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dapat menyelesaikan pendidikan Program Doktor pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.

Buku *Minapolitan Perikanan Tangkap dan Kemiskinan Rumah Tangga Nelayan* merupakan buku kedua yang dihasilkan sebagai bagian dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan dengan sumber dana hibah penelitian dari DPRM Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

This page is intentionally left blank

Dalam rangka memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada khususnya yang terkait dengan pengembangan perikanan dalam arti luas maka diupayakan suatu pendekatan melalui produk yaitu perencanaan pengembangan kawasan berbasis ekonomi perikanan budidaya dan tangkap (Minapolitan). Minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis manajemen ekonomi kawasan dengan motor penggerak sektor kelautan dan perikanan. Program yang mulai dijalankan Pemerintah Republik Indonesia (RI) sejak 2009 ini merupakan upaya untuk merevitalisasi sentra produksi perikanan dan kelautan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan rakyat. Minapolitan ini merupakan salah satu realisasi dari program revolusi biru yang digalakkan Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia yang salah satu pilarnya adalah mengubah pola pikir daratan ke maritim. Dengan visi menjadi penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar pada 2015, pihaknya tidak akan mendongkrak semua komoditas melainkan hanya akan memprioritaskan pada komoditas yang telah unggul.

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat, karunia, dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini yang merupakan kumpulan hasil-hasil penelitian tentang minapolitan perikanan tangkap dan kemiskinan rumah tangga.

Banyak pihak yang telah berkontribusi sehingga buku ini dapat terealisasi dengan baik. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada DPRM Kemenristekdikti atas dukungan pendanaan penelitian sehingga penelitian dapat dilakukan tepat waktu dan berkesinambungan. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada rekan peneliti yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap moment penelitian. Kepada Unimal Press, penulis mengucapkan terima kasih karena telah bersedia membantu dalam penerbitan buku ini. Tak lupa juga bagi sivitas akademika Fakultas Pertanian yang telah memberikan ijin dan dukungan penuh selama melakukan penelitian.

UNIMAL PRESS

ISBN 978-602-464-037-8



9

786024

640378